

**RESPONS PEMIKIRAN ISLAM TERHADAP
PERUBAHAN RELASI RAKYAT DAN NEGARA
DI INDONESIA ERA REFORMASI**



Oleh:

YUSDANI
NIM : 05.3.491

Promotor:

Prof. Dr. Machasin, M.A.
Prof. Drs. Purwo Santoso, M.A., Ph.D.

DISERTASI

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Doktor
Dalam Ilmu Agama Islam**

**PROGRAM PASCASARJANA (S-3) UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusdani
NIM : 05.3.491
Jenjang : Doktor

Menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 28 Juni 2016
Saya yang bertanda tangan,



Yusdani
NIM: 05.3.491



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : **RESPONS PEMIKIRAN ISLAM TERHADAP PERUBAHAN RELASI RAKYAT DAN NEGARA DI INDONESIA ERA REFORMASI**

Ditulis oleh : Drs. Yusdani, M.Ag.

NIM : 05.3.491/S3

**Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Agama Islam**

Yogyakarta, 15 Agustus 2016

Rektor
Ketua Sidang



Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 10 OKTOBER 2015, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **DRS. YUSDANI, M.Ag.** NOMOR INDUK MAHASISWA **05.3.491/S3** LAHIR DI KURIPAN TANGGAL **11 NOPEMBER 1961,**

LULUS DENGAN PREDIKAT :

~~PUJIAN (CUM LAUDE) / SANGAT MEMUASKAN / -MEMUASKAN~~**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR STUDI KEISLAMAN, DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE- 520**

YOGYAKARTA, 15 AGUSTUS 2016

REKTOR,
KETUA SIDANG,



PROF. DRS. KH. YUDIAN WAHYUDI, MA., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Disertasi berjudul : **RESPONS PEMIKIRAN ISLAM TERHADAP PERUBAHAN RELASI RAKYAT DAN NEGARA DI INDONESIA ERA REFORMASI**

Nama Promovendus : Drs. Yusdani, M.Ag.
N I M : 05.3.491/S3

()

Ketua Sidang : Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

()

Sekretaris Sidang : Dr. H. Waryono, M.Ag.

()

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Machasin, MA.
(Promoto/Penguji)

()

2. Prof. Drs. H. Purwo Santoso, MA., Ph.D.
(Promoto/Penguji)

()

3. Dr. Ahmad Yani Anshori, MA.
(Penguji)

()

4. Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
(Penguji)

()

5. Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, MA.
(Penguji)

()

6. Prof. Dr. H. Abd. Munir, SU.
(Penguji)

()

Diujikan di Yogyakarta pada tanggal 15 Agustus 2016

Pukul 14 s/d selesai

Hasil / Nilai (IPK)3,49.....

Predikat Kelulusan : ~~Pujian (Cum Laude)~~ / Sangat Memuaskan / ~~Memuaskan~~



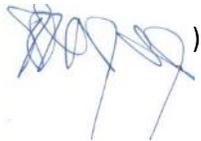


**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA**

Promotor : Prof. Dr. H. Machasin, M.A.

()

Promotor : Prof. Drs. Purwo Santoso, M.A., Ph.D.

()

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**RESPON PEMIKIRAN ISLAM TERHADAP PERUBAHAN RELASI
RAKYAT DAN NEGARA DI INDONESIA ERA REFORMASI**

yang ditulis oleh:

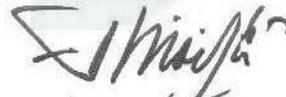
Nama : Yusdani
NIM : 05.3.491
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup (Pendahuluan) pada tanggal 10 November 2015, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 29 April 2016

Promotor,



Prof. Dr. H. Machasin, M.A

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**RESPON PEMIKIRAN ISLAM TERHADAP PERUBAHAN RELASI
RAKYAT DAN NEGARA DI INDONESIA ERA REFORMASI**

yang ditulis oleh:

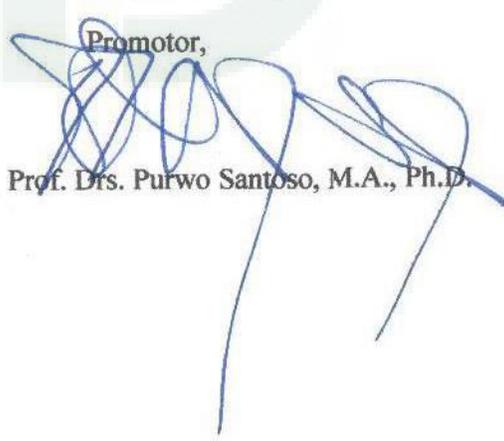
Nama : Yusdani
NIM : 05.3.491
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup (Pendahuluan) pada tanggal 10 November 2015, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 4 Mei 2016

Promotor,


Prof. Drs. Purwo Santoso, M.A., Ph.D.

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

RESPON PEMIKIRAN ISLAM TERHADAP PERUBAHAN RELASI RAKYAT DAN NEGARA DI INDONESIA ERA REFORMASI

yang ditulis oleh:

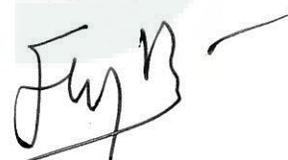
Nama : Yusdani
NIM : 05.3.491
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan pada tanggal 10 November 2015, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promodi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 13 April 2016

Penguji,



Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**RESPON PEMIKIRAN ISLAM TERHADAP PERUBAHAN RELASI
RAKYAT DAN NEGARA DI INDONESIA ERA REFORMASI**

yang ditulis oleh:

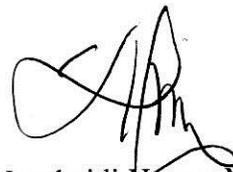
Nama : Yusdani
NIM : 05.3.491
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan pada tanggal 10 November 2015, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 20 April 2016

Penguji,



Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M. Phil., Ph.D.

NOTA PERSETUJUAN

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

RESPON PEMIKIRAN ISLAM TERHADAP PERUBAHAN RELASI RAKYAT DAN NEGARA DI INDONESIA ERA REFORMASI

yang ditulis oleh:

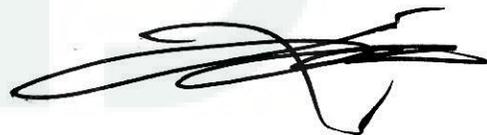
Nama : Yusdani
NIM : 05.3.491
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan pada tanggal 10 November 2015, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 25 April 2016

Penguji,



Dr. Ahmad Yani Anshori, M.A.

ABSTRAK

Studi tentang respons pemikiran Islam terhadap perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia pasca reformasi dilatarbelakangi oleh segregasi antara kajian Islam, khususnya kajian pada aras pemikiran tentang perubahan dan dinamika politik. Di satu sisi ada peneliti yang bertolak dari situasi internal umat Islam dengan kultur acuan teologis, mengandaikan pemikiran tokoh dan komunitas Islam terisolasi dari dinamika politik. Di sisi lain, para pengkaji politik dan pemerintahan, mendudukan umat Islam sekadar sebagai warga negara yang memiliki atribut khas, yang seolah tidak terinspirasi oleh ajaran dan nilai-nilai keagamaan yang diyakininya.

Keterkaitan antara pemikiran dan dinamika politik yang berlangsung tidak mudah ditunjukkan mengingat watak ajaran Islam yang bersifat *polyinterpretable* (dapat interpretasikan secara berbeda-beda, dan memang interpretasi tunggal justru bersifat problematik). Untuk menjembatani jurang pemisah kajian di atas, penelitian ini menyikapi bahwa meskipun formulasi ajaran tersebut dalam pemikiran kenegaraan juga bervariasi, tetap saja ada arus utama pemikiran yang secara signifikan menentukan arah atau jenis perubahan.

Permasalahan pokok yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran Islam diartikulasikan umat Islam dalam menyikapi perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi? Penelitian ini merupakan studi pemikiran Islam yang diwacanakan oleh Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dan organisasi masyarakat Islam: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pendekatan yang digunakan adalah historis dan sosiologis, sedangkan teknik analisisnya adalah kualitatif dan sosiologi pengetahuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Islam yang dikemukakan oleh para tokoh dan ormas Islam dalam mempola-ulang relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi merupakan kontribusi pro-aktif Islam dalam proses demokratisasi di Indonesia, dan sekaligus memberi arah

demokrasi tersebut yang didasarkan pada rasionalitas dan etika. Oleh karena itu, kontribusi pemikiran ini dapat dikatakan melampaui dan menjadi alternatif bagi pengembangan demokrasi yang bersifat prosedural (mekanistik) yang dikembangkan berbagai pihak di Indonesia. Demokrasi yang didasarkan pada etika dan rasionalitas itulah relasi rakyat dan negara di Indonesia menjadi kokoh dan bermartabat.

Kata kunci: pemikiran Islam, relasi rakyat-negara, Indonesia, dan reformasi



ملخص البحث

إن الدراسة بشأن موقف الفكر الإسلامي من التغيرات في العلاقة بين الشعب والدولة في إندونيسيا في عهد الإصلاح تكمن وراءها التفرقة بين الدراسات الإسلامية وخاصة الدراسة الفكرية وبين الدراسة في تغيير وحراك سياسي. بعض الباحثين الذين ينطلقون من الدراسات الإسلامية، فهم ينطلقون من الوضع الداخلي من المسلمين مع ثقافتهم الدينية، مفترضين أفكار العلماء المسلمين معزولة عن الديناميات السياسية في ناحية، ومن ناحية أخرى، الخبراء في السياسة والحكومة، يضعون المسلمين كالمواطنين الذين لديهم سمات معينة، ولم يستوحوا من تعاليم الإسلام وقيمه.

والعلاقة بين الفكر والديناميات السياسية موجودة بالفعل إلا أن وجودها لم يثبت بسهولة نظرا لطبيعة تعاليم الإسلام. وعلاوة على ذلك، إن الإسلام نفسه هو يتسم بقابلية تعدد التأويلات (poly-interpretable). ومن أجل سد هذه الفجوة، يبين هذا البحث أن هذه التعاليم في فكر الدولة متنوعة، إلا أن هناك تيار رئيسي للفكر يحدد إلى حد كبير اتجاه التغيير ونوعه.

المشكلة الرئيسية في هذا البحث هي كيف يوضح المسلمون الفكر الإسلامي في معالجة التغيرات في العلاقة بين

الشعب والدولة في إندونيسيا في عهد الإصلاح؟ يعد هذا البحث دراسة في الفكر الإسلامي الذي مهده نور خالص مجيد وعبد الرحمن وحيد ومنظمات إسلامية مثل مُجَدِّية، ونهضة العلماء، وجبهة المدافعين عن الاسلام، ومجلس المجاهدين الإندونيسي، وحزب التحرير الإندونيسي. المنهج المتبع في هذا البحث مهج تاريخي وسوسيولوجي. وأما طريقة التحليل المستخدمة فهي تحليل نوعي وسوسيولوجيا المعرفة.

توصل هذا البحث إلى أن الفكر الإسلامي الذي يعبر عنه العلماء والمنظمات الإسلامية في إعادة صياغة العلاقة بين الشعب والدولة في إندونيسيا في عهد الإصلاح يساهم مساهمة بشكل نشط في عملية التحول الديمقراطي في إندونيسيا، وكذلك إعطاء التوجيهات لهذه الديمقراطية المبنية على العقلانية و الأخلاق. ولذلك، فإن مساهمة هذا الفكر يمكن أن يقال إنها قد تجاوزت الحد، وتكون بديلة عن تنمية الديمقراطية ذات الطابع الإجرائي (ميكانيكي) التي وضعها مختلف الأطراف في إندونيسيا في عهد الإصلاح. ومع هذه الديمقراطية التي تستند إلى الأخلاق والعقلانية، فالعلاقة بين الشعب القوي والدولة القوية في إندونيسيا تصبح صلبة وكريمة.

الكلمات المفتاحية: الفكر الإسلامي، العلاقة بين
الشعب والدولة، إندونيسيا، الإصلاح



ABSTRACT

The study of Islamic thought response to changes in the people-state relation in Indonesia in the reform era was motivated by segregation between Islamic studies, typically study at the level of thought, and the study of change and political dynamics. On one hand, there were researchers who began from Islamic studies, starting from the internal situation of Muslims in theological reference culture, presupposing the thoughts of the leader and the Islamic community isolated from the political dynamics. On the other hand, the analysts of politics and government positioned the Muslims merely as citizens who had the typical attributes, seemingly not inspired by the teachings and values of religious beliefs.

The connection between thought and political changes that took place was not easily demonstrated in view of the nature of the teachings of Islam. Moreover, Islam itself is polyinterpretable (it can be interpreted differently, and indeed a single interpretation of it is problematic). To bridge the gap above, this study addressed that even formulations that teaching in the thinking of state also varied, there was still the mainstream of thought which significantly determined the direction or type of change.

The main problem to be the focus of this research was how the Islamic thought was articulated by the Muslims in addressing changes in the people-state relations in Indonesia's reformation era. This study was a discourse of Islamic thought by Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid and the organization of Islamic society: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Front Pembela Islam, the Indonesian Mujahidin Council, and Hizbut Tahrir Indonesia. The approach used in this study was historical and sociological. The analysis technique used the qualitative analysis and the sociology of knowledge.

The results of this study indicated that Islamic thought expressed by the leaders and Islamic organizations in resetting the pattern of the people-state relations in Indonesia's reformation era was pro-active Islamic contribution in the democratization process in Indonesia, while giving the

directions to the democracy based on rationality and ethics. Therefore, the contribution of this thinking could be said beyond and be an alternative for the democratic development which was procedural (mechanistic) developed by various parties in Indonesia's reformation era. With democracy based on ethics and rationality, the people-state relations became strong, powerful, and dignified.

Keywords: Islamic thought, the people-state relations, Indonesia, reformation



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	S\`a	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	H}a	h{	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓa	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	d{	de (dengan titik di bawah)
	Ṭa		te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain		Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi

ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	We
	Ha	h	ha
ء	Hamz ah		Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

	ditulis	<i>muta aqqidi>n</i>
عدة	ditulis	

C. Ta'marbutah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

بة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehadaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>Kara>mah al auliya> ‘</i>
---------------	---------	------------------------------------

2. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zaka>tul-fit}ri</i>
------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

–	kasrah	ditulis	<i>I</i>
–	fath}ah	ditulis	<i>A</i>
–	d}ammah	ditulis	<i>U</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	a> <i>ja>hiliyyah</i>
2	Fathah + ya mati	ditulis	a>
3		ditulis	i> <i>kari>m</i>
4	Dammah + wawu mati	ditulis	u> <i>furu>d}</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fath} h + y mati بينكم	ditulis	Ai <i>bainakum</i>
---	---------------------------	---------	-----------------------

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ
لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dengan memanjatkan puji syukur *alhamdulillah* ke hadirat Allah SWT atas segala hidayah, rahmat, dan karunia-Nya yang tak terhingga yang telah dilimpahkan-Nya kepada penulis, tidak terkecuali dalam proses penyelesaian disertasi ini sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan. Penulisan disertasi ini dilakukan sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi Program Doktor (S3) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan disertasi ini juga dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pemikiran berkaitan dengan perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi. Oleh karena itu, penulisan disertasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi pemikiran untuk memperkaya *khazanah* keilmuan

dan kepustakaan studi Islam pada umumnya serta *Fiqh Siyasah* (teori ketatanegaraan Islam) khususnya dalam bentuk kajian ilmiah. Di samping itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian lanjutan bagi para peminat (peneliti) bidang *fiqh siyasah* sebagai upaya untuk mengeksplorasi konsepsi atau teori relasi rakyat dan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Disertasi ini akhirnya berubah bentuknya menjadi seperti yang sekarang ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang selalu memperhatikan perkembangan penulis selama proses penyelesaian dalam penulisan disertasi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis ingin menghaturkan ucapan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sangat penulis hormati sebagai berikut:

Petama, ucapan terima kasih penulis kepada Prof. Dr. Machasin, M.A. selaku promotor, yang di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai salah seorang pejabat pada Kementerian Agama R.I. dan pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta selalu meluangkan waktu bahkan dalam setiap kali ada kesempatan baik di rumah maupun pada saat memberikan kuliah pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada saat-saat

senggangnya, beliau menyempatkan untuk membimbing penulis. Beliau membaca dengan teliti, mengoreksi, memberi masukan antara lain berkenaan dengan teori, konsep, dan mengarahkan substansi tulisan dalam kerangka relasi rakyat dan negara dari sudut pandang Islam. Atas semua ini semoga Allah SWT membalas jasa baik beliau dengan balasan yang jauh lebih baik lagi, Amin.

Kedua, ucapan terima kasih kepada Prof. Drs. Purwo Santoso, M.A. Ph.D selaku Promotor yang di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai pengajar di Universitas Gadjah secara tulus ikhlas menyediakan waktu di rumah untuk memberikan pengarahan, bimbingan, berdiskusi dan dorongannya kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini. Selain runtutnya dialog dalam pembahasan substansi materi disertasi yang selalu beliau tanamkan, Penulis amat terkesan dengan himbauan beliau, baik melalui dialog langsung maupun *via* email agar serius dalam menulis disertasi ini. Atas semua ini semoga Allah SWT membalas jasa baik beliau dengan balasan yang lebih baik lagi, Amin.

Ketiga, terima kasih penulis haturkan kepada Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga c./q. Ketua beserta Staf Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta yang telah memperkenankan penulis menuntut ilmu di lembaga yang Bpk / Ibu / Sdr-i kelola. Selama masa studi, banyak bantuan pelayanan baik pengurusan akademik maupun administratif yang telah penulis dapatkan demi kesuksesan studi ini. Atas semua ini semoga Allah SWT membalas jasa baik beliau, Amin.

Keempat, ucapan banyak terima kasih yang sama penulis haturkan kepada

Tim Penguji Prapendahuluan disertasi ini, yaitu Prof. Dr. H. Maragustam, M.A., Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag, Prof. Dr. H. Machasin, M.A., Prof. Drs. Purwo Santoso, M.A., Ph.D, dan Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag yang telah memberikan penilaian dan saran-saran perbaikan pada waktu ujian kelayakan (pratertutup) disertasi ini Jumat, 19 Desember 2014.

Kelima, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Tim Penguji Pendahuluan (tertutup) yaitu Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, M.A., Dr. Moch Nur Ichwan, M.A., Prof. Dr. Siswanto Masruri, M.A., Prof. Dr. Machasin, M.A., Prof. Drs. Purwo Santoso, M.A., Ph.D., Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag yang telah memberikan saran-saran perbaikan dan kritik konstruktif terhadap disertasi ini pada waktu ujian tertutup Selasa, 10 November 2015.

Keenam, Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang selama penulis menempuh studi telah silih berganti dari Dr. Ir. Luthfi Hasan, M. S., Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M. Ec., kemudian Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc. hingga sekarang yang telah memberikan izin dan pembiayaan selama menempuh studi pada Program Doktor (S3) Pengkajian Islam pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai dengan diselesaikannya studi ini. Atas semua ini semoga Allah SWT membalas jasa baik mereka, Amin.

Ketujuh, ucapan banyak terima kasih tidak lupa penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia beserta staf yang selama penulis menempuh studi juga telah silih berganti dari Drs. Muzaffar Akhwan, M.A., Drs. M.Fajar Hidayanto, MM., Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum. dan Drs. M.Tamyiz Mukharrom, MA, Ph.D yang telah memberikan izin kepada penulis untuk “mengurangi aktivitas dan tugas fakultas” dalam rangka menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akhirnya dapat menyelesaikan studi ini. Demikian pula ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh staf pengajar dan tenaga kependidikan FIAI UII, khususnya Jurusan Syari’ah FIAI UII, Pimpinan dan seluruh staf Program Pascasarjana FIAI UII dan

seluruh staf Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dorongannya agar penulis segera menyelesaikan studi S3 di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Atas semua ini semoga Allah SWT membalas jasa baik pada dekan dan para mantan dekan FIAI UII tersebut, Amin.

Tidak terlupakan juga, penulis haturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, Ali Rahman (alm.) dan Aminah yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing penulis serta mengajarkan kemandirian yang penuh dalam segala hal dan keteguhan prinsip yang konsisten, hal ini merupakan modal bagi penulis untuk melangkah dalam setiap aktivitas yang hendak dilakukan. Atas semua ini, semoga Allah SWT menerima amal ibadah mereka, memberikan pahala yang jauh lebih banyak, mengampuni dosa dan kesalahan mereka, serta mengasihani mereka sebagaimana mereka telah mengasihani penulis sejak kecil, *Amin*.

Akhirnya, ungkapan terima kasih yang setulus-tulusnya harus pula penulis sampaikan kepada istri penulis Zakiah dan anak-anak penulis Emil Hikmawan, Dina Fitriyah Rahmawati, dan Diauddin Rahman yang telah ikut merasakan suka dan duka selama penulis menempuh studi ini. Penulis menyadari

sepenuhnya, banyak waktu yang tersita dan perhatian kasih sayang yang hilang di tengah-tengah keluarga yang telah “dikorbankan” karena tuntutan harus menyelesaikan studi ini. Atas semua ini, semoga Allah SWT membalas jasa baik kalian dan menjadi *amal salihah* di sisi-Nya, *Amin*.

Terakhir, selama menempuh studi khususnya ketika proses penyelesaian disertasi, penulis menyadari telah banyak berbuat kesalahan kepada berbagai pihak baik disengaja maupun tidak, dan oleh karenanya pada kesempatan yang baik ini penulis mohon ma'af yang sebesar-besarnya. Semoga karya ini ada manfaatnya, *Amin*.

Yogyakarta, Juni 2016

Yusdani

DAFTAR ISI

RESPONS PEMIKIRAN ISLAM TERHADAP PERUBAHAN RELASI RAKYAT-NEGARA DI INDONESIA ERA REFORMASI	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
YUDISIUM.....	iv
DEWAN PENGUJI.....	v
PENGESAHAN PROMOTOR	vi
NOTA DINAS.....	vii
ABSTRAK.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xix
KATA PENGANTAR.....	xxii
DAFTAR ISI.....	xxix
DAFTAR TABEL.....	xxxii
DAFTAR DIAGRAM	xxxiii
BAB I. MELACAK RESPONS ISLAM TERHADAP PERUBAHAN HUBUNGAN RAKYAT DAN NEGARA	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Telaah Pustaka.....	13
F. Kerangka Teori	39
G. Metode Penelitian.....	54
H. Sistematika Pembahasan	85

BAB II. PERUBAHAN KONTEKS PERGUMULAN PEMIKIRAN ANTARA MARGINALISASI NEGARA DAN SENTRALISASI MASYARAKAT	87
A. Perubahan Pola Hubungan Rakyat dan Negara	88
B. Paradigma Tanggungjawab Negara	101
C. Paradigma Tanggungdesak Warga.....	109
 BAB III. PEMIKIRAN TOKOH MUSLIM	 123
A. Pemikiran Islam dan Ke-Indonesiaan Nurcholish Madjid	124
B. Pemikiran Islam Pribumi Abdurahman Wahid	177
C. Islam, Kerakyatan, dan Ke-Indonesiaan	219
 BAB IV. PANDANGAN ORMAS ISLAM MAINSTREAM	 235
A. Muhammadiyah.....	237
B. Nahdlatul Ulama	283
C. Islam dan Reposisi Relasi Rakyat-Negara	335
 BAB V. PANDANGAN ORMAS ISLAM NON- MAINSTREAM.....	 351
A. Negara Islam Indonesia Kaffah Front Pembela Islam	353
B. Negara Khilafah Nusantara Majelis Mujahidin Indonesia	393
C. Negara Khilafah Transnasional Hizbut Tahrir Indonesia	441

D. Islamisme dan Pengaturan Relasi Rakyat-Negara	493
--	-----

BAB VI. DINAMIKA RESPONS PEMIKIRAN TERHADAP PERUBAHAN RELASI RAKYAT DAN NEGARA DI ERA REFORMASI	505
A. Peta dan Dinamika Pemikiran	507
B. Strategi Tokoh dan Islam Mainstream	559
C. Strategi Islam Non-Mainstream	580
BAB VII. PENUTUP	628
A. Kesimpulan	628
B. Rekomendasi	640
DAFTAR PUSTAKA	643
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1: PEDOMAN WAWANCARA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Pola Relasi Rakyat–Negara di Indonesia Era Orde Baru dan Era Reformasi, 47
- Tabel 2. Peta Respon Pemikiran Islam terhadap Perubahan Relasi Rakyat dan Negara di Indonesia Era Reformasi, 508



DAFTAR DIAGRAM

Gambar 1 Langkah-Langkah Penelitian, 84

Gambar 2 Strategi Aktualisasi dan Transformasi Pemikiran
Pertama, 560

Gambar 3 Strategi Aktualisasi dan Transformasi Pemikiran
Kedua, 579



BAB I

MELACAK RESPONS ISLAM TERHADAP PERUBAHAN HUBUNGAN RAKYAT DAN NEGARA

A. Latar Belakang Masalah

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, perkembangan pemikiran Islam di Indonesia menemukan momentum baru untuk mengekspresikannya. Liberalisasi secara besar-besaran menjadikan tidak ada hambatan dalam mengekspresikan pemikiran warga negara. Dalam konteks ini hadirlah pemikiran dan gerakan berbagai kelompok, tidak terkecuali dari komunitas Islam. Selain upaya-upaya meneruskan gagasan dari tokoh dan organisasi Islam yang telah menjadi *mainstream* sebelum reformasi, juga muncul gerakan-gerakan baru Islam, seperti Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan lain-lain yang mengusung pemikiran yang berbeda.

Hal tersebut menunjukkan bawah betapa responsif umat Islam terhadap terbukanya ruang publik, yang menandai pula sensitivitas mereka pada dinamika politik di negeri ini. Sebaliknya, dinamika politik di Indonesia perlu dijelaskan

melalui telaah terhadap dinamika pemikiran yang berlangsung. Perubahan relasi negara dan rakyat niscaya tidak lepas dari respons mereka. Meskipun begitu, studi tentang relasi rakyat dan negara yang terbingkai dalam wacana demokrasi ataupun demokratisasi, cenderung mengabaikan keterlibatan komunitas Islam, yang tidak hanya merespons perubahan situasi politik dengan tindakan-tindakannya, melainkan juga dengan pemikirannya. Selain itu, respons yang didasari oleh pemikiran yang komprehensif dan mendalam—yaitu respons yang didasari ajaran agama Islam—niscaya menstruktur secara signifikan dalam dinamika politik itu sendiri.

Studi ini digerakkan oleh kegelisahan terhadap segregasi (keterpisahan) keilmuan. Terjadi pemisahan antara kajian Islam, khususnya kajian pada aras pemikiran di satu sisi, dengan kajian tentang perubahan dan dinamika politik di sisi lain. Jelasnya, ada para peneliti yang bertolak dari studi Islam, bertolak dari situasi internal umat Islam dengan kultur acuan teologis sendiri, mengandaikan pemikiran tokoh dan komunitas Islam terisolasi dari dinamika politik. Pada saat yang bersamaan, para pengkaji politik dan pemerintahan, mendudukan umat Islam sekadar sebagai warga negara atau rakyat yang memiliki atribut khas,

yang seolah tidak terinspirasi oleh ajaran dan nilai-nilai keagamaan yang diyakininya.

Segregasi keilmuan ini perlu dijumpatani dengan kajian khusus. Keterkaitan antara kedua tradisi kajian di atas akan terlihat jika menggunakan cara pandang historis-sosiologis, di mana pemikiran menjadi kekuatan penjelas. Di sini, pemikiran Islam, termasuk dalam bidang politik dengan mudah dipahami kaitannya dengan lingkungan sosialnya. Apalagi kalau pemikiran-pemikiran Islam yang berkembang ini dipahami tautannya dengan perubahan lingkungan sosial mikro (nasional) dan makro (global) yang terus menggejala.

Keterkaitan antara pemikiran dan dinamika politik yang berlangsung memang tidak mudah ditunjukkan mengingat watak ajaran agama. Apalagi, ajaran Islam itu sendiri bersifat *polyinterpretable* (dapat interpretasikan secara berbeda-beda, dan memang interpretasi tunggal justru bersifat problematik), maka untuk menjembatannya, kajian ini menyikapi bahwa formulasi ajaran tersebut dalam pemikiran kenegaraan juga

bervariasi, tetap saja ada *mainstream* yang secara signifikan menentukan arah atau jenis perubahan.¹

Kedudukan muslim, sebagai komponen mayoritas warga negara Indonesia sangat signifikan. Kesadaran peran dan posisi politiknya dipengaruhi oleh pemikiran yang diadopsi.² Persoalannya bukan hanya, apakah proses penyadaran yang tengah berlangsung, berkontribusi dalam mempolakan hubungan rakyat dan negara yang semakin demokratis. Persoalan yang tidak kalah pentingnya untuk ditelaah adalah, isi pemikiran yang bagaimana selama ini bergulir dan diikuti dengan perubahan relasi rakyat dan negara tersebut.

Sebagaimana dikemukakan oleh para pihak bahwa, pola hubungan rakyat dan negara ala Orde Baru, ditandai oleh dominasi negara yang diikuti dengan pelemahan kekuatan rakyat.³ Hal ini dapat dicapai dengan reproduksi ideologi yang

¹W. Montgomery Watt, *Muhammad: Prophet and Statesman* (London: Oxford University 1964). Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), 5.

²Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), xi-xii, 347-348. Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 2008), 379.

³Sejak akhir 1960-an hingga akhir 1990-an orde baru berhasil melembagakan struktur kekuasaan yang otoritarian. Negara menjadi begitu kuat, sementara rakyat posisinya begitu lemah. Negara telah menjadi gurita politik yang perkasa di hadapan rakyat. Sementara rakyat menjadi *silent*

dimotori oleh negara, diikuti dengan pertarungan pemikiran keagamaan.⁴ Sedangkan di era reformasi, rakyat berada dalam posisi kuat dan negara diharapkan untuk meminggirkan dirinya.⁵ Hal itu kemudian diikuti dengan pertarungan pada aras pemikiran. Keanekaragaman pemikiran yang diartikulasikan oleh tokoh-tokoh Islam tersebut di atas, kontribusinya terasa insignifikan. Klaim bahwa demokratisasi di Indonesia disangga oleh pemikiran Islam sebagaimana diwacanakan selama ini,⁶ sangat boleh jadi sulit dipertahankan.

Berbagai studi di kalangan ilmuwan politik menunjukkan bahwa pergeseran pola hubungan rakyat dan negara selama ini lebih dijelaskan oleh gencarnya terpaan pasar global.⁷ Poin yang hendak dikedepankan di sini adalah aspek pemikiran. *Pertama,*

majority dalam artian yang sesungguhnya, yaitu sosok rakyat awam yang bisu, gagap, dan tidak berdaya di hadapan kekuatan Negara. Haedar Nashir, "Demokratisasi Hubungan Negara dan Rakyat", *Jurnal Media Inovasi*, no.1 (Oktober, 1999), 11.

⁴Abdurrahman Wahid (Editor)., *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, Gerakan Bhinneka Tunggal Ika dan Maarif Institute, 2009).

⁵Munafrizal Manan, *Pentas Politik Indonesia Pasca Orde Baru* (Yogyakarta: IRE Press, 2005), 30.

⁶Dikutip dari <http://www.setkab.go.id/artikel-6197-indonesia-sebagai-model-perkembangan-demokrasi-muslim-masalah-dan-peluang.html>, diakses 2 April 2013.

⁷Tim editor, *Menuju Masyarakat Madani Strategi dan Agenda Reformasi* (Yogyakarta: Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan & Kawasan Universitas Gadjah Mada Bekerjasama dengan Konrad – Adenauer-Stiftung, 1998), 204-205.

karena dimensi pemikiran tidak dikedepankan dalam telaahnya, kontribusinya lalu tidak terpetakan. *Kedua*, masuknya cara kerja berbasis tatanan global sebetulnya berlangsung melalui penetrasi pada tataran pemikiran. Seiring dengan hal itu, semakin kuat desakan untuk merumuskan kembali tugas dan peran negara. Dalam konteks ini tidak lagi dibayangkan sebagai kekuatan tunggal yang diberi amanat penuh untuk melakukan apapun yang diperlukan demi melindungi rakyat, melainkan hanya sebagai penjaga aturan main; memfasilitasi interaksi sesama warga negara yang didorong untuk berkompetisi habis-habisan untuk menduduki jabatan publik. Kekuatan ekonominya menjadi basis untuk memperjuangkan hak, dan negara justru dalam posisi untuk selalu dikontrol.⁸

Wacana *good governance*, yang marak belakangan ini, menandai kuatnya pemikiran bahwa negara harus minggir sejauh mungkin dalam mengelola kepentingan publik.⁹

⁸Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan* (Jakarta: Kompas, 2003), 212.

⁹*Good Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang merupakan perluasan dari konsep pemerintah (*government*) karena konsep pertama terkandung pengertian bahwa pemerintahan tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah (*government*) sendiri tetapi juga bersama-sama dengan aktor-aktor di luar pemerintah, yaitu masyarakat secara luas sebagai *stakeholders*. Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemimpinan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003), 4.

Pertanyaannya, apakah memang seperti ini kerangka pikir umat Islam? Apakah Islam memang mengajarkan peminggiran peran negara ?

Mengingat keragaman interpretasi ajaran Islam sebagaimana disebutkan di atas, kontroversi di antara para pemikir Islam adalah keniscayaan. Kalau tidak ada, maka pergeseran pola relasi rakyat dan negara yang tengah berlangsung bukanlah karena olah pemikiran kalangan Islam. Dari segi pemikiran, perlu adanya rumusan yang jelas tentang peran negara, sehingga dapat dirumuskan lebih lanjut pengaturan tentang distribusi, produksi dan sebagainya.¹⁰ Gagasan-gagasan kunci, seperti bagaimana relevansi negara sebagai kekuatan untuk melindungi rakyat penting untuk dirumuskan, dan lebih dari itu, umat Islam Indonesia perlu memiliki rumusan yang jelas, betapapun berbeda-beda, tentang hal itu, sehingga tuntutan untuk membuka pasar di dalam negeri pada era globalisasi semakin melebar.¹¹

Kejelasan pemikiran tentang hal-hal tersebut di atas penting bukan hanya karena pertimbangan praktis, bahwa pengaruh

¹⁰Tim editor, *Menuju*, 202 – 203.

¹¹*Ibid.*, 203.

pasar global terhadap kehidupan rakyat Indonesia di era reformasi ini sangatlah kuat. Telaah terhadap pemikiran Islam yang berkembang selama ini memperlihatkan betapa kuat keinginan untuk merespons tantangan dan pengaruh pasar global itu. Dalam kaitan ini, para tokoh dan pemikir Islam sadar betul bahwa apapun pola hubungan rakyat dan negara yang hendak diberlakukan, maka berdampak pula pada umat Islam.

Terlepas dari pertimbangan praktis tersebut di atas, umat Islam perlu memastikan bahwa kehidupan bernegara yang dilangsungkan tetap dalam koridor ajaran agamanya. Dalam konteks ini, perlu ditegaskan bahwa studi ini berangkat dari keniscayaan adanya *overlap* (tumpang tindih), bukan sinergi antara pemikiran Islam sebagai aktualisasi ajaran agama dengan pemikiran kenegaraan dalam posisinya sebagai warga negara. Peran ganda seorang muslim sebagai pemeluk ajaran agama dan sebagai warga negara, dalam studi ini diposisikan sebagai keniscayaan yang memungkinkan Indonesia dapat membangun sistem politik yang memenuhi kaidah internasional dan pada saat yang sama mendapat dukungan dari warganya yang mayoritas memeluk ajaran Islam.

Keniscayaan tersebut meskipun sederhana namun punya implikasi mendasar karena dalam konteks pencarian solusi terhadap arah tatanan dan masa depan kehidupan bernegara di Indonesia, terutama dalam konteks relasi rakyat dan negara yang mengemuka masih jarang ditemukan studi baik oleh para ilmuwan politik Indonesia maupun peneliti atau studi keislaman di Indonesia khususnya yang membahas tentang pentingnya peran dan kontribusi Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Keniscayaan ini telah terabaikan dalam kajian tentang pemikiran Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan kajian pemikiran Islam yang berkembang sangat terobsesi dengan melakukan karakterisasi dan pada gilirannya sedikit banyak mencitrakan eksotisme.

Semangat untuk mengungkap eksotisme terlihat dalam berbagai kajian tentang rakyat dan negara. Semangat kajian yang ada adalah menunjukkan perbedaannya dengan pemikiran umat lain. Agar tidak lagi terjebak dalam obsesi untuk mengungkap eksotisme ajaran Islam, Kuntowijoyo menggarisbawahi urgensi menegaskan umat Islam di hadapan negara.¹² Hanya saja, kebanyakan studi tentang pemikiran

¹²Kuntowijoyo, *Paradigma*, 379.

politik Islam, sejauh ini berhenti pada karakterisasi watak pemikiran. Sebagaimana nanti diperlihatkan, belum banyak studi yang didedikasikan untuk mengungkap cara merespons dinamika masyarakat melalui pencurahan kapasitas berpikir.

Studi Mark Woodward tentang prospek di Islam dalam merespons demokratisasi, adalah contoh yang tepat. Dia mengelompokkan pemikiran Islam di era pasca Orde Baru ke dalam lima kelompok, yaitu : (1) *indigenized* (pribumisasi) Islam, (2) Islam tradisional, (3) Islam modernis, (4) Islamisme atau Islamis, dan (5) neo-modernisme Islam.¹³

¹³Mark Woodward, , “Indonesia, Islam and the Prospect of Democracy”, *SAIS Review* Vol. XXI, No. 2, (2001), 29-37. Dalam kategori *pertama*, Woodward mendudukan adanya *indigenized* Islam adalah sebuah ekspresi Islam yang bersifat lokal; secara formal mereka mengaku beragama Islam, tetapi biasanya mereka lebih mengikuti aturan-aturan ritual lokalitas ketimbang ortodoksi Islam. Karakteristik ini paralel dengan apa yang disebut Clifford Geertz sebagai Islam Abangan untuk konteks Jawa. Dalam hubungan politik dan agama, secara *given* mereka mengikuti cara berpikir sekuler dan enggan membawa masalah agama ke ranah negara dan sebaliknya.

Kedua, kelompok tradisional Nahdlatul Ulama (NU). NU adalah penganut aliran Sunni terbesar di Indonesia yang dianggap memiliki ekspresinya sendiri, karena di samping ia memiliki kekhasan yang tidak dimiliki kelompok lain seperti basis yang kuat di pesantren dan di pedesaan, hubungan guru murid yang khas, mereka juga dicirikan oleh akomodasi yang kuat atas ekspresi Islam lokal sejauh tidak bertentangan dengan Islam sebagai keyakinan. Ia tampaknya tidak berusaha untuk memaksakan “Arabisme” ke dalam kehidupan keislaman sehari-hari.

Ketiga, Islam modernis. Mereka terutama berbasis pada Muhammadiyah, organisasi terbesar kedua setelah Nahdlatul Ulama. Ia berbasis pada pelayanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Ia memperkenalkan ide-ide modernisasi dalam pengertian klasik. Ia misalnya,

Studi ini tidak menjelaskan mengapa cara itulah yang berlaku, tetapi membiarkan muslim sebagai warga negara tidak terfasilitasi oleh ajaran agamanya ketika ambil bagian dalam praktek-praktek kenegaraan yang diikutinya. Memang, studi yang lebih menekankan tipologi tersebut di atas dapat membantu dalam memahami fenomena semaraknya pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia era reformasi, namun studi ini tetap saja menyisakan berbagai permasalahan, terutama dalam kaitan dengan cara atau pendekatan dalam memahami dinamika pemikiran dan gerakan Islam.

dalam arus utamanya, menolak ekspresi lokal dan lebih mengukuhkan ekspresi puritanisme yang lebih menonjolkan “ke-Arab-an”.

Keempat, Islamisme atau Islamis. Gerakan yang disebut terakhir ini tidak hanya mengusung Arabisme dan konservatisme, tetapi juga di dalam dirinya terdapat paradigma ideologi Islam Arab. Tidak heran kalau Jihad dan penerapan Syari’ah Islam menjadi karakter utama dari kelompok ini. Kelompok ini juga tidak segan-segan membentuk barisan Islam paramiliter untuk melawan siapa saja yang diidentifikasi sebagai musuh Islam yang mereka definisikan.

Kelima, neo-modernisme Islam. Ia lebih dicirikan dengan gerakan intelektual dan kritiknya terhadap doktrin Islam yang mapan. Ia berasal dari berbagai kelompok, termasuk kalangan tradisional maupun dari kalangan modernis. Mereka biasanya tergabung dalam berbagai NGO dan institusi-institusi riset, perguruan tinggi Islam dan pemimpin Islam tradisional tertentu. Mereka juga melakukan pencarian tafsir baru terhadap berbagai doktrin Islam berlandaskan pada realitas masyarakat dan penggunaan filsafat dan metode-metode baru seperti hermeneutika, baca juga Ahmad Suaedy, *Perspektif Pesantren: Islam Indonesia Gerakan Sosial Baru Demokratisasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), hlm. 98-99.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana pemikiran Islam diartikulasikan dan diimplementasikan umat Islam Indonesia dalam merespons perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan benang merah yang dapat mempertemukan berbagai pemikiran Islam dalam merespon perubahan relasi rakyat-negara di Indonesia era reformasi.
2. Menganalisis kontribusi pemikiran dan peran Islam dalam mengarahkan perubahan kehidupan negara di Indonesia era reformasi.
3. Mereformulasikan kerangka pemikiran kreatif untuk menghadirkan wajah pemikiran fiqh kenegaraan Islam dalam konteks ke-Indonesiaan kontemporer.

D. Manfaat

1. Memperkaya referensi bagi para peneliti Islam dan negara di Indonesia terkait dengan relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi.

2. Dijadikan rujukan untuk pengembangan studi keislaman, khususnya fiqh kenegaraan tentang relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi.

E. Telaah Pustaka

Studi tentang pemikiran Islam di Indonesia secara umum sudah banyak dilakukan. Pembacaan terhadap pemikiran Islam di Indonesia, sebagaimana telah disinggung di atas, bukan hanya menghasilkan beragam tipe melainkan juga berbagai tipologi. Berikut ini tipologi yang telah biasa dipakai dalam kajian studi keagamaan maupun studi politik-pemerintahan.

1. Pemikiran dalam khasanah keagamaan

Tekanan pada tipologi dapat ditemukan, misalnya tipologi “normativitas dan historisitas” yang dikemukakan oleh Amin Abdullah. Tipologi ini digunakan dalam menceritakan kecenderungan umat Islam dalam memperlakukan Islam.¹⁴ Tipologi sejenis mengemuka dalam karya Azyumardi Azra’ ketika mengagas adanya “Islam substantif dan Islam formalis”.¹⁵ Setelah mengajukan telaah ini mengemuka wacana

¹⁴Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

¹⁵Azyumardi Azra, *Islam Substantif* (Bandung: Mizan, 2000).

pembedaan wacana, khususnya pewacanaan “Islam secara Inklusif” vs “Islam eksklusif”.¹⁶ Tradisi penelaahan ini dilanjutkan oleh Budhy Munawar-Rahman ketika menggagas “Islam pluralis”.¹⁷

Kategorisasi tersebut memang, lumayan bisa menggantikan kategorisasi lama “Islam modern” vs “Islam tradisional” yang biasa dipakai, termasuk oleh Burhanuddin Daya.¹⁸ Pemilahan ini, sebagaimana ditunjukkan oleh Munir Mul Khan dalam berbagai kajiannya, tidak lagi akurat. Ketika menulis “Islam murni” berdasarkan kasus Wulhan Jember, Mul Khan memetakan orientasi pemikirannya ke dalam tiga kategori: ”al-Ikhlās” (kelompok Kiai Dahlan), “Munu” (Muhammadiyah-NU), dan “Marmud” (Marhaen-Muhammadiyah). Kategorisasi Munir Mul Khan tentu saja didasarkan pada perbedaan-perbedaan mereka pada cara pandangya terhadap Muhammadiyah.¹⁹

Sebetulnya studi yang secara khusus didedikasikan untuk mencermati respons terhadap perkembangan zaman atau

¹⁶Sukidi, *Teologi Inklusif Cak Nur* (Jakarta: Gramedia, 2000).

¹⁷Budhy Munawar Rahman, *Islam Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2000).

¹⁸Burhanuddin Daya, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996).

¹⁹Munir Mul Khan, *Islam Murni dalam Masyarakat Petani* (Yogyakarta: Bentang dan Adikarya IKAPI-Ford Foundation, 2000).

konteks, juga telah cukup banyak dilakukan. Studi tentang respons pemikiran dan gerakan Islam terhadap perubahan kehidupan politik dan negara di Indonesia baik era orde lama, era orde baru maupun pasca orde baru (era reformasi) ini tentu dapat membantu dalam memahami dinamika pemikiran Islam di Indonesia, terutama di era reformasi, namun sebagian besar penelitian tentang Islam politik atau Islam dan negara di Indonesia tersebut pada dasarnya berhenti pada tataran tipologis. Dengan adanya tipologi ini memang dapat membantu dalam menjelaskan perbedaan-perbedaan (varian-varian) pandangan dan sikap kaum muslim Indonesia dalam menghadapi perubahan politik. Menarik untuk dicatat, dalam hal ini, bahwa sebagian besar studi ini meneruskan atau terinspirasi oleh tipologi Clifford Geertz dalam *The Religion of Java*, yang telah meletakkan tipologi segi tiga: “santri”, “priyayi”, dan “abangan”. Dengan tipologi ini dapat digambarkan struktur sosial kultural keagamaan (Islam), di samping juga konfigurasi politik dan ekonomi.²⁰ Maksud yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah masyarakatnya, bukan pemikirannya.

²⁰Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Phoenix edition) (Chicago: University of Chicago Press, 1976), 125.

2. Pemikiran dalam khasanah politik-pemerintahan

Karya monumental dalam kajian politik-pemerintahan disajikan oleh Deliar Noer. Dalam karyanya *Gerakan Modern Islam di Indonesia* membuat dan membagi sikap-sikap muslim Indonesia terhadap perubahan sosio-politik menjadi tipologi “modernis dan tradisional”.²¹ Modernis adalah muslim yang berpandangan bahwa modernitas dapat diterima sebagai instrumen baru bagi kemajuan Islam. Tradisionalis adalah muslim yang percaya bahwa nilai-nilai tradisional masih cocok dengan kehidupan kontemporer.

Catatan penting dari kajian Deliar Noer adalah bahwa, baik modernis maupun tradisionalis percaya akan nilai-nilai utama dalam doktrin politik Islam, misalnya, negara harus punya dasar religius, penerapan syari’at Islam, dan komitmen terhadap intisari prinsip-prinsip Islam. Jadi, dalam politik, baik modernis maupun tradisionalis mendirikan satu partai Islam tunggal Masyumi. Hanya saja, karena perbedaan sudut pandang dan kepentingan politik pragmatis, partai itu pecah pada 1952.

²¹Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1996). Mahrus Irsyam, “Islam di Indonesia: Pengembangan Organisasi dan Gerakan Pemikiran” *Prisma* No. 4, Tahun XIX (1990), 31-48.

Meskipun demikian, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa respons terhadap perpolitikan nasional sama-sama didasari pada pemahaman akan doktrin keagamaan yang ada. Memang, kaum tradisional mendirikan partai mereka sendiri, Partai Nahdlatul Ulama. Di sini terlihat bahwa NU tidak hanya memberi respons pada tataran pemikiran, melainkan juga dalam langkah politis. Deliar Noer mendetailkan respons politik yang mengemuka ke dalam klasifikasi yang lebih rinci ketika dihadapkan pada isu politik utama di era pasca kemerdekaan, yakni nasionalisme. Sikap politik muslim Indonesia dibedakan dalam kategori ‘nasionalis netral-agama’ dan ‘nasionalis muslim’.

Dalam menghadapi isu-isu seperti nasionalisme, negara, dan pemerintah, kaum nasionalis netral agama menolak dasar Islam yang didukung oleh kaum nasionalis muslim. Cara memetakan pemikiran ini diikuti oleh Endang Saifuddin Anshary ketika menulis, *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekular tentang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945-1959*. Dia membagi sikap umat Islam terhadap isu-isu politik dan kenegaraan tersebut menjadi tipologi “nasionalis Islami” dan

“nasionalis sekular”.²² Tipologi nasionalis Islami dan nasionalis sekular ini sampai sekarang masih banyak digunakan oleh para peneliti Islam dan masalah kenegaraan di Indonesia.

Tipologi lain digunakan oleh Allan Samson²³ sehubungan dengan sikap politik santri terhadap politik Indonesia pada umumnya, Allan Samson membuat tiga tipologi, yaitu “fundamentalis”, kelompok muslim yang ingin menerapkan doktrin Islam secara ketat dalam lingkup baik pribadi maupun publik. Mereka seringkali menolak kerjasama dengan kelompok-kelompok sekular. Contoh dari kelompok ini adalah Isa Anshary dan E.Z. Muttaqien dari Masyumi. “Akomodasionis”, adalah kelompok yang berpandangan bahwa politik harus terlepas dari pengawasan agama yang kaku dan ketat, dan umat Islam harus mengakui adanya kepentingan-kepentingan yang sah dari kelompok-kelompok sekular, dan

²²Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekular tentang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945-1959* (Bandung: Pustaka Perpustakaan Salman ITB, 1981).

²³Allan Samson, “Islam and Politics in Indonesia” (Disertasi Ph.D., University of California, 1972); lihat juga artikelnya, khususnya “Religious Belief and Political Action in Indonesian Islamic Modernism”, dalam *Political Participation in Modern Indonesia*, disunting oleh R. William Liddle dan Donald K. Emmerson (New Haven, CT: Yale University Southeast Asia Studies, 1973); dan “Islam in Indonesian Politics”, *Asian Survey* 8, no. 12 (Desember 1968), 1001-1017.

bersedia bekerjasama dengan mereka. Kemudian kategori “reformis”, merupakan kelompok muslim mengupayakan jalan tengah antara kedua kelompok itu, dan bersedia bekerjasama secara kritis dengan kelompok sekular.

Selanjutnya Muhammad Kamal Hassan, dalam *Muslim Intellectual Responses to “New Order” Modernization in Indonesia* membuat klasifikasi sikap dan pemikiran Islam menjadi “akomodasionis”, “reformis” dan idealis.²⁴ Tipologi yang dilakukan oleh Muhammad Kamal Hassan ini di samping melanjutkan penggunaan tipologi yang dibuat oleh Allan Samson “akomodasionis”, “reformis” di atas, juga memodifikasi tipologi fundamentalis Allan Samson menjadi tipologi idealis.

Perkembangan selanjutnya studi tentang pemetaan pemikiran Islam dalam merespons persoalan politik dan negara di era Orde Baru dilakukan oleh Fachry Ali dan Bahtiar Effendy dalam *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*. Kedua peneliti ini mengkritik berbagai tipologi pemikiran Islam di Indonesia sebagaimana

²⁴Mohammad Kamal Hassan, *Muslim Intellectual Responses to “New Order” Modernization in Indonesia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1980).

tersebut dalam karya-karya di atas, terutama kategori modernis-tradisionalis karena sikap muslim terhadap dinamika dan perubahan Indonesia masa Orde Baru sangat kompleks dan oleh karena itu tidak dapat lagi dilihat dari perspektif dikotomis.²⁵

Fachry Ali dan Bahtiar Effendy mengklasifikasikan sikap dan pemikiran Islam tersebut menjadi empat tipologi. *Pertama*, “neomodernis”, yakni, kelompok muslim yang ingin mencampur tradisi dan modernitas. Bagi kelompok ini, modernitas bukanlah sesuatu yang harus ditolak, bukan juga sebagai pengenyampingan nilai-nilai tradisional. Neomodernis adalah intelektual yang ingin mempertahankan yang baik dari yang lama, dan mengambil yang terbaik dari yang baru. *Kedua*, “sosial demokrat”, yakni, kelompok muslim yang memandang Islam sebagai inspirasi bagi keadilan sosial dan ekonomi. *Ketiga*, “internasionalis atau universalis Islam”, umat Islam yang percaya Islam sebagai agama universal, dan karena itu, Islam harus menjadi referensi dalam setiap aspek kehidupan manusia. *Keempat*, “modernis”, yang serupa dengan modernis

²⁵Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1986).

Islam menurut tipologi lama. Model pengelompokan ini juga sudah tentu tidak memuaskan semua pihak, apalagi bertitik-tolak dari realitas perubahan dan perkembangan kehidupan kenegaraan di Indonesia.

Greg Barton, dalam *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*,²⁶ membuat tipologi pemikiran Islam empat tokoh Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Ahamd Wahib, dan Djohan Effendy sebagai “pemikiran liberal”. Di samping empat tokoh ini dikatakan liberal juga neo-modernis. Tipologi pemikiran Islam liberal dan neo-modernis ini didasarkan pada sejarah sosial, basis sosial dan kecenderungan pemikiran Islam yang dikembangkan oleh empat tokoh ini.

Dalam buku *Pemikiran dan Peradaban Islam*²⁷ diuraikan berbagai tipologi pemikiran Islam pasca Orde Baru di Indonesia, yaitu tipologi “Islam eksklusif” yaitu pemikiran dan sikap baik seorang pemikir muslim maupun organisasi Islam yang berpendirian bahwa Islam harus diterapkan secara formal dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aspek

²⁶Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, Pustaka Antara, Adikarya IKAPI dan Ford Foundation, 1999).

²⁷Tim Penulis, *Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Safiria Insania Press bekerjasama dengan Pusat Studi Islam UII, 2007).

kehidupan rakyat dan negara. Tipologi “inklusif pluralis” merupakan baik pemikiran individu maupun organisasi komunitas muslim yang sangat menghargai realitas kemajemukan, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan dapat bekerjasama secara aktif dengan berbagai kelompok baik seiman maupun tidak. Tipologi “Islam humanis” adalah pemikiran individu atau komunitas masyarakat muslim yang berpandangan bahwa Islam merupakan agama yang sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan baik dalam kehidupan sosial masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Perumusan berbagai tipologi ini semata mata didasarkan pada tema pemikiran, ruang lingkup dan kecenderungan tokoh-tokoh Islam di Indonesia.

Tipologi pemikiran Islam lainnya dilakukan oleh Robert W. Hefner, dalam *Civil Islam*²⁸ membahas bagaimana Islam berinteraksi dengan negara dan bagaimana perilaku muslim dalam menghadapi isu-isu modern seperti demokrasi dan masyarakat sipil. Hefner mengklasifikasi muslim Indonesia ke dalam dua blok politik utama, yaitu “Islam sipil” adalah

²⁸Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton N.J.: Princeton University Press, 2000).

pemikiran Islam yang mendukung gerakan masyarakat sipil di Indonesia dan “Islam rezim” merupakan pemikiran Islam yang mendukung rezim yang sedang berkuasa.

Peter G Riddel membagi menjadi empat tipologi Islam Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru; yaitu “modernis” yaitu pemikiran Islam Muhammadiyah, “tradisionalis” adalah pemikiran Islam NU, “neomodernis” adalah gerakan intelektual dan kritiknya terhadap doktrin Islam yang mapan. Ia berasal dari berbagai kelompok, termasuk kalangan tradisional maupun dari kalangan modernis. Mereka biasanya tergabung dalam berbagai NGO dan institusi-institusi riset, perguruan tinggi Islam dan pemimpin Islam tradisional tertentu. Mereka juga melakukan pencarian tafsir baru terhadap berbagai doktrin Islam berlandaskan pada realitas masyarakat dan penggunaan filsafat dan metode-metode baru seperti hermeneutika, dan “Islamis” yaitu Gerakan yang disebut terakhir ini tidak hanya mengusung Arabisme dan konservatisme, tetapi juga di dalam dirinya terdapat paradigma ideologi Islam Arab. Tidak heran kalau

Jihad dan penerapan Syari'ah Islam menjadi karakter utama dari kelompok ini.²⁹

Di samping itu terdapat pula peneliti yang memposisikan respons Islam terhadap perubahan tersebut menjadi “Islam kultural” pemikiran dan gerakan Islam yang memperjuangkan Islam dengan pendekatan kultural dan “Islam struktural”³⁰ pemikiran dan gerakan Islam yang memperjuangkan Islam dengan pendekatan politik dan negara.

Syarifuddin Jurdi dalam bukunya *Pemikiran Politik Islam di Indonesia Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi* membuat kategori pemikiran dalam merespons perubahan kehidupan politik dan negara di Indonesia era reformasi menjadi “Islam substantif”, “Islam simbolik”, “Islam

²⁹Peter G. Riddel, “The Diverse Voices of Political Islam in Post-Suharto Indonesia”, *Islam and Christian-Muslim Relations*, Vol. 13, No. 1, (2002), 65-83. Uraian tipologi Riddel ini secara umum sepaham dari definisi masing-masing kategori dengan mengabaikan satu kategori dari Woodward, yaitu *indigenized Islam*. Bagi Riddel, masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri dalam menanggapi berbagai isu krusial di tahun-tahun periode pertama pasca Pemilu pertama runtuhnya Orde Baru, yaitu tahun 1999. Isu-isu tersebut antara lain, kembali ke Piagam Jakarta, krisis Maluku, membuka hubungan dagang dengan Israel, negara Indonesia federal, tempat kaum minoritas dalam sistem negara Indonesia, preisdan perempuan, dan partai politik yang baru dibuka kran-nya setelah Orde Baru runtuh, baca juga dan Ahmad Suaedy, *Perspektif*, 98-99.

³⁰Masykuri Abdillah, “Islam Politik dan Islam Struktural”, dalam Hamid Basyaib dan Hamid Abidin (ed.), *Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra-pemilu 1999 sampai Pemilihan Presiden* (Jakarta: Alfabet. 1999), 13-17.

liberal”, “Islam literal”, “Islam konservatif” dan “Islam reformis”.³¹ Tipologi-tipologi ini tidak jauh berbeda dengan deskripsi tipologi pemikiran Islam pada umumnya.

Zuly Qodir dalam *Pembaharuan Pemikiran Islam: Wacana dan Aksi Islam Indonesia*³² mengemukakan tipologi pemikiran Islam dalam merespons perubahan dan keterbukaan sistem kenegaraan di Indonesia era reformasi menjadi “akomodatif-realistik”, “skripturalis-formalistik”, dan “substansialis-Islam etik”. Pembagian pemikiran Islam menjadi tiga tipologi ini didasarkan pada tiga persoalan yang dihadapi umat Islam di Indonesia era reformasi, yaitu problem teologis, problem kultural, dan problem struktural atau negara.

Tipologi pemikiran akomodatif-realistik adalah pemikiran Islam yang mendukung berbagai kebijakan negara. Pemikiran skriptural-formalistik merupakan pemikiran Islam yang menebarkan konfrontasi dengan negara terutama, dalam hal ideologi dan pembuatan kebijakan birokrasinya. Sedangkan pemikiran Islam substansialis-etik adalah pemikiran Islam yang

³¹Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam di Indonesia Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 381.

³²Zuly Qodir, *Pembaharuan Pemikiran Islam: Wacana dan Aksi Islam Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

dalam kehidupan masyarakat dan negara lebih mementingkan aspek visi etis Islam daripada Islam formalistik-literalistik.

Zuly Qodir dalam buku *Sosiologi Politik Islam Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*.³³ Fokus pembahasan buku ini adalah tentang fenomena pemikiran Islam dari tahun 1999 sampai 2009 dalam konteks sosial politik di Indonesia. Hasil pembahasan buku ini menemukan tipologi “politizing Islam”, “neo-tradisionalism Islam”, “progresif muslim” dan “sufism Islam”.

Studi yang dilakukan oleh Haedar Nashir dalam buku *Gerakan Islam Syari'at Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*.³⁴ Hasil studi yang dilakukan oleh Haidar Nashir ini menemukan tipologi “Islam salaf” sebagai Islam yang melakukan reproduksi ideologi Negara Islam Indonesia. Tipologi Islam salafi ini juga disebut sebagai “Islam militan”, “Islam fundamentalis” atau “Islam radikal”.

Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF membuat tiga tipologi pemikiran Islam yang paling menonjol di Indonesia

³³Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajara, 2012).

³⁴Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Jakarta: PSAP, 2007).

pasca kejatuhan rezim Orde Baru, yaitu gerakan “pro syari’at”, gerakan “Islam moderat”, dan gerakan “Islam dakwah sufistik”. Gerakan pro syari’at adalah gerakan Islam politik yang memperjuangkan penegakan syari’at Islam (secara formal) dalam kehidupan bernegara. Gerakan ini direpresentasikan oleh antara lain Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). Sementara gerakan Islam moderat merupakan gerakan Islam dalam merealisasikan Islam di Indonesia yang memperhatikan dan mempertimbangkan realitas negara Indonesia dalam berbagai sisinya. Gerakan mainstream ini diwakili oleh Muhammadiyah dan NU. Sedangkan gerakan dakwah sufistik adalah gerakan seperti yang dilakukan oleh Arifin Ilham, Aa Gym, dan Ustaz H. Haryono.³⁵

Selanjutnya ada pula peneliti yang mengklasifikasi pemikiran Islam dalam merespons perubahan politik dan pemerintahan pasca Orde Baru menjadi empat tipologi, yaitu tipologi “konvensional” adalah aliran Islam *mainstream* di

³⁵Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, ”Tipologi Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia”, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Islam, Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer* (Jakarta: Paramadina, 2005), 488-490.

Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan Syarikat Islam. Tipologi “radikal atau militan” yaitu pemikiran Islam Indonesia yang memang menolak segala bentuk pemikiran dan praktek keislaman yang dianggap sudah melenceng dari Alquran dan Hadis, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang ekonomi. Termasuk dalam tipologi ini adalah FPI, MMI, HTI. Tipologi “moderat” merupakan pemikiran Islam Indonesia yang dapat menerima pelbagai macam corak pemikiran Islam, dan tidak ada agenda mendirikan negara Islam. Tipologi “liberal” yaitu pemikiran yang bertitik-tolak dari keberanian melakukan kritik atas tradisi keislaman yang sudah ada, termasuk pemikiran dalam bidang politik dan negara yang dipahami secara kontekstual, progresif dan emansipatoris.³⁶

Ada juga studi yang berhasil mengelompokkan respons pemikiran Islam di Indonesia era reformasi berkaitan dengan perubahan relasi rakyat dan negara menjadi tiga tipologi, yaitu “substansialisme” adalah pemahaman Islam yang lebih mementingkan isi atau substansi ketimbang simbol-simbol

³⁶Zuly Qodir, *Islam Liberal Paradigma Baru Wacana dan Aksi Islam Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 29-33; Zuly Qodir, *Syariah Demokratik Pemberlakuan Syariah Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 101-105.

eksplisit Islam dalam kehidupan negara. Tipologi “legalisme/formalisme” pemahaman Islam yang lebih menekankan pada sifat eksklusif dalam bidang politik dan kehidupan negara yang dapat berujung pada sikap fundamentalistik. Tipologi “spiritualisme” suatu pemahaman Islam yang lebih menekankan pada pengembangan sikap batiniah yang dapat dilakukan dalam kehidupan masyarakat dan negara.³⁷

Lebih lanjut ditemukan pula penelitian yang mengklasifikasikan pemikiran Islam dalam merespons perubahan kehidupan negara dan politik di Indonesia era reformasi, khususnya perubahan relasi rakyat dan negara menjadi dua tipologi, yaitu tipologi “Islam garis keras” baik individu maupun organisasi Islam yang menghendaki Islam, terutama syari’at Islam diterapkan secara formal dalam seluruh aspek kehidupan baik individu, masyarakat maupun negara. Tipologi “Islam moderat” adalah individu dan ormas yang bervisi dapat menerima pandangan keislaman yang berbeda-

³⁷Bahrul Hayat, *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama* (Jakarta: Saadah Cipta Mandiri, 2010), 159-160.

beda dan dapat menerima sistem kehidupan negara yang sudah ada tanpa harus dilabeli dengan Islam secara formal.³⁸

Seperti diuraikan oleh William E. Shepard, bahwa penyusunan tipologi, oleh para peneliti merupakan upaya memahami fenomena baik berkaitan dengan agama, ekonomi, atau politik. Akan tetapi tipologi-tipologi tersebut seringkali menjadi begitu rumit sehingga tidak dapat diterima dengan mudah, walaupun tipologi juga kadang-kadang tidak dapat dihindari.³⁹

Bertitik-tolak dari berbagai varian, kategori atau tipologi pemikiran Islam yang merupakan hasil atau temuan studi-studi sebagaimana dikemukakan di atas jelas menunjukkan bahwa studi tentang respons pemikiran Islam terhadap perubahan sosio-politik di Indonesia, telah menghasilkan tipologi-tipologi pemikiran Islam yang begitu beragam. Sudah tentu berbagai tipologi tersebut dalam konteks tertentu dapat membantu dalam memahami dinamika pemikiran Islam dalam merespons perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi.

³⁸Abdurrahman Wahid (editor), *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, Gerakan Bhinneka Tunggal Ika dan Maarif Institute, 2009), 45-46.

³⁹William E. Shepard, "Islam and Ideology: Towards a Typology", *International Journal of Middle East Studies* 19, No. 3 (Agustus, 1987), 307.

Berbagai tipologi yang merupakan hasil berbagai studi tersebut di atas memunculkan sejumlah persoalan, yaitu di samping antara satu peneliti dengan peneliti lainnya dalam memetakan tipologi-tipologi pemikiran tersebut terjadi tumpang tindih, juga berbagai tipologi tersebut yang merupakan upaya memahami pemikiran Islam terkait dengan perubahan negara dan masyarakat di era reformasi memiliki keterbatasan dan kelemahan dalam menjelaskan fakta pemikiran Islam yang sebenarnya. Oleh karena itu, studi pemikiran Islam dengan semata-mata mendasarkan pada tipologi-tipologi tersebut sulit dipertahankan dan dipergunakan sebagai upaya untuk menjelaskan dinamika pemikiran Islam terkait dengan perubahan relasi rakyat dan negara secara komprehensif.

Pembacaan sikap dan respons pemikiran Islam terkait dengan perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi dengan mempergunakan berbagai tipologi tersebut di atas hanya dapat menjelaskan apa yang tampak semata (kecenderungan) dari gagasan atau hasil gagasan, dan tidak dapat mengungkap kepentingan dan kondisi-kondisi sosial baik bersifat internal maupun eksternal umat Islam yang mempengaruhi dan menghasilkan sebuah pemikiran Islam.

Dengan begitu, studi pemikiran Islam terkait dengan perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi dengan hanya mendasarkan pada tipologi-tipologi tersebut tidak dapat mengungkap ada apa di balik gagasan, atau tidak dapat melacak faktor-faktor yang membentuk sebuah pemikiran Islam.

Selanjutnya berbagai tipologi yang dibuat para peneliti tersebut di atas terlalu terfokus pada aspek mikro dari sebuah pemikiran Islam, yaitu berkonsentrasi yang lebih menekankan aspek internal-kultural-teologis dan politis umat Islam di Indonesia. Dengan demikian, studi pemikiran Islam tersebut tidak dapat menjelaskan kompleksitas dan realitas permasalahan yang sebenarnya yang dihadapi oleh para pemikir Islam baik tokoh maupun ormas Islam Indonesia di era reformasi sebagai sebuah konteks baru yang mereka hadapi. Sedangkan di sisi lain tidak dapat pula dipungkiri bahwa studi-studi pemikiran Islam di atas dengan mempergunakan model tipologi-tipologi di atas kurang mengakomodasi dan bahkan mengabaikan eksistensi masyarakat muslim dalam suatu negara heterogin dan plural seperti Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari interaksi kelompok masyarakat muslim tersebut dengan dunia luar sebagai konteks makro dari pemikiran Islam. Konteks makro merupakan dunia luar terkait dengan kondisi yang datang dari

luar komunitas dan mempengaruhi persepsi dan sikap komunitas muslim tersebut dalam sikap dan tindakannya. Beberapa faktor eksogen (eksternal/luar) yang mempengaruhi tumbuhnya pemikiran dan gerakan Islam tersebut antara lain adalah isu global, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial politik baik dalam level lokal, nasional maupun global.

Dalam kaitan ini sudah tentu arus globalisasi yang melanda semua negara, termasuk Indonesia, dalam berbagai bidang telah mengakibatkan terjadinya perubahan sangat cepat pada kehidupan manusia. Globalisasi yang lahir sebagai proses dari peradaban manusia yang diharapkan semakin membawa manusia kepada kehidupan yang lebih baik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan demokrasi, justru telah menciptakan berbagai masalah bagi bangsa dan kelompok masyarakat tertentu.

Tajamnya persaingan antara kelompok negara dan masyarakat yang kuat dengan kelompok negara dan masyarakat yang lemah dari berbagai segi telah melahirkan hegemoni global yang mengakibatkan lahirnya perasaan tidak adil dari negara dan masyarakat yang lemah. Persaingan ini telah mendorong pihak yang lemah untuk mempertahankan diri. Namun dengan hegemoni politik dan ekonomi global yang semakin keras dan

upaya untuk memperoleh keadilan bagi kelompok yang lemah semakin sulit dan jauh dari kenyataan.

Ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial politik antar kelompok masyarakat beragama juga merupakan faktor yang mempengaruhi pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial politik baik yang terjadi secara horizontal maupun vertikal antara kelompok masyarakat beragama dapat menjadi penyebab dan faktor penting yang mempengaruhi dinamika pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia.

Berpangkal tolak dari penjelasan di atas dan untuk mengembangkan studi pemikiran Islam dalam konteks perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi, studi yang dilakukan ini, di samping mempertimbangkan cara pandang internal-kultural-teologis dan politis sebagaimana tersebut di atas, perlu pula dipergunakan cara pandang *historical sociology approach* dan *political economy approach*.

Untuk memahami dinamika dan respons pemikiran Islam terhadap perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi di samping mempergunakan cara pandang mikro di atas perlu pula dikaitkan dengan lingkungan sosial dan penyebabnya sebagai konteks makro. Dengan demikian, studi

pemikiran Islam di Indonesia pasca Orde Baru, terutama studi respons pemikiran Islam terhadap perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi di samping didasarkan pada pemahaman para pemikir baik tokoh maupun ormas Islam, perlu pula dipertautkan dengan konteks mikro (kompleksitas persoalan dalam lingkungan sosial dan internal) yang dihadapi oleh para tokoh dan ormas Islam maupun konteks makro (globalisasi atau liberalisasi ekonomi global).

Berbagai pembacaan terhadap pemikiran Islam di Indonesia, khususnya penggunaan tipologi sebagaimana tersebut di atas secara dominan menggunakan dua pendekatan, yaitu, pertama, *cultural approach*. Pendekatan ini menekankan pada tradisi yang melekat dalam diri Islam Indonesia. Dalam prosesnya, pendekatan ini melihat dan lebih menekankan pada bagaimana interpretasi individu atau tafsir organisasi masyarakat Islam terhadap ayat-ayat suci dan dampaknya dalam mempengaruhi perilaku politik. Bahkan dapat dikatakan, pendekatan ini paling dominan dipakai dalam mempelajari Islam di Indonesia.⁴⁰ Kedua, *security approach*. Pendekatan ini

⁴⁰Vedi R. Hadiz, "Ketidakadilan Sosial, Akar Radikalisme", dalam *Komunitas* Vol.III No.8-(Agustus 2011), 4-5.

banyak dilakukan oleh para peneliti yang kurang penguasaannya terhadap ajaran Islam⁴¹.

Pemahaman terhadap pemikiran Islam dengan mempergunakan dua pendekatan di atas, menyebabkan munculnya indikator yang tidak jelas mengenai pemikiran Islam. Dalam kaitan ini dapat dikemukakan bahwa baik pendekatan pertama maupun pendekatan kedua telah melahirkan perspektif *good and bad moslem*, atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Islam moderat dan Islam radikal.⁴² Implikasi dari kedua pendekatan ini adalah telah terjadi simplifikasi dan reduksi permasalahan pemikiran Islam, pada hal permasalahannya begitu kompleks.⁴³ Oleh karena itu, untuk memahami dinamika pemikiran Islam pasca runtuhnya Orde Baru tersebut, perlu diletakkan dalam konteks kompleksitas permasalahan yang dihadapinya, baik dalam konteks lokal, nasional maupun dalam konteks global.

Berpangkal tolak dari penjelasan di atas, studi tentang pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia pasca runtuhnya pemerintahan Orde Baru, tidak dapat dilepaskan dari kekuatan-

⁴¹John Obert Voll, *Islam: Continuity and Change in the Modern World* (Boulder Colorado: Westview Press, 1982), 2-4.

⁴²Hadiz, "Ketidakadilan", 4-5.

⁴³Abdullah bin Syaikh Mahfuz bin Bayah, *al-Irhab at-Tasykhis wa al-Hulul* (Riyad: Maktabah al-Ibyikan, 2007), 39-42.

kekuatan politik yang sedang berlangsung sekarang ini dan momentum-momentum yang sedang berlangsung, baik dalam skala lokal, nasional maupun isu-isu global tersebut. Pemikiran Islam Indonesia era reformasi berada di tengah momentum-momentum ini, termasuk tentang upaya untuk mencari pemikiran alternatif tentang relasi negara dan rakyat. Atas dasar itu urgen dilakukan studi terhadap pemikiran Islam dan perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia di era reformasi.

Bertitik tolak dari berbagai telaah pustaka tersebut di atas dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Studi-studi di atas menunjukkan bahwa studi pemikiran Islam yang dilakukan oleh para peneliti dalam bidang sosial politik, negara dan pemerintahan di Indonesia cenderung mengabaikan peran dan pengaruh Islam sebagai agama yang diyakini umat Islam. Sedangkan di sisi lain studi pemikiran Islam dalam bidang sosial keagamaan cenderung memosisikan pemikiran Islam terisolasi dari dinamika dan konteks sosial politik baik dalam level lokal, nasional maupun isu-isu politik global.
2. Berbagai studi pemikiran Islam tersebut baik dalam menggambarkan dinamika pemikiran keagamaan maupun

dalam merespons perubahan politik di Indonesia yang paling menonjol adalah adanya pembuatan tipologi. Pengkategorian-pengkategorian pemikiran Islam ini sudah tentu didasarkan pada cara pembacaan terhadap kecenderungan dan orientasi pemikiran Islam yang diteliti dalam penggal waktu tertentu. Akan tetapi studi seperti ini sekalipun dapat membantu memahami dan memetakan dinamika pemikiran Islam tetapi seringkali terlepas dari konteksnya.

1. Studi-studi tersebut di atas berdampak pada tidak dapat menggambarkan dinamika pemikiran Islam di Indonesia secara komprehensif dan holistik terutama dalam memotret dinamika pemikiran Islam dan kompleksitas di Indonesia di era reformasi.

Studi ini mengambil posisi bahwa studi pemikiran Islam di Indonesia dengan fokus perubahan pola relasi rakyat dan negara era reformasi bertitik-tolak dari kerangka berpikir bahwa dinamika pemikiran Islam tidak dapat dilepaskan dari apa produk pemikiran yang dihasilkan para pemikir Islam baik tokoh maupun organisasi masyarakat Islam, bagaimana cara para pemikir Islam dalam memahami Islam dan konteks dan kompleksitas persoalan apa yang dihadapi oleh umat Islam.

F. Kerangka Teori

1. Memetakan Respons Kontekstual dalam Aktualisasi Ajaran Islam

Upaya menemukan spesifikasi respons Islam terhadap perubahan hubungan rakyat dan negara pada tataran pemikiran dalam studi ini, harus diakui, tidak mudah. Ajaran agama, diaktualisasikan menjadi praktek-praktek yang reguler setelah terkodifikasi melalui kerangka penafsiran atau pemaknaan tertentu. Respons tersebut diartikulasikan secara khas sesuai dengan kerangka penafsiran yang diadopsi. Sungguhpun demikian, aktualisasi ajaran Islam lebih mudah ditemukenali bentuknya dalam tindakan, namun tidak mudah ditemukenali dalam bentuk pemikiran. Oleh karena itu, dalam kajian ini diasumsikan bahwa respons umat Islam terhadap perubahan pola relasi negara-rakyat terpola secara berbeda, sesuai dengan kerangka kodifikasi ataupun pemaknaan ajaran Islam.

Untuk mendalami hal itu, kajian ini perlu alat bantu dalam melacak tapak pemikiran yang bergulir, sangatlah diperlukan. Alat bantu yang dipakai disini adalah *three dimensional analysis* sebagaimana dipakai oleh Kuntowijoyo dan juga Abdul Majid Umar an-Najjar dalam memahami realitas keagamaan, bahwa

realitas keagamaan ini senantiasa melibatkan internalisasi (*fiqh al-fahmi* dan *fahm al-waqi'*), obyektifikasi (*fiqh al-siyagat*), dan eksternalisasi (*fiqh al-tanzil*). Respons umat Islam, baik yang diartikulasikan oleh para tokoh maupun organisasi-organisasi di dalamnya, terjadi dalam interaksi antara ketiga dimensi tersebut.⁴⁴

Dalam rangka memetakan kekhasan respons, studi ini *pertama*, melakukan pemetaan kerangka pemikiran Islam dan variasi cara mengartikulasikan ajaran. *Kedua*, mendalami perubahan kontekstual yang berlangsung, yakni perubahan pola relasi negara-rakyat. *Ketiga*, mengidentifikasi respons-respons yang dilakukan dengan menemuknenali artikulasi dan manifestasi respons terhadap konteks kehidupan umat Islam.

2. Pemetaan Bingkai Pemikiran Islam

Berdasarkan premis di atas, dapat diketahui bahwa maraknya suatu corak pemikiran tidaklah berdiri terpisah dari

⁴⁴Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid* (Bandung: Mizan, 2001), 139-140 dan 337. Kuntowijoyo, *Identitas*, 82-83 dan 90. Abdul Majid Umar an-Najjar, *Fiqh at-Tadayyun Fahman wa Tanzilan* (Tunisia: Az-Zaitunah, 1995). Konsep internalisasi dalam buku Abdul Majid ini dijelaskan sebagai *fiqh al-fahmi* dan *fahm al-waqi'*, sedangkan konsep obyektifikasi dikemukakan sebagai *fiqh as-siyagah*, dan eksternalisasi diungkapkan sebagai *fiqh al-tanzil*.

pergulatan ideologis dan teologis yang bergulir. Dalam kaitan ini peneliti mengasumsikan bahwa, doktrin-doktrin kitab suci atau ajaran agama diinterpretasikan dengan cara tertentu. Yang penting untuk dicamkan di sini adalah, interpretasi ini adalah sebetuk proses internalisasi realita, dan betapapun berbeda interpretasi satu orang dengan orang lain, interpretasi didasari ajaran agama. Implikasinya, tidak ada skema interpretasi tunggal. Karena ada kerangka interpretasi yang berbeda-beda dari berbagai komunitas Islam di Indonesia, maka respons yang berlangsung juga berbeda-beda. Yang jelas, interpretasi yang setara dapat menyediakan legitimasi bagi tindakan-tindakan kolektif yang diambil. Di sini, ajaran agama berfungsi sebagai sumber daya pembedaan (*framing resource*) untuk mengelola situasi yang dihadapi; khususnya menjalin relasi negara-rakyat.

Pada saat yang sama perlu juga diingat bahwa, pemikiran itu adalah eksternalisasi dari berbagai hal yang telah terinternalisasikan sebelumnya. Pemikiran-pemikiran itu bisa menguat dan mengedepan karena sebelumnya telah dikonfirmasi melalui obyektivikasi pikiran-pikiran sebelumnya. Agar kompleksitas pemikiran yang hendak dikaji masih dalam batas jangkauan, kajian ini secara khusus memahami menelaah

gagasan sejumlah tokoh dan sejumlah ormas Islam di Indonesia. Di satu sisi diketahui bahwa pemikiran tokoh atau suatu ormas dapat dilihat dari sikap, tanggapan, ucapan, tulisan, dan perilakunya. Di sisi lain dipahami juga bahwa dalam berpikir, pemikir baik tokoh maupun ormas Islam dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal. Telaah terhadap nilai-nilai yang berasal dari pemikir tersebut, seperti agama, keyakinan yang dianutnya, ideologi, disposisi kepribadiannya, menunjukkan subjektivitasnya, di samping juga memahami respons-respons pihak lain terhadap pemikirannya. Sedangkan kondisi eksternal berupa lingkungan domestiknya dan internasional dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, dan lain sebagainya juga ikut memicu pemikiran itu sendiri.⁴⁵

Jelasnya, dalam studi ini pemahaman ajaran Islam didudukan sebagai kombinasi kalau bukan interaksi, antara proses subyektifikasi dan proses obyektifikasi. Hal ini berlangsung dari waktu ke waktu, sepanjang perjalanan sejarah. Oleh karenanya, studi tentang pemikiran Islam berjalan beriringan dengan perjalanan sejarah Islam dan konteks

⁴⁵Voll, *Islam*, 2-4.

kelangsungan pemikiran yang bersangkutan. Bagi kalangan muslim yang serius dengan keislamannya, pola pikir ini tentu saja diwarnai, kalau tidak didasari oleh pemikiran atau pemahamannya tentang Islam, dan hubungan Islam dengan negara. Atas dasar pemahaman itulah mereka ambil bagian dalam menempa ulang relasi negara-rakyat, khususnya dalam mengembangkan pemerintahan demokratis.

Dalam studi ini, pemikiran tentang hubungan rakyat dan negara, diasumsikan sebagai konsekuensi dari pemahaman atau interpretasi khas tentang ajaran Islam. Asumsi ini didasarkan pada pemahaman para tokoh Islam seperti Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid dan pemahaman ormas Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Front Pembela Islam, Majelis Mujahidin Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia akan ajaran Islam sendiri meliputi proses subjektifikasi, yaitu proses pergulatan seseorang atau ormas muslim sampai pada pemikiran yang diyakininya. Di samping itu, berlangsung juga proses objektifikasi, yaitu proses pengumpulan ide-ide yang diyakini dengan praktek sehari-hari dalam lingkungan sekitarnya.⁴⁶

⁴⁶Crane Brinton dalam F. Iswara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Binacipta, 1980). Lihat Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), 82-83 dan 90.

Berbagai ide dan praktek yang dihadapi juga terinternalisasi dalam diri para pemikir Islam, baik individu maupun organisasi terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu, studi ini tidak bermaksud untuk memperlakukan Islam sebagai sesuatu yang *given*. Meskipun tafsirnya berbeda-beda, namun muslim terus menerus terlibat dalam internalisasi. Berangkat dari kelemahan berbagai studi tentang pemetaan pemikiran Islam yang bersifat kategoris atau tipologis yang telah dilakukan oleh para peneliti sebagaimana telah dibahas sebelumnya dalam telaah pustaka, kajian ini meyakini bahwa pemikiran Islam yang berkembang, khususnya pemikiran Islam dalam merespons perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi, tidak dapat dilepaskan dari konteks. Oleh karena itu, pemikiran yang berkembang, apapun isi atau substansinya, harus dikaitkan dengan proses obyektifikasi.

Pikiran yang berkembang adalah yang relevan dengan konteks, dan oleh karenanya pemikiran yang ada harus dipahami secara bersamaan dengan konteksnya. Perubahan relasi antara rakyat–negara yang berlangsung dalam sejarah Indonesia

kontemporer merupakan konteks utama kajian ini. Spesifikasi pemikiran yang berkembang niscaya berkesesuaian dengan problematika yang berkembang, dan oleh karenanya telaah pemikiran dalam studi ini juga dikaitkan dengan obyektifikasi, yang memperlihatkan aktualitas pemikiran yang bergelora. Sedangkan tahap selanjutnya yaitu eksternalisasi adalah implementasi dari nilai-nilai yang telah terinternalisasi ke dalam konteks yang ada.

2. Konteks Perubahan

1. Perubahan Pola Relasi Rakyat dan Negara

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa ajaran Islam diaktualisasikan sambil merespons perubahan konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan ini diwacanakan dalam masyarakat sebagai ‘reformasi’, namun kalau didalami pada dasarnya adalah pemberlakuan skema demokrasi liberal. Dengan kata lain, selain berlangsung internalisasi, obyektifikasi dan subyektifikasi ajaran agama Islam, juga berlangsung proses yang setara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keseluruhan uraian dan pembahasan tentang pola relasi rakyat –

negara dalam disertasi ini didasarkan pada kerangka berpikir sebagai berikut.⁴⁷

Adapun perubahan pola relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi dapat dipahami dalam tabel di bawah ini:

⁴⁷Dalam pembahasan relasi rakyat dan negara dalam disertasi ini perlu dijelaskan dan ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah negara (*state*) dan pemerintah (*government*) mempunyai makna yang sama-sama mengacu kepada pranata atau kelembagaan politik. Oleh karena itu, penggunaan negara di dalam penelitian ini lebih sering digunakan ketimbang istilah pemerintah. Hal ini lebih disebabkan tingkat abstraksi makna negara yang lebih luas. Meskipun demikian, penggunaan istilah negara dalam konteks tertentu sesungguhnya juga merefleksikan istilah pemerintah. Dengan demikian, makna negara sama dengan arti luas pemerintah yang meliputi seluruh organ kekuasaan di dalam negara yaitu *eksekutif*, *legislatif* dan *yudikatif*. Bahkan pemerintah dalam arti luas ini diartikan sebagai pelaksana tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan rakyat adalah sama dengan warga negara merupakan pihak yang mendirikan negara. Pada dasarnya negara merupakan lembaga yang berhadapan atau berelasi erat dengan para warga negara atau rakyat yang mendirikan dan merupakan sumber legitimasi negara. Karena itu negara perlu dikontrol dan batas wewenangnya ditetapkan. Lihat M. Arskal Salim GP. *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos,1999), 1. Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 23. Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 11.

Tabel 1. Pola Relasi Rakyat–Negara Era Orde Baru dan Era Reformasi

No.	Aspek	Era Orde Baru	Era Reformasi
1.	Pola dasar	Berpusat pada negara	Berpusat pada rakyat
2.	Posisi relatif (pola relasi)	Negara kuat, dominan, superior, powerful dan rakyat lemah, marjinal, inferior dan powerless	Rakyat kuat dan negara kuat sehingga terjadi keseimbangan hubungan antara keduanya
3.	Tugas pokok negara	Trilogi pembangunan: pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, pemerataan	Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
4.	Cara mewujudkan tujuan publik	Represif, opresif, hegemonik, autoritarian/totaliter, dominasi/intervensi	Negara harus merespons dan mengakomodir aspirasi yang disuarakan rakyat berdasarkan rule of law, mempertimbangkan ham, dan dengan cara demokrasi
5.	Urgensi partisipasi	Terbatasnya akses-akses bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kehidupan negara	Rakyat dapat dan bebas berpartisipasi melakukan artikulasi, agregasi aspirasi dalam kehidupan bangsa dan negara berdasarkan prinsip rule of game, cara demokratis dan

No.	Aspek	Era Orde Baru	Era Reformasi
			menjunjung tinggi HAM
6.	Jangkauan tugas dan kekuasaan negara	Seperti Gurita yaitu manusia Indonesia seutuhnya yang mencakup ideologi, budaya, agama, ekonomi, politik, birokrasi, hukum, dan militer	Negara harus menunaikan fungsi rasionalnya dan sekaligus menjalankan pertanggungjawaban etisnya dalam segala aspek kehidupan rakyatnya yang didasarkan pada paradigma negara rasional
7.	Rakyat, negara dan pasar global	Negara bertindak fasilitator, regulator dan mediator yang pro pasar global	Negara harus bertindak baik sebagai fasilitator, regulator dan mediator yang membela kepentingan rakyat

Dalam rangka berdemokrasi, rakyat Indonesia seharusnya diposisikan sebagai warga atau rakyat yang sebenarnya. Posisi ini berbeda dengan posisi *kawula* atau *wong cilik*. Posisi sebagai *kawula* menunjukkan bahwa rakyat tidak mempunyai peran dan hak dalam kehidupan negara. Karena itu, negara mendominasi

kehidupan rakyat.⁴⁸ Realitas ini seperti tergambar dalam relasi rakyat dan negara pada masa sebelum kemerdekaan. Sedangkan posisi sebagai *wong cilik* menjelaskan bahwa rakyat mempunyai hak dan peran dalam kehidupan negara walaupun sangat terbatas.

Kedudukan sebagai *wong cilik* ini, dengan demikian, negara mengakui posisi, adanya hak dan peran rakyat dalam kehidupan negara sekalipun masih terbatas. Oleh karena itu, posisi negara tetap lebih dominan.⁴⁹ Realitas ini dapat dipahami dari kenyataan relasi rakyat dan negara di Indonesia, terutama di era Orde Baru. Selanjutnya posisi rakyat sebagai warga. Dalam kaitan ini, negara secara penuh memposisikan rakyat mempunyai hak dan peran dalam pengertian modern terkait dengan relasi rakyat dan negara. Posisi sebagai warga negara ini berimplikasi pada bentuk (pola) relasi rakyat dan negara.⁵⁰ Relasi rakyat dan negara seperti inilah yang disuarakan di Indonesia era reformasi.

Relasi rakyat dan negara yang dicita-citakan di Indonesia era reformasi ialah, *pertama*, kesediaan negara yang

⁴⁸Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 2008), 363.

⁴⁹*Ibid.*, 370.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 375.

dipresentasikan oleh elite politik dan pemerintah untuk memposisikan rakyat bukan sekadar sebagai objek. *Kedua*, meletakkan negara dan elite penguasa sebagai pelayan rakyat.⁵¹ *Ketiga*, rakyat merdeka terhadap setiap bentuk intervensi negara yang menguasai seluruh wacana publik dalam wujud konstitusi dan hegemoni elite penguasa yang cenderung diperlakukan sebagai kelas yang selalu benar di bawah perlindungan negara yang cenderung disakralkan. Kondisi ideal relasi rakyat terhadap negara justru merupakan bentuk kehidupan sosial yang rakyatlah yang menjadi pemeran utama dengan negara dan hukum, serta elite di dalamnya benar-benar berfungsi sebagai pelayan rakyat.⁵² Dalam kaitan inilah dapat dikatakan bahwa jika posisi negara sebagai pelayan rakyat berjalan secara baik berarti akan terwujud pula tujuan bernegara yaitu keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran.

Seperti halnya dikemukakan oleh al-Gazali bahwa dalam menata sistem pemerintahan perlu didasarkan pada ajaran keadilan karena adil adalah hikmah dari Allah SWT. Selain itu, perbuatan adil dari penguasa adalah suatu hal yang didambakan oleh seluruh rakyat. Oleh karena itu, secara moral dan agama,

⁵¹Abdul Munir Mul Khan, *Politik Santri Cara Menang Merebut Hati Rakyat*, (Yogyakarta: IMPULSE dan Kanisius, 2009), 204.

⁵²*Ibid.*, 206.

legitimasi suatu kekuasaan ditentukan oleh perbuatan untuk menciptakan keadilan dari sang pemimpin. Dengan demikian jelas bahwa tanpa tegaknya keadilan, maka secara moral keabsahan kekuasaan itu tidak ada.⁵³ Atas dasar ini, dapat dijelaskan bahwa pemerintah boleh memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengatur rakyatnya selama hal itu dilakukan atas dasar alasan kemaslahatan bagi rakyat.⁵⁴

Berbagai penjelasan di atas mengindikasikan relasi rakyat dan negara dalam posisi masing-masing yang kuat. Negara yang kuat dalam arti mampu menjalankan fungsinya memberikan perlindungan keamanan, menjamin kesejahteraan ekonomi, menciptakan tertib sosial, menjaga integrasi teritorial, rakyat yang kuat yang dapat dimaknai memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap negara yang mengarah ke praktik autoritarian atau *abuse of power* juga dibutuhkan. Dengan begitu, akan tercipta hubungan rakyat dan negara yang senantiasa memiliki sebagaimana dikutip oleh Munafrizal dengan meminjam istilah Anthony Giddens sebagai *dialectic of control* atau bentuk hubungan rakyat dan negara yang disebut

⁵³Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Thusi al-Gazali, *Al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah t.t), 181.

⁵⁴Madaniy, *Politik*, 75.

oleh Alfred Stepan sebagai *positive-sum*, yaitu bentuk hubungan rakyat dan negara yang masing-masing memiliki kapasitas kekuatan seimbang dan tak saling menegasikan.⁵⁵

3. Respons dan Responsivitas Relasi Rakyat dan Negara

Upaya untuk menguak pemikiran tokoh atau ormas keagamaan dilakukan dengan mencermati karya-karyanya dan keputusan resmi organisasinya. Respons terhadap perubahan relasi negara-rakyat ditelaah melalui perkembangan ataupun dinamika pemikiran tokoh dan ormas keagamaan yang bersangkutan. Dengan begitu bisa dipahami korelasi antara ide-ide yang tertuang dalam karya-karya dan keputusan ormas keagamaan tersebut dengan perubahan relasi rakyat dan negara. Memang, ada kompleksitas persoalan yang dihadapinya baik secara internal maupun eksternal baik dalam tingkat lokal, nasional maupun global, di balik kompleksitas itu masih bisa dilacak pergeseran pemikiran yang berlangsung.⁵⁶

Ada tiga tataran pelacakan yang ditekuni kajian ini. Pertama, tokoh. Kajian ini memberikan perhatian yang cukup

⁵⁵Manan, *Pentas*, 261-262.

⁵⁶Ali Syari'ati, *On the Sociology of Islam*, terj. Hamid Algar (Berkeley: Mizan Press, 1979), 39-69.

terhadap pemikiran tokoh dan keputusan resmi ormas Islam tersebut tentang perubahan konsep negara, termasuk relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi. Kedua, dikaji bagaimana respons pemikiran dan gerakan tersebut terhadap ide-ide baru yang muncul di tengah masyarakat. Lebih lanjut yang tidak dapat ditawar-tawar. Ketiga, ditelaah kaitan antara pemikiran tersebut di atas dengan pemahaman ajaran Islam yang melatarinya.⁵⁷ Pernyataan terakhir diperlukan untuk menghindari sikap dan pandangan yang bias terhadap pemikiran dan gerakan Islam.

Perlu ditegaskan pula bahwa, pemikiran yang muncul sangat boleh jadi memiliki keterkaitan dengan tradisi yang melekat dalam diri tokoh/pemikir Islam dan ormas Islam Indonesia. Melalui telaah tradisi semacam ini dapat dilihat dan lebih ditekankan bagaimana interpretasi (pemahaman) individu atau organisasi masyarakat Islam terhadap ajaran Islam dan dampaknya dalam mempengaruhi perilaku politik (*political behavior*). Dengan begitu, pemikiran Islam, termasuk dalam bidang politik, selalu dapat dipertautkan dengan lingkungan

⁵⁷Voll, *Islam*, 2-4.

sosial dan penyebabnya baik secara luas maupun secara sempit.⁵⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian melacak respons pemikiran Islam terhadap perubahan relasi rakyat dan negara sebagai dampak dari perubahan konsep negara yang muncul di era reformasi. Pemikiran Islam ini dapat berupa pemikiran para tokoh muslim di Indonesia baik sebagai pemikir individu maupun pemikiran para tokoh muslim yang merepresentasikan pemikiran lembaga keislaman di Indonesia di era reformasi.

Pemikir Islam Indonesia sebagai individu dalam penelitian ini adalah Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Ditetapkannya kedua tokoh ini dengan pertimbangan pemikiran-pemikirannya sudah terpublikasi luas di Indonesia, pemikiran kedua tokoh ini banyak terkait dan bahkan kedua tokoh ini terlibat dengan persoalan kenegaraan di Indonesia era reformasi

⁵⁸Teori seperti ini disebut dengan teori *challenge and response*. Arnold J. Toynbee, *A Study of History*, vol. I (London: Oxford University Press, 1955), 2, 23, dan 271. John Edward Sullivan, *Prophet of the West: An Introduction to the Philosophy of History* (New York: Holt Rinehart and Winston Inc., t.t), 33.

di Indonesia. Selain itu pemikiran kedua tokoh ini sekalipun berasal dari tradisi Islam tetapi pemikirannya dalam banyak sisi melampaui organisasi Islam yang ada di Indonesia.

Pemikiran Nurcholish Madjid mewakili pemikiran “Islam inklusif pluralis”,⁵⁹ pemikiran Abdurrahman Wahid adalah representasi dari pemikiran “Islam pribumi”.⁶⁰ Sedangkan pemikiran keislaman yang bersifat kelembagaan adalah Muhammadiyah mewakili pemikiran “Islam pembaru-modern”,⁶¹ Nahdlatul Ulama (NU) merepresentasikan pemikiran “Islam tradisional-modern”.⁶² Pemikiran Islam yang diusung

⁵⁹Islam Inklusif-pluralis adalah pemikiran Islam yang didasarkan pada pandangan bahwa agama-agama lain yang ada di dunia ini sebagai mengandung kebenaran dan dapat memberikan manfaat serta keselamatan bagi penganutnya. Alwi Shihab, *Islam Inklusif* (Bandung: Mizan, 1998), 41. Tim Penulis, *Fiqih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina dan The Asia Foundation, 2004), 208, 238-241.

⁶⁰Islam harus diposisikan sebagai faktor komplementer dalam pembentukan struktur sosial, budaya dan politik Indonesia karena karakter komunitas sosial, budaya, dan politik nusantara yang heterogen. Abdurrahman Wahid, “Massa Islam dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa,” *Prisma*, Edisi Extra (1984), 3-9.

⁶¹Islam pembaru-modern, yaitu aliran pemikiran Islam yang menolak bermazhab dan hendak melakukan pembaruan melalui ijtihad langsung pada Alquran dan hadis, dan berhasil memodernkan diri dan terorganisir ke dalam sebuah organisasi modern. Munculnya Islam pembaru-modern merupakan respons terhadap Islam tradisional, baik tradisional-kultural maupun tradisional-modern. Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1996), xi. Aksin Wijaya, *Menusantarakan Islam Menelusuri Jejak Pergumulan Islam yang Tak Kunjung Usai di Nusantara* (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2011), 134 dan 138.

⁶²Islam tradisional-kultural adalah aliran pemikiran Islam yang menganut mazhab tertentu yang belum terorganisir secara formal ke dalam

oleh Muhammadiyah dan NU di Indonesia era kontemporer sekarang sekarang ini lebih populer disebut sebagai “Islam Arus Utama” (Islam Mainstream)”.⁶³ Front Pembela Islam (FPI) mewakili pemikiran “negara Islam Indonesia kaffah”,⁶⁴ Majelis Mujahidin Indonesia MMI merepresentasikan pemikiran “Islam khilafah Nusantara”,⁶⁵ dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mewakili pemikiran “Islam khilafah internasional (transnasional)”.⁶⁶ Tiga ormas Islam ini dalam studi ini dinamakan Islam non-mainstream.⁶⁷

sebuah organisasi modern. Sedangkan Islam tradisional-modern adalah aliran pemikiran tradisional-kultural dan berhasil memodernkan diri ke dalam sebuah organisasi modern. Wijaya, *Menusantarakan*, 134, 138 dan 144-149.

⁶³Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan yang besar peranannya dan memiliki jamaah dengan jumlah besar, serta paling berpengaruh bagi masyarakat muslim di Indonesia hingga saat ini. Pengaruh pemahaman keislaman kedua organisasi keagamaan ini cukup besar baik sebagai norma dan etika dalam aktivitas keagamaan maupun dalam pengaruhnya terhadap kebijakan negara mengenai agama. Bilveer Singh dan Zuly Qodir, *Gerakan Islam Islam Non Mainstream dan Kebangkitan Islam Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 6.

⁶⁴Pemikiran Islam yang berpendirian bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang ini adalah sudah menjadi sebuah negara Islam tetapi belum kaffah karena dalam bidang ketatanegaraannya belum menerapkan Syari’at Islam. Habib Rizieq, *Hancurkan Liberalisme Tegakkan Syariat Islam*, (Jakarta: Suara Islam Press, 2011), 185-186.

⁶⁵Pemikiran Islam yang memperjuangkan formalisasi Syari’at Islam di Indonesia dalam konstitusi negara. Tujuan gerakan ini adalah mendirikan negara Islam Indonesia yang selanjutnya akan mendirikan khilafah nusantara. Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 411.

⁶⁶ Pemikiran Islam yang menggagas formalisasi Syari’at Islam bagi kehidupan umat Islam di seluruh dunia. Tujuan akhir dari pemikiran ini yaitu

Dasar pertimbangan ditetapkannya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam studi ini karena kedua organisasi terbesar ini merupakan ormas Islam mainstream di Indonesia. Kedua ormas ini telah lahir sebelum kemerdekaan Indonesia, mempunyai pengikut yang banyak dan telah memberikan kontribusi dalam membangun arah perkembangan dan masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Sedangkan dasar pijak ditetapkannya Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dalam penelitian ini adalah ketiga ormas Islam Indonesia mewakili berbagai ormas Islam yang lahir di era reformasi. Di samping itu, ketiga ormas non-mainstream ini mempunyai pengikut dan pandangan tentang persoalan-persoalan kenegaraan dan keislaman yang khas di Indonesia dengan menawarkan formalisasi syari'ah sebagai solusinya.

mendirikan negara Islam (*dawlah Islamiyah*) yang berbentuk khilafah internasional. Nashir, *Gerakan*, 421.

⁶⁷Islam non-mainstream berarti bertolak dari suatu pengertian tentang *mainstream* (aliran induk) itu sendiri; karena itu gerakan non-mainstream adalah gerakan yang memisahkan diri Islam arus utama di atas, sudah tentu pandangan keislaman komunitas ini berbeda dengan gagasan Islam arus utama, terutama dalam bidang politik kenegaraan atau pemerintahan. Singh dan Zuly Qodir, *Gerakan*, 6-7.

2. Sumber dan teknik pengumpulan data

Sumber atau bahan referensi untuk pemikir Islam sebagai individu adalah berbagai karya tulis para tokoh tersebut yang berujud buku atau artikel yang sudah dipublikasikan. Sumber atau referensi ini dapat dikelompokkan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah berbagai referensi yang ditulis oleh tokoh yang bersangkutan terkait dengan Islam dan relasi rakyat dan negara di Indonesia yang terbit dalam kurun sejak tahun 1998. Sedangkan sumber kepustakaan sekunder adalah sumber kepustakaan yang membahas pemikiran baik tokoh maupun pemikiran organisasi Islam Indonesia tentang relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi.

Sumber primer yang digunakan untuk memahami pemikiran Nurcholish Madjid adalah referensi yang ditulis oleh tokoh ini langsung, yaitu:

1. Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1995.
2. Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999.
3. Nurcholish Madjid, “Reformasi Menyeluruh dan Masalah Kepemimpinan Nasional Sebuah Catatan”,

makalah yang dibuat untuk kalangan internal setelah lengsernya Presiden Soeharto pada Mei 1998 menjelang Pemilu 1999.

4. Nurcholish Madjid, “Renungan Awal Tahun tentang Reformasi: Bagaimana Peluang Emas Tidak Lewat Sia-Sia”, makalah untuk kalangan internal disampaikan dalam kesempatan dialog yang diselenggarakan oleh Kordinatoriat Wartawan DPR/MPR RI dan Forum Komunikasi Massa, diselenggarakan di Ruang Pustakaloka, Gedung DPR 17 Januari 2001.
5. Nurcholish Madjid, ”Masa Depan Bangsa Pasca Bencana Kuta”, dalam *Jurnal Universitas Paramadina* Vol.2 No. 2, Januari 2003.
6. Nurcholish Madjid, ”Kekuasaan dan Akhlak”. *Suara Merdeka*, Selasa 2 Desember 2003.
7. Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*. Jakarta: Universitas Paramadina. 2004,
8. Nurcholish Madjid, “Membangun Indonesia Masa Depan”, Kata Pengantar dalam Budhy Munawar-Rachman (Editor), *Ensiklopedi Nurcholish Madjid Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, Jakarta: Yayasan

Wakaf Paramadina dan Center for Spirituality and Leadership dan Penderbit Mizan, 2005.

9. *Ensiklopedi Nurcholish Madjid Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, Budhy Munawar Rachman, (Penyunting), Jakarta: Penerbit Mizan bekerja sama dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 2006.
10. Nurcholish Madjid, *Cendekiawan & Religiusitas Masyarakat Kolom-Kolom di Tabloid Tekad*, Jakarta: Paramadina dan PT. Dian Rakyat, 2009.

Sedangkan sumber sekunder yang dijadikan referensi untuk memahami pemikiran Nurcholish Madjid adalah:

1. Mahfud MD, *Zaman Baru Islam Indonesia, Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholish Madjid, Jalaludin Rakhmat*. Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
2. Dedy Djamaludin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*. Jakarta: Rajawali Pers. 1999.

3. Siti Nadroh, *Islam Demokrasi, Pemikiran Nurcholish Madjid*, Jakarta: Katalis dan Penerbit Republika, 2004.
4. Anas Urbaningrum, *Jalan Sufi Nurcholish Madjid*, Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
5. Triyoga A. Kuswanto, *Api Islam Nurcholish Madjid Jalan Hidup Seorang Visioner*. Jakarta: Kompas. 2010.

Sumber primer untuk memahami pemikiran Abdurrahman Wahid adalah sebagai berikut:

1. Mukhlas Syarkun (Penyunting), *Ensiklopedi Abdurrahman Wahid (Gus Dur Seorang Ekonom, Budayawan, Diplomat & Humoris)*, Jakarta: PPPKI, 2013.
2. Abdurrahman Wahid, *Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser*, Yogyakarta: LKiS, 2002.
3. Wawancara Jaringan Islam Liberal dengan Abdurrahman Wahid “Jangan Bikin Aturan Berdasarkan Islam Saja”, diakses 20 Maret 2016.

<http://bonsari.blogspot.co.id/2012/04/wawancara-jil-dengan-gus-dur.html>

4. Benyamin F Intan, “Gus Dur Pejuang Pluralisme Sejati”, diakses 14 Maret 2016. <http://artikel-media.blogspot.co.id/2010/01/gus-dur-pejuang-pluralisme-sejati.html>
5. Video wawancara Gus Dur dengan Andy F. Noya dalam acara “Kick Andy” yang ditayangkan pada tahun 2009.
6. Abdurrahman Wahid, ”Islam dan Kesejahteraan Rakyat”, diakses 12 Maret 2016. <http://santrigusdur.com/2014/05/islam-dan-kesejahteraan-rakyat/>
7. Abdurrahman Wahid, “Massa Islam dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa” *Prisma*, Nomor Ekstra, 1984.
8. Abdurrahman Wahid, “Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia”, *Prisma*, No. 4/April 1984.
9. Abdurrahman Wahid, “Tegakkan Kedaulatan Rakyat“, diakses 13 November 2011. http://www.balinter.net/news_124_Tegakkan_Kedaulatan_Rakyat.html#

10. Abdurrahman Wahid “Merumuskan Hubungan Ideologi Nasional dan Agama”, Aula, Mei 1985.
11. Abdurrahman Wahid, “Beberapa Aspek Teoritis dari Pemikiran Politik dan Negara dalam Islam: Sebuah Tinjauan Penjajagan”, Pidato pada Dies Natalis Universitas Tribakti, Kediri, 25 Oktober 1986.
12. Abdurrahman Wahid, “Generasi Muda Islam dan Masa Depan Bangsa Indonesia”, makalah pada Temu Wicara Nasional FMGI, Jakarta, 27-30 Desember 1986.
13. Abdurrahman Wahid, “Pribumi Islam”, dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun’im Saleh (eds.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*. Jakarta: P3M, 1989.
14. Abdurrahman Wahid, “Religious Beliefs: The Transmission and Development of Doctrine”, *Jakarta Post*, 7 September 1991.
15. Abdurrahman Wahid, “*Democracy, Religion, and Human Right in Shoutheast Asia*”, makalah pada East-West Center, Honolulu, 16 September 1994.
16. Abdurrahman Wahid, “Individu, Negara dan Ideologi”, *Kompas*, 4 Februari 1994.

17. Abdurrahman Wahid, “Islam, Pluralisme, dan Demokratisasi”, dalam Arief Affandi, *Islam, Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996
18. Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, Jakarta: PT Grasindo. 1999.
19. Abdurrahman Wahid, *Membaca Sejarah Nusantara 25 Kolom Sejarah Gus Dur*, Yogyakarta: LKiS, 2010.

Sedangkan sumber sekunder yang dijadikan rujukan dalam memahami pemikiran Gus Dur adalah:

1. Mahfud MD, *Gur Dur Islam, Politik, dan Kebangsaan*. Yogyakarta: LKiS. 2010.
2. Mahfud MD, *Zaman Baru Islam Indonesia, Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholish Madjid, Jalaludin Rakhmat*. Bandung: Zaman Wacana Mulia. 1998.
3. Dedy Djamaludin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, *Pemikiran Islam Liberal di Indonesia Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad*

Wahib, dan Abdurrahman Wahid 1968-1980, terj. Nanang Tahqiq. Jakarta: Kerjasama Paramadina dengan Pustaka Antara, Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation. 1999

4. Greg Barton dan *Ijtihad Politik Gus Dur Analisis Wacana Kritis*. Yogyakarta: LKiS. 2010.

Pemikiran keislaman yang mewakili lembaga atau organisasi masyarakat keislaman pengumpulan datanya melalui sumber data primer seperti dokumen resmi organisasi, dan hasil wawancara dengan masing-masing tokoh organisasi terkait. Sedangkan sumber data sekunder seperti buku, tulisan, artikel, dan dokumen yang terkait dengan lembaga tersebut dan interview (pedoman wawancara terlampir).

Untuk memahami pemikiran Muhammadiyah tentang relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi adalah:

1. *Muhammadiyah Menyongsong Abad XXI*. Yogyakarta: Pustaka Suara Muhammadiyah. 1998 oleh Kerjasama LPPI, LP3M, FAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2. *Muhammadiyah dan Asas Pancasila*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986.
3. Lukman Harun, Redaksi, "Menuntut Kehadiran Negara", Tajuk Rencana *Suara Muhammadiyah* No.o2/Th.Ke-97, 16-31 Januari 2012, Sejarah Muhammadiyah, diakses 16 November 2011.
<http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-50-det-sejarah.html>
4. <http://banjar.muhammadiyah.or.id/artikel-aktualisasi-khittah-muhammadiyah--dan-format-peran-politik-kebangsaan-detail-45.html>, diakses 16 November 2011.
5. <http://www.muhammadiyah.or.id/id/artikel-menata-ulang-posisi-muhammadiyah-sebagai-gerakan-keagamaan-dan-kemasyarakatan-di-tengah-dinamika-kehidupan-bangsa-detail-2.html> , diakses 16 November 2011.
6. "Menata Ulang Posisi Muhammadiyah Sebagai Gerakan Keagamaan dan Kemasyarakatan di Tengah Dinamika Kehidupan Bangsa", makalah disampaikan di forum Seminar dan Lokakarya Pra-Muktamar Muhammadiyah

Satu Abad, Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, 15 Desember 2009.

7. Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
8. Suwarno, *Relasi Muhammadiyah, Islam, dan Negara Kontribusi Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
9. Ahmad Norma Permata, "Muhammadiyah sebagai Pilar Civil Islam di Indonesia", dalam *Suara Muhammadiyah* No.01/Th. Ke-94 1-15 Januari 2009.
10. Haedar Nashir, "Aktualisasi Khittah Muhammadiyah dan Format Peran Politik Kebangsaan", makalah disampaikan dalam Seminar Pra-Muktamar Satu Abad Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta tanggal 14 s/d 15 Desember 2009 di Kampus UMS, Surakarta, 2009.

Untuk memahami pandangan NU tentang relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi adalah:

1. SK Mukhtar XXX NU Nomor: 003/MNU-30/11/1999, *Pesan-pesan Mukatamar NU ke-28 tentang Masalah-masalah Masyarakat, Bangsa, dan Negara*. Jakarta: Pusat dokumentasi dan Informasi NU.
2. *Khitthah Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Lajnah Ta'liwan Nasyar, 1985, NU Mengabdikan Bangsa, diakses 27 Agustus 2011.
http://www.nu.or.id/page/id/dinamic_detil/3/33414/Analisa_Berita/NU_Mengabdikan_Bangsa.html1
3. Andree Feillard, *NU vis-a-vis Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, terj. Lesmana, Yogyakarta: LKiS, 1999.
4. Nur Khalik Ridwan, *NU dan Bangsa 1914-2010 Pergulatan Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.

“Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Dewasa Ini,” dalam *Prisma*, No.4, 1984.

5. Marzuki Wahid dan Abd Moqsith Ghazali, “Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Nahdlatul Ulama”, Makalah Annual Conference on Islamic

Studies ke-10 Kementerian Agama R.I. dan IAIN Antasari di Banjarmasin, 1-4 November 2010.

6. Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan Hasil Mukhtar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu-1926 s/d Kedua Puluh Sembilan 1994. Surabaya: Kerjasama PP RMI dengan Dinamika Press, 1997.

Untuk memahami pandangan FPI tentang relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi referensi yang digunakan adalah:

1. Habib Rizieq, *Hancurkan Liberalisme Tegakkan Syari'at Islam*, Jakarta: Suara Islam Press. 2011.
2. Habib Rizieq, Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menjawab Berbagai Tuduhan terhadap Gerakan Nasional Anti Ma'siat di Indonesia, Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah, 2008.
3. Gugun El-Guyanie, "FPI dan Penodaan Citra Agama", (opini) *Suara Merdeka*, 4/6/2008 dikutip dari <http://www.gusdur.net/Opini/>

[Detail/?id=141/hl=id/FPI Dan Penodaan Citra Agama](#), diakses 21 September 2011

4. Achmad Munjid, ” Hentikan Vigilantisme FPI”, *Koran Tempo*, Jum’at, 06 Juni 2008, diunduh dari http://www.wahidinstitute.org/Opini/Email_page?id=142/hl=id/Hentikan_Vigilantisme_FPI 28 September 2011

Untuk memahami pemikiran MMI tentang relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi referensi yang dipergunakan adalah:

1. *Wasfiah MMI*. Yogyakarta: Markaz Pusat Majelis Mujahid, tt.
2. *Risalah Mujahidin*, edisi 22, Ramadhan 1429/September 2008.
3. *Piagam Yogyakarta*, Pernyataan sikap Majelis Mujahidin ini disampaikan dalam upaya mengurai keruwetan tata kehidupan beragama dan bernegara yang dipertanyakan oleh tokoh lintas agama, sekaligusantisipasi terhadap anasir yang memiliki kepentingan terselubung atas nama lintas agama Yogyakarta, 25 Safar 1432/ 30 Januari 2011.

4. Irfan S. Awwas (ed.), *Risalah Kongres Mujahidin I*, Irfan S. Awwas, dalam CD rekaman diskusi “Formalisasi Syari’ah Islam dalam Konstitusi Negara” antara Ahmad Syafii Maarif dan MMI, 21 September 2001.
5. Rekaman hasil wawancara dengan Irfan S. Awwas pada Konferensi Press pada pembukaan Kongres II MMI. 13 Agustus 2003.
6. http://majelismujahidin.com/2011/03/majelis-mujahidin-protas-sultan-soal-ahmadiyah/?utm_source=BlogGlue_network&utm_medium=BlogGlue_Plugin diakses 21 April 2011,
7. <http://majelismujahidin.com/about/strategi-perjuangan-majelis-mujahidin/> diakses 12 September 2011.
8. <http://www.suara-islam.com/news/berita/nasional/2064-debat-majelis-mujahidin-versus-gai> diakses 3 Nopember 2011.

Untuk memahami pandangan HTI tentang relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi referensi yang dipergunakan adalah:

1. Hizbut Tahrir Indonesia. *Dakwah Islam Tanpa Kekerasan*, Indonesia: HTI, 2003.
2. *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*. Depok: Pustaka Thariqul Izzah, 2003.
- Mengenal Hizbut Tahrir Partai Politik Islam Ideologis*, Depok: Pustaka Thariqul Izzah. 2000.
3. Taqiyuddin an-Nabhani, *Muqaddimat al-Dustur*. Beirut: Dar al-Ummah. 2009.
4. Taqiyuddin an-Nabhani, *Islamic State*, London: al-Khilafah Publications. 1998.
5. Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizam al-Islam*, T.tp: Hizb al-Tahrir. 2001.
6. *Peraturan Hidup Islami*. Bogor: Pustaka Tariqul Izzah. 2001.
7. *Misaq al-Ummah*, T.tp: Hizbut Tahrir, t.t.
8. *The System of Islam*. London: al-Khilafah Publications, 2002.
9. Ismail Yusanto, *Kompas*, 8 Maret 2005, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*. T.tp.: Hizb al-Tahrir. 2002.
10. Abdul Qadim, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, terj. Ahmad S. Jakarta: HTI Press. 2009.

11. Pernyataan HTI Tentang Bentrok Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang Kantor Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Nomor: 193/PU/E/02/11, Jakarta, 07 Februari 2011 M.
12. Pernyataan HTI Tentang Keprihatinan terhadap Kondisi Negara Kantor Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia Nomor: 191/PU/E/01/11 Jakarta, 20 Januari 2011 M, diakses 21 September 2011.
<http://hizbut-tahrir.or.id/2008/10/01/dalil-mendirikan-negara-berdasarkan-syariah-islam/h>
13. Sidik al-Jawi, “Konsep Civil Society dalam Perspektif Islam: Sebuah Tinjauan Ideologis,” makalah ceramah dan dialog di Radio Carolina Surabaya, Ahad, 16 September 2001.
14. Serial Syariah Islam: Mewujudkan “Clean Governance and Good Governmet” diakses 18 Oktober 2011. <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/08/15/serial-syariah-islam-mewujudkan-clean-governance-and-good-governmet/>

Data atau informasi tentang respons pemikiran Islam terhadap perubahan relasi rakyat – negara di Indonesia era

reformasi selain bersumber dari beberapa referensi tersebut di atas, juga didukung hasil wawancara dengan: Ahmad Syafii Maarif (mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah), Dr. K.H. A. Malik Madaniy, M.A. (Katibul Am Syuriah PBNU), Habib Muhammad Rizieq (Ketua Front Pembela Islam), Irfan S. Awwas (Ketua Tanfiziyah Majelis Mujahidin Indonesia), Mohammad Rozi (Pimpinan Hizbut Tahrir Indonesia), dan lain-lain.

3. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif-interpretatif dan verifikatif.⁶⁸ Sifat penelitian atas sumber kepustakaan baik yang berupa buku, hasil penelitian maupun artikel serta hasil interview sebagaimana tersebut di atas tidak hanya menggambarkan apa adanya tetapi juga bersamaan dengan itu diadakan penafsiran dan penjelasan sehingga data atau informasi dapat dipahami secara baik. Setelah data tersajikan secara baik kemudian data tersebut dianalisis secara kritis.

⁶⁸Mulyanto Sumardi, *Penelitian Agama: Masalah dan Pemikiran* (Jakarta: Sinar harapan, 1982), hlm. 27-28.

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam studi ini adalah pendekatan historis. Pendekatan sejarah yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah *challenge and response* Arnold J. Toynbee.⁶⁹ Dengan pendekatan sejarah seperti ini dapat dijelaskan bahwa munculnya pemikiran Islam dalam konteks perubahan tatanan kenegaraan, terutama relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi merupakan jawaban Islam dan umatnya atas tantangan yang mereka hadapi.

Selain pendekatan historis di atas, dalam studi ini juga dipergunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis ini berangkat dari Ilmu Sosial Profetik (ISP) Kuntowijoyo. Prinsip dasar dari pendekatan sosiologis yang berasal dari ISP ini tidak hanya terbatas pada usaha menjelaskan dan memahami realitas persoalan perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi tetapi lebih dari itu dibarengi pula upaya atau usaha untuk merubahnya menuju cita-cita yang diidamkan masyarakat Indonesia yang merupakan aktualisasi nilai-nilai profetik yang

⁶⁹Toynbee, *A Study*, I: 2. 23, dan 271. John Edward Sullivan, *Prophet of the West: An Introduction to the Philosophy of History* (New York: Holt Rinehart and Winston Inc., t.t), 33.

diyakini oleh para pemikir muslim. Ilmu sosial profetik ini bertitik-tolak dari tiga nilai penting sebagai pijakan yang sekaligus menjadi unsur-unsur yang membentuk karakter paradigmatisnya, yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi, yang diderivasikan dari misi historis dan etis Islam.⁷⁰

Obyektifikasi⁷¹ dari Ilmu sosial profetik adalah penerjemahan nilai-nilai subyektif Islam dalam kategori-kategori obyektif yang dapat diterima semua pihak tanpa perlu menyetujui nilai-nilai asal (Islam). Dengan demikian, obyektifikasi merupakan metode untuk menghadirkan Islam secara lebih substantif etis (profetik).⁷²

Dengan melalui humanisasi, liberasi dan transendensi, pendekatan sosiologis yang diinspirasi nilai-nilai profetik hendak menegaskan posisi untuk kepentingan praksis emansipatoris. Oleh karena itu, dapat ditegaskan pendekatan ini, bahwa pengetahuan dituntut realisasinya dalam tataran praksis.

⁷⁰Kandungan Q.S. Ali Imran, ayat 110. Husnul Muttaqin, "Menuju Sosiologi Profetik", *Sosiologi Reflektif*, Prodi Sosiologi Fak. Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Volume 7, Nomor 1, (Oktober 2012), 5.

⁷¹Kuntowijoyo, *Muslim*, 373. Muttaqin, "Menuju", 6.

⁷² Muttaqin, "Menuju", 11- 17.

Cara kerja pendekatan sosiologis yang diinspirasi ISP di atas menandai cara kerja ilmuwan sosial yang tidak hanya berjuang hanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya sendiri, tetapi juga gelisah dan pada gilirannya mencurahkan dedikasinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Muara dari kegiatan pengembangan ilmu yang ditekuni bukan hanya stok pengetahuan yang lebih banyak dan lebih baik, melainkan juga kapasitas mengatasi masalah-masalah sosial. Watak transformatif ilmu sosial profetik bukan ditentukan oleh ketrampilan teknis, melainkan ditentukan oleh komitmennya untuk mewujudkan realitas baru sesuai dengan yang diteorisasikannya. Misalnya ketika membahas *good governance* misalnya, kegelisahannya bukan pada ukuran-ukuran dan ciri-ciri *good governance*, melainkan menghasilkan perilaku bersama yang memenuhi ukuran dan ciri-ciri yang dimaksudkan. Realitas baru ini merupakan ekspresi dan perwujudan dari komitmen etik ilmu sosial profetik. Dalam hubungan ini, ilmu sosial profetik menuntut kerja keras ilmuwan sosial pada dua titik ekstrim. Di satu sisi mereka dituntut untuk mempertebal penghayatan tentang kaidah filosofi keilmuan, tepatnya memperkokoh penghayatan ontologis

berbasis epistemologis yang jelas karena alasan aksiologis tertentu. Akan tetapi di sisi lain, mereka dituntut untuk ambil bagian dalam mewujudkan secara konkrit penghayatan filosofis tersebut ke dalam kehidupan masyarakat.⁷³

5. Teknik analisis

Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibagi dua. Analisis terhadap respons pemikiran Islam yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kemudian analisis terhadap respons pemikiran Islam non-mainstream.

Analisis terhadap kelompok pemikir pertama adalah sosiologi pengetahuan. Sosiologi pengetahuan merupakan teknik analisis yang menjelaskan adanya dialektika antara pemikir muslim atau organisasi sosial kemasyarakatan muslim dengan konteks dan realitas perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi.⁷⁴ Sosiologi pengetahuan yang dipergunakan dalam studi ini adalah sosiologi pengetahuan

⁷³Purwo Santoso, "Ilmu Sosial Transformatif", *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. XI, No. 2, (Februari, 2012): 619-620.

⁷⁴Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 54.

Kuntowijoyo. Oleh karena itu respons pemikiran Islam terhadap perubahan hubungan dua entitas di atas dapat dipahami sebagai sebuah dialektika antara pemikir muslim atau organisasi sosial kemasyarakatan muslim dengan konteks dan realitas perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi. Dialektika ini berlangsung dalam proses tiga momentum (tahapan) secara simultan, yaitu internalisasi, obyektifikasi, dan eksternalisasi.⁷⁵

Tahap internalisasi merupakan proses pemahaman pemikir muslim baik individu maupun organisasi terhadap ajaran Islam dan realitas perubahan relasi rakyat dan negara di atas serta kompleksitas persoalan yang menyertainya sebagai sebuah konteks. Obyektifikasi adalah langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemikir muslim baik secara individu maupun organisasi untuk merumuskan jawaban pemikiran Islam terhadap perubahan relasi rakyat dan negara tersebut dengan mempertimbangkan kompleksitas persoalan yang terkait dengan perubahan relasi dua entitas di atas dalam berbagai sisinya baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain

⁷⁵Kuntowijoyo, *Muslim*, 139-140 dan 337. Kuntowijoyo, *Identitas*, 82-83 dan 90. Abdul Majid Umar an- Najjar, *Fiqh at-Tadayyun Fahman wa Tanzilan* (Tunisia: Az-Zaitunah, 1995), 22, 90, dan 125.

sebagainya. Selain itu, dalam tahapan obyektifikasi ini termasuk juga pemilihan strategi untuk menerapkan pemikiran Islam untuk menjawab perubahan relasi rakyat dan negara di atas. Dengan demikian, tahap obyektifikasi merupakan strategi aktualisasi Islam dalam konteks perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi.

Tahap eksternalisasi adalah implementasi atau penerapan nilai-nilai Islam yang telah terinternalisasi yang dilakukan oleh tokoh dan ormas Islam yang dengan arif mempertimbangkan konteks perubahan relasi rakyat dan negara. Dengan demikian, analisis terhadap respons pemikiran Islam terhadap perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi tersebut secara simultan diletakkan dalam tiga proses internalisasi, obyektifikasi, dan eksternalisasi tersebut.

Sosiologi pengetahuan Kuntowijoyo tersebut sekalipun terdapat persamaan dengan sosiologi pengetahuan yang kemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, yaitu bahwa dalam dunia kehidupan manusia sebagai sebuah konstruksi sosial selalu dalam proses dialektis antara individu atau kelompok dengan dunia sosio-kultural yang mengitarinya. Dialektika ini dalam sosiologi pengetahuan Kunto dimulai dari

internalisasi, obyektifikasi dan eksternalisasi. Sedangkan dalam pandangan Berger dan Luckmann bahwa, dialektika di atas berlangsung dalam suatu proses yang dimulai dari *eksternalisasi* (merupakan proses awal dalam konstruksi sosial, proses ini terjadi ketika nilai-nilai subyektif dikeluarkan dalam dunia sosio-kultural yang sedang berlangsung), *obyektifikasi* (di dalam tahap ini, realitas sosio-kultural yang seakan berada di luar diri manusia, menjadi realitas obyektif, antara realitas subyektif yang ada pada diri manusia berinteraksi dengan realitas obyektif melalui proses pelembagaan atau interaksi sosial dengan dunia intersubjektif sebagai proses mengidentifikasikan diri), dan *internalisasi* (merupakan proses memasukkan nilai-nilai obyektif dari ranah sosio-kultural ke dalam realitas subyektif para individu atau kelompok mengidentifikasikan/menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia sekitar yang mengitarinya).⁷⁶

Untuk memotret dinamika respons pemikiran Islam terhadap perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi lebih tepat dipergunakan teori Kunto karena selain

⁷⁶Peter L. Berger dan Thommas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basyari (Jakarta: LP3ES, 1990), 4-6. Ahmad Salehudin, *Satu Dusun Tiga Masjid Anomali Ideologisasi Agama dalam Agama* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), 89, 92, dan 95.

respons pemikiran Islam yang direpresentasikan oleh oleh Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Muhammadiyah dan NU dapat dijelaskan secara lebih sistematis dan komprehensif, juga respons para pemikir tersebut berangkat dari etis-substantif atau etika profetik Islam yang diobyektifikasikan dalam konteks perubahan relasi rakyat dan negara. Dalam penerapannya dalam studi ini, teori sosiologi pengetahuan Kuntowijoyo dikombinasikan dengan teori sosiologi pengetahuan an-Najjar di atas.

Berbeda dengan metode analisis di atas, untuk menganalisis respons pemikiran Islam non-mainstream yang diwakili oleh Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi dalam studi ini dipergunakan *discursive strategies* (strategi wacana)⁷⁷ diletakkan dalam kerangka interaksi antara dinamika jangka panjang Islam politik dalam menghadapi otoritarianisme negara dan gagalannya sistem politik, sosial, dan ekonomi yang ada untuk mensejahterahkan rakyat. Pada saat yang sama Islam

⁷⁷ Noorhaidi Hasan, "Jalan Lain Menuju Demokrasi", Kata Pengantar dalam Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS. 2012), xiv-xv.

non-mainstream ini menawarkan negara Islam dan pemberlakuan syari'at Islam secara total dan formal sebagai sistem alternatif atas sistem yang ada.⁷⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, isu-isu seperti revitalisasi khilafah, dawah Islamiyah atau negara Islam dan syari'at yang dihembuskan oleh ormas Islam non-mainstream di Indonesia ini perlu dipahami sebagai bagian dari strategi wacana dalam konteks relasi kuasa antara rakyat dan negara yang tidak berimbang dan manipulatif. Selain itu, isu-isu di atas menjadi pilihan wacana dalam mempertahankan dan menyongsong hadirnya suatu perubahan yang lebih prospektif.⁷⁹

Berdasarkan kerangka analisis di atas, dapat ditegaskan bahwa respons pemikiran Islam non-mainstream terhadap perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia di era reformasi perlu didapat dibaca sebagai ikhtiar, kesadaran dan bagian dari gerak dinamika masyarakat muslim Indonesia yang tengah berubah di saat akar-akar demokrasi mulai menancap kukuh.⁸⁰ Dengan begitu, Islam dijadikan sebagai daya atau sumber

⁷⁸Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad, Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia & KITLV-Jakarta, 2008), 2 dan 322.

⁷⁹Noorhaidi Hasan, "Jalan Lain Menuju Demokrasi", xiv-xv.

⁸⁰Ibid.

pembingkai dalam merespons dan mengarahkan serta memformat ulang relasi rakyat – negara dengan kompleksitas permasalahan baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya, baik pada level lokal, nasional, maupun global.

Kegiatan penelitian ini dimulai dari merumuskan permasalahan penelitian, mengumpulkan data penelitian, data display, reduksi data, dan merumuskan kesimpulan. Secara keseluruhan kegiatan dan langkah-langkah penelitian ini sejak awal hingga akhir dapat dipahami dalam diagram sebagai berikut:⁸¹

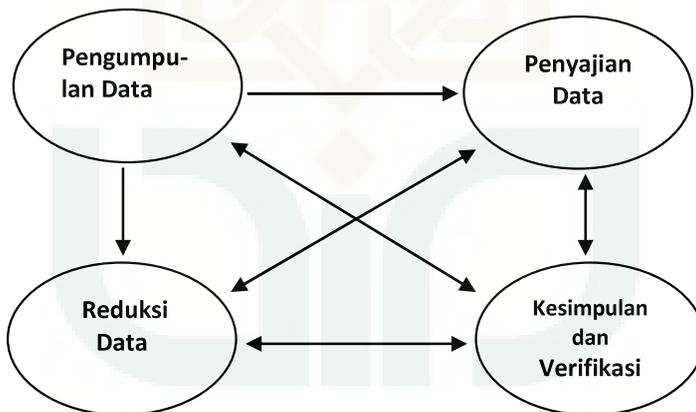


Diagram 1. Langkah-Langkah Penelitian.

⁸¹Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI Press, 1992), 20.

H. Sistematika

Secara keseluruhan pembahasan penelitian respons pemikiran Islam terhadap perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia di era reformasi ini terdiri dari tujuh bab. Bab pertama melacak respons Islam terhadap perubahan hubungan rakyat dan negara di Indonesia era reformasi. Bab ini merupakan bab yang mengarahkan pembahasan bab-bab selanjutnya. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan perubahan konteks pergumulan pemikiran antara marginalisasi negara dan sentralisasi rakyat di Indonesia era reformasi. Bab kedua ini mendeskripsikan perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia dari relasi yang berpusat pada negara (*state centric*) ke relasi yang berpusat pada rakyat atau masyarakat (*society centric*).

Bab ketiga mendeskripsikan pemikiran tokoh, yaitu pemikiran Islam dan Ke-Indonesiaan Nurcholish Madjid, Pemikiran Islam pribumi Abdurrahman Wahid, dan Islam, rakyat dan ke-Indonesiaan.

Bab keempat menjelaskan pemikiran organisasi Islam mainstream yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Islam dan reposisi relasi rakyat dan negara.

Bab kelima membahas respons pemikiran organisasi Islam non-mainstream, yaitu negara Islam Indonesia Kaffah Front Pembela Islam, Negara Khilafah Nusantara Majelis Mujahidin Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, dan Islamisme dan pengaturan relasi rakyat dan negara. Ketiga bab ini membahas respons terhadap perubahan yang disajikan pada bab II.

Bab keenam memetakan secara seksama dinamika respons pemikiran Islam terhadap perubahan relasi rakyat dan negara Indonesia era reformasi. Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada peta dan dinamika pemikiran Islam terhadap perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi, strategi tokoh, Islam Mainstream dan strategi Islam Non-Mainstream dalam aktualisasi dan transformasi pemikiran dalam konteks perubahan pola relasi rakyat dan negara.

Bab ketujuh merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keseluruhan deskripsi, pembahasan, dan diskusi dengan menggunakan analisis sosiologi pengetahuan yang didasarkan pada Ilmu Sosial Profetik berdasarkan langkah-langkah internalisasi, obyektifikasi dan eksternalisasi yang sudah diuraikan dalam bab-bab terdahulu dari studi ini, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, pemikiran Islam yang dikemukakan oleh para tokoh dan ormas Islam dalam mempola-ulang pola relasi rakyat-negara era reformasi merupakan kontribusi pro-aktif Islam dalam proses demokratisasi di Indonesia, dan sekaligus memberi arah demokrasi di Indonesia yang didasarkan pada rasionalitas dan etika. Oleh karena itu, kontribusi pemikiran ini dapat dikatakan melampaui dan dapat pula menjadi alternatif pengembangan demokrasi yang bersifat prosedural (mekanistik) yang dikembangkan berbagai pihak di Indonesia era reformasi. Dengan demokrasi didasarkan pada etika itulah relasi rakyat

kuat dan negara kuat di Indonesia menjadi kokoh dan bermartabat.

Pemikiran di atas menunjukkan betapa kuatnya keinginan umat Islam untuk menyantuni perubahan pola relasi rakyat dan negara yang didasarkan pada etika yang implementasinya mempertimbangkan secara arif kompleksitas permasalahan yang mengitarinya baik isu lokal, nasional dan ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial politik global. Dalam hubungan ini para pemikir Islam di Indonesia dengan penuh kesadaran dan memastikan bahwa apapun bentuk atau pola hubungan rakyat-negara yang diberlakukan, maka yang paling banyak terkena dampaknya adalah umat Islam.

Berdasarkan pertimbangan itulah, umat Islam perlu memastikan bahwa kehidupan bernegara yang dilangsungkan tetap dalam koridor ajaran agamanya. Oleh karena itu, dalam konteks ini, perlu ditegaskan bahwa kontribusi umat Islam terhadap perubahan pola relasi rakyat dan negara ini menunjukkan suatu keniscayaan adanya sinergi antara pemikiran Islam sebagai aktualisasi ajaran agama dengan pemikiran kenegaraan dalam posisinya sebagai warga negara. Peran ganda muslim sebagai pemeluk ajaran agama dengan muslim sebagai warga negara, menjadi suatu keniscayaan yang

memungkinkan Indonesia dapat membangun sistem politik yang memenuhi kaidah internasional, modern dan pada saat yang sama mendapat dukungan dari warganya yang *notabene* mayoritas memeluk ajaran Islam.

Bertitik-tolak dari penegasan di atas, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa hanya dengan pemahaman kontribusi pemikiran Islam terhadap perubahan pola relasi rakyat dan negara sebagai upaya umat Islam dengan pendasaran pada ajaran Islam merupakan harapan bahwa sendi-sendi Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama arah perubahan pola relasi rakyat dan negara di era reformasi akan tegak, dan tegaknya sendi-sendi yang kokoh itu, akan membawa tegak dan kuatnya negara dan bangsa ini. Tanpa sendi-sendi yang kokoh itu, maka bangunan negara dan bangsa ini akan lemah dan rapuh. Dalam konteks inilah, sumbangan Islam yang diupayakan oleh para pemikir muslim baik tokoh maupun ormas di bidang ini untuk Indonesia akan sangat berarti mengingat bahwa Islam merupakan anutan sebagian besar rakyat Indonesia. Kemampuan umat Islam untuk mengambil bagian dalam kehidupan Negara Indonesia yang modern menambah kemantapan mereka sebagai rakyat yang akan melahirkan tindakan-tindakan yang lebih

positif dan konstruktif yang merupakan sumbangsih mereka terhadap negara Republik Indonesia.

Keniscayaan tersebut di atas punya implikasi mendasar karena dalam konteks pencarian solusi terhadap arah tatanan dan masa depan kehidupan bernegara di Indonesia, terutama dalam konteks relasi rakyat- negara yang mengemuka bahwa studi pemikiran Islam di Indonesia baik oleh para ilmuwan politik Indonesia maupun peneliti dalam bidang studi keislaman di Indonesia khususnya yang membahas tentang pentingnya peran dan kontribusi Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Sungguhpun demikian, keniscayaan ini telah terabaikan dalam kajian tentang pemikiran Islam di Indonesia baik yang dilakukan oleh ahli studi Islam maupun oleh para ilmuwan politik.

Bertitik-tolak dari pernyataan di atas dapat pula dipahami bahwa sumbangan pemikiran Islam terhadap perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi, terutama yang dikemukakan oleh tokoh, ormas Islam mainstream merupakan aktualisasi dari pemikiran keagamaan yang melekat secara inheren dalam Islam bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh negara merupakan amanah, dan amanah tersebut harus

dipertanggungjawabkan untuk kepentingan rakyat. Dengan begitu, semua kebijakan yang dilakukan oleh negara harus mengacu untuk kesejahteraan rakyat. Atas dasar itulah, dalam kehidupan negara seperti ini di samping rakyat dapat menuntut tanggungjawab negara, rakyat juga dapat melakukan tanggungdesaknya terhadap negara untuk memenuhi hak-hak mereka jika negara lalai atau melanggarnya. Pemikiran ini menunjukkan bahwa negara di samping harus menjalankan fungsi rasional, juga mengemban tanggungjawab etisnya terhadap rakyat.

Pemikiran di atas menunjukkan bahwa perubahan pola relasi rakyat dan negara diarahkan kepada konsep relasi rakyat dan negara dalam negara kesejahteraan. Peran dan fungsi negara dalam negara kesejahteraan menjadi relevan dan signifikan dalam kehidupan negara di Indonesia di era reformasi sekarang ini dalam menyantuni kehidupan rakyatnya baik dalam level lokal, nasional maupun tingkat global. Pemikiran ini menunjukkan sikap konsisten dan secara kreatif menjadikan Islam sebagai sumber daya pembingkai dalam menyikapi secara kritis dan arif derasnya arus modernisasi, himpitan globalisasi

dan kegagalan ideologi-ideologi kontemporer untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kedua, bahwa sumbangan penting pemikiran Islam terhadap perubahan pola relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi merupakan ungkapan konstruktif dan sekaligus kritik konstruktif atas perubahan pola relasi - negara sistem negara-bangsa yang diterapkan di Indonesia dalam mensejahterahkan rakyatnya, bersamaan dengan itu sekaligus memberikan alternatif dan solusi akan munculnya sistem politik, sosial dan ekonomi yang lebih manjajikan dan adil. Dalam konteks inilah wacana perubahan pola relasi rakyat dan negara yang didasarkan pada negara Islam dan penerapan syari'ah secara formal di satu pihak dan di pihak lain perubahan pola relasi dua entitas tersebut didasarkan pada core values Islam yang diintegrasikan dalam sistem kenegaraan yang sudah ada memiliki maknanya yang signifikan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan para pemikir Islam merupakan ikhtiar kreatif pemikiran Islam dengan penuh kesadaran dan dinamika untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat dalam konteks perubahan pola hubungan rakyat dan negara di

Indonesia era reformasi. Respons ini dapat pula dipahami sebagai bagian dari gerak dinamika masyarakat muslim Indonesia yang tengah berubah dan menyadari hak-hak mereka sebagai warga negara di saat akar-akar demokrasi mulai menancap kukuh.

Munculnya varian pemikiran Islam dalam merespons perubahan pola relasi rakyat dan negara di atas bertitik-tolak dari perbedaan cara berpikir yang dipergunakan dalam merespons perubahan relasi dua entitas tersebut, di satu pihak mempergunakan metode berpikir yang mendasarkan realitas perubahan dua entitas tersebut pada pada visi etis – substantif Islam. Sedangkan di pihak lain para pemikir Islam menggunakan metode berpikir dengan cara mendasarkan perubahan relasi rakyat dan negara pada kuasa penuh teks secara formal (*textual-oriented approach*)

Konsekuensi dari cara berpikir yang legal-formalistik dalam menjawab perubahan pola relasi rakyat dan negara tersebut cenderung reaktif, simplikatif dan kurang adaptif karena pada kenyataannya perubahan pola relasi rakyat dan negara dengan kompleksitas permasalahannya pemecahannya menjadi parsial jika semata-mata didasarkan pada konsep-konsep simplikatif

seperti negara Islam dan pemberlakuan syari'ah Islam secara formal. Dalam hubungan inilah letak posisi strategisnya metode berpikir etis-substantif yaitu dalam mempertautkan antara realitas perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi dengan visi etis Islam di samping cerdas, arif, prospektif dan juga solutif.

Dengan begitu, pemikiran Islam yang bervisi etis dalam merespons perubahan relasi rakyat dan negara yang prospektif di atas, di satu pihak didasarkan pada cara memahami Islam secara langsung dari Alquran dan Hadis yang menekankan visi bersama untuk membangun bangsa dan negara yang bertumpu pada penafsiran ke-Islaman yang terbuka dan modern serta berlandaskan pada visi Islam kemanusiaan. Sedangkan di pihak lain berpangkal-tolak dari penggalan dan pemanfaatan secara optimal warisan intelektual Islam yang sudah ada sebagai upaya untuk mamahami Alquran dan Hadis tersebut.

Dari dua cara berpikir pendukung visi etis Islam di atas sekalipun sama-sama efektif dan solutif dalam merespons perubahan relasi rakyat dan negara tetapi cara berpikir yang pertama walaupun efektif tetapi kurang efisien dan sedangkan cara berpikir yang terakhir di samping efektif juga lebih efisien.

Dengan cara berpikir yang terakhir ini, setidaknya ada dua keuntungan bagi umat Islam, yaitu *pertama* dalam merespons perubahan kehidupan bernegara, umat Islam selalu memiliki lebih dari satu alternatif jawaban, *kedua* pendekatan ini juga mengisyaratkan kreativitas yang tinggi dalam pemanfaatan secara maksimal dari interpretasi yang sudah dilakukan oleh para pemikir Islam terdahulu sebagaimana terekam dalam berbagai khazanah pemikiran Islam.

Bertitik-tolak dari pernyataan di atas, beberapa tuduhan yang sering dialamatkan terhadap pemikiran Islam terakhir yang muncul selama ini sebagai tradisional secara agama, kolot secara intelektual, pragmatis oportunistik secara politik, sinkretik secara kultural, konservatif, ortodoks, mundur dalam berfikir, menutup pintu ijtihad, dan sejumlah *stereotyping* lain yang memosisikannya dalam kubangan kejumudan dan ketertinggalan kiranya segera dan harus ditinjau kembali.

Cara berpikir efektif dan efisien di atas, dalam memperkuat posisi tawar rakyat terhadap negara di Indonesia dikembangkan lebih progresif lagi oleh dua tokoh pemikir Cak Nur dan Gus Dur sebagaimana dikemukakan di atas telah dapat mensintesis nilai-nilai dasar khazanah intelektual Islam dengan tantangan dan tuntutan dunia global dan nasional secara

sophisticated (canggih) dan progresif. Oleh karena itu, dalam konteks memperkuat posisi dan relasi rakyat dengan negara dan tantangan lokal, nasional dan global inilah, dapat dipahami pemikiran Islam yang canggih di atas sering bersikap kritis bahkan kadang-kadang berseberangan terhadap kebijakan negara dan keinginan umat Islam sebagai mayoritas rakyat Indonesia. Atas dasar itu, pemikiran ini dapat dikatakan melampaui diskursus perlunya perumusan dan pelurusan kiblat bangsa Indonesia yang sekarang ini sedang diwacanakan.

Kontribusi penting dari hasil studi ini adalah bahwa dalam pembacaan atas pemikiran Islam di Indonesia, terutama dalam konteks merespons perubahan pola relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi perlu dilakukan di samping melihat dinamika pemikiran Islam di Indonesia dari aspek internal, kultural teologis dan politis, juga pula diperpertautkan dengan dinamika berbagai faktor seperti ekonomi, politik, sosial budaya baik dalam level lokal, nasional maupun global yang memicu dan mengitari pemikiran Islam tersebut. Di samping itu, temuan studi ini berkontribusi bagi para pemerhati dan peminat studi politik Islam adalah dapat mengisi salah satu titik lemah atau kekosongan dari kajian politik Islam yaitu masih kurang

tersedianya kemungkinan-kemungkinan untuk menghadirkan wajah lain terkait dengan politik Islam.

Bertitik-tolak dari dua kerangka pemikiran Islam dalam merespons perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi tersebut di atas, pemikiran Islam yang bertitik-tolak dari core values Islam dapat dikategorikan sebagai pemikiran menunjukkan sebuah konsep yang mentransformasikan dasar-dasar Islam dalam konteks perubahan rakyat dan negara dalam bingkai negara bangsa. Kerangka berpikir ini mengajarkan bagaimana menjadi orang Indonesia yang beragama Islam dan orang Islam asli Indonesia dalam merespons perubahan relasi rakyat –negara di Indonesia era reformasi. Konsep ini juga memadukan berbagai nilai budaya global kontemporer, seperti HAM, demokrasi, negara bangsa, sehingga tidak diperlukan lagi istilah HAM Islam, demokrasi Islam, negara Islam dan lain-lain. Sedangkan pemikiran Islam yang mendasarkan pada kekuasaan penuh teks dalam merespons perubahan relasi rakyat dan negara pemikiran yang mempergunakan metode berpikir yang mendasarkan realitas perubahan dua entitas tersebut pada kuasa teks secara formal. Dampak dari cara berpikir seperti ini adalah di samping kurang efektif dan efisien juga kontra

produktif terhadap sistem kenegaraan yang ada dalam berbagai aspeknya.

Temuan penting dari studi ini dengan mempergunakan kerangka analisis sosiologi pengetahuan yang didasarkan Ilmu Sosial Profetik sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dikembangkan lebih lanjut dan dijadikan alternatif dalam memahami dinamika pemikiran Islam di Indonesia, terutama dalam konteks merespons dan mengarahkan perubahan serta memformat ulang relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi. Dinamika pemikiran Islam di Indonesia dalam merespons tantangan kehidupan dewasa ini yang begitu kompleks mengalami kesulitan jika dipahami dengan mempergunakan model tipologi pemikiran Islam yang selama ini diterapkan dalam memetakan pemikiran Islam, seperti kategori *indigenized* (pribumisasi) Islam, Islam tradisional, Islam modernis, Islamisme atau Islamis, dan neo-modernisme Islam. Kategori-kategori ini tentu saja hanya sebatas menjelaskan sisi permukaan dan kecenderungan teologis, kondisi internal dan kultural yang mengitari pemikiran Islam Indonesia. Selain itu, juga model kategoris tersebut seakan mengisolasi pemikiran Islam dari dinamika kompleksitas persoalan eksternal yang mengitari Islam dan umat Islam.

B. Rekomendasi

Bertitik-tolak dari hasil penelitian sebagaimana dikemukakan di atas dan untuk mengembangkan kajian pemikiran Islam agar relasi rakyat dan negara di Indonesia ke depan lebih berpihak kepada rakyat serta untuk terus mendorong terciptanya relasi rakyat dan negara di Indonesia yang lebih adil dan demokratis, maka perlu mempertimbangkan rekomendasi berikut:

Pertama, fiqh siyasah atau fiqh politik sebagai salah satu perangkat dan keilmuan untuk menerjemahkan wawasan keislaman sudah semestinya mulai menyentuh wacana kerakyatan sebagai subyek sekaligus obyek studi politik dalam Islam. Dengan demikian fiqh tersebut perlu mempertimbangkan realitas empirik dan kemungkinan-kemungkinan untuk dilakukan perubahan-perubahan mendasar dalam paradigma politik Islam.

Kedua, memperkuat posisi tawar rakyat terhadap negara perlu dilakukan penguatan gerakan masyarakat sipil di Indonesia dan pemberdayaan rakyat agar rakyat mengetahui, memahami dan menyadari hak-haknya sebagai warga negara. Dengan begitu rakyat dapat berpartisipasi dalam mengembangkan

kehidupan negara yang lebih berpihak pada rakyat dan rakyat juga dapat mengawasi dan mengontrol negara jika negara menyimpang dari konstitusi. Dalam kaitan ini Islam dapat memberikan sumbangan yang konstruktif.

Ketiga, masa depan relasi rakyat dan negara di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsep *governance*. Dalam konsep *governance* terkandung pengertian bahwa pemerintahan tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah (*government*) sendiri tetapi juga bersama-sama dengan rakyat secara luas sebagai *stakeholders*. Agar suatu tata kelola pemerintahan yang baik terwujud, maka norma-norma yang harus dipenuhi adalah adanya partisipasi, efisiensi, keadilan dan kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, responsifitas, dan adanya visi. Untuk itu perlu pengembangan kajian fiqh siyasah tentang relasi rakyat dan negara di Indonesia ke depan tidak dapat dilepaskan dari pengembangan konsep *governance* dalam pemikiran Islam.

Keempat, merumuskan konsep *governance* dalam perspektif Islam tersebut, Dibutuhkan penggalian dan formulasi nilai-nilai substansial atau *basic values* Islam dalam kajian pemikiran kenegaraan karena kajian Islam tentang negara yang

hanya bertumpu pada perumusan norma-norma Islam konkrit seperti ditawarkan selama ini sudah tidak lagi memadai.

Kelima, mewujudkan *good governance* tersebut dalam kajian pemikiran kenegaraan Islam perlu dikembangkan ke arah kajian yang bersifat preskriptif. Dalam kajian preskriptif ini tersusun secara hirarkis yaitu norma yang paling abstrak dikonkretisasi atau diimplementasikan dalam norma yang lebih konkret. Dengan kata lain nilai-nilai dasar dikonkretisasi dalam norma-norma tengah baik berupa asas-asas maupun kaidah-kaidah dasar. Norma-norma tengah (doktrin-doktrin umum) pada gilirannya lebih dikonkretkan lagi dengan mengimplementasikannya dalam bentuk norma konkret dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, Ulil Abshar, “Kegelisahan Kyai Desa di Kota Metropolitan Jakarta“, *Majalah Basis*, No. 03-04, Tahun ke- 49, 2000.
- Abdalla, Ulil Abshar, “Serat Centhini: Sinkretisme Islam dan Dunia Orang Jawa”, dalam *Kompas*, 04 Agustus 2000.
- Abdillah, Masykuri, “Islam Politik dan Islam Struktural”, dalam Hamid Basyaib dan Hamid Abidin (ed.), *Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra-pemilu 1999 sampai Pemilihan Presiden*, Jakarta: Alvabet, 1999.
- Abdullah, M. Amin, ”Agama & Pembentukan Kepribadian Bangsa Di Indonesia”, *Makalah*, diunggah pada 3 Juni 2010, akses tanggal 22 Juni 2013.
- Abdullah, M. Amin,”Islam dan Keindonesiaan”, dalam Komaruddin (editor), *Kontroversi Khilafah Islam, Negara, dan Pancasila*. Bandung: Mizan, 2014.
- Abdurrahman, Moeslim, ”Islam dan Negara dalam Sejarah yang Berubah-ubah”, dalam Musda Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Abdurrahman, Moeslim, *Semarak Islam, Semarak Demokrasi?*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Abror, M. Muchlas, ”Kontribusi Muhammadiyah”, dalam kolom kalam *Suara Muhammadiyah* No.22/TH. Ke-96, 16-30 November 2011.
- Achmad Munjid,” Hentikan Vigilantisme FPI”, dalam *Koran Tempo*, Jum’at, 06 Juni 2008, diunduh dari

http://www.wahidinstitute.org/Opini/Email_page?id=142/hl=id/Hentikan_Vigilantisme_FPI 28 September 2011.

- Adib, Muhammad, “Tariq Ramadan: Muslim, Identitas, dan Integrasi Kewarnegaraan”, dalam Mirza Tirta Kusuma (editor), *Ketika Makkah Menjadi Seperti Las Vegas Agama, Politik, dan Agama*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- AF, Ahmad Gaus, *Api Islam Nurcholish Madjid Jalan Hidup Seorang Visioner*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Ahmad, Munawar, *Ijtihad Politik Gus Dur Analisis Wacana Kritis*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Ahmad, Z.A., *Membentuk Negara Islam*, Jakarta: Widjaya, 1956.
- Al-Banna, Hassan, “*Majmu’ at Rasa’il al-Iman al-Shahid Hassan al-Banna*”, Cairo: Dar-al-Da’wah, 1990.
- Alford, Robert R. dan Roger Friedland, *Powers of Theory: Capitalism, the State, and Democracy*, Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- Ali, Fachry dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, Bandung: Mizan, 1986.
- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba, *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1963.
- Amal, Taufik Adnan dan Samsul Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam*. Jakarta: Alfabet, 2004.

- Amin, Ainur Rofiq al-, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Ansari, Muhammad Jabir al-, *al-Taazzum al-Siyasi inda al-Arabi wa Susiyulujiya al-Islam Mukawwanat al-Halat al-Mazmanat*, Beirut: Dar al-Syuruq, 1999.
- Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekular tentang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945-1959*, Bandung: Pustaka Perpustakaan Salman ITB, 1981.
- Anwar, M. Syafi'i, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Anwar, Syamsul, "al-Mawardi dan Teorinya tentang Khilafah", dalam *Al-Jami'ah* Majalah Ilmu Pengetahuan Agama Islam No. 35 Th. 1987, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- _____. "Membangun Good Governance dalam Penyelenggaraan Birokrasi Publik di Indonesia Tinjauan dari Perspektif Syariah dengan Pendekatan Ilmu Usul Fikih", Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Usul Fikih pada Faklutas Syari'ah di Hadapan Rapat Senat Terbatas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 26 September 2005.
- Asroni, Ahmad, "Pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang Negara dan Syariat Islam di Indonesia", dalam *Millah* Jurnal Studi Agama Vol. X, No. 2 Februari 2011, Yogyakarta: MSI UII.

Asshiddiqie, Jimly, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Assyaukanie, Luthfi, *Ideologi Islam dan Utopia Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Freedom Institute, 2011.

_____. "Masih Relevankah Fikih Siyasa", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Editor). *Islam Negara & Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina. 2005. hlm. 249-250.

Asyari, Suaidi, *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah Over Crossing Java Sentris*, Yogyakarta: LKiS, 2009.

Atiyah, Jamaluddin, *Nahwa Taf'il Maqasid al-Syari'ah*, Damsyik: Dar al-Fikr dan al-Ma'had al-Alam li al-Fikr al-Islami, 2001.

Awwas, Irfan S. (ed.), *Risalah Kongres Mujahidin 1*.

_____. dalam CD rekaman diskusi "Formalisasi Syari'ah Islam dalam Konstitusi Negara" antara Ahmad Syafii Maarif dan MMI, 21 September 2001.

Azhari, Aidul Fitriadi, "Pemikir (an) Politik Hukum", dalam Saldi Isra dan Edy Suandi Hamid (Penyunting), *Sahabat Bicara Mahfud MD*. Jakarta: Murai Kencana dan Yayasan Satu Tiga Lima, 2013.

Azhary, Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

- Azizy, A. Qodri, *Melawan Globalisasi; Reinterpretasi Ajaran Islam, Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Baidhawiy, Zakiyuddin, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Baqillani, Abu Bakar Muhammad, “al-Tamhid” dalam Yusuf Ibish (ed.). *Nusus al-Fikr al-Siyasi al-Islami, al-Imamah ind al-Sunnah*, Beirut: tp, 1966.
- Barton, Greg, *Pemikiran Islam Liberal di Indonesia Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid 1968-1980*, terj. Nanang Tahqiq, Jakarta: Kerjasama Paramadina dengan Pustaka Antara, Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 1999.
- Baso, Ahmad, “Tradisi Sebagai Invensi, “ *Kompas*, 06 September 2002.
- Basyaib, Hamid dan Zainal Abidin (editor), *Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu '99 Sampai Pemilihan Presiden*, Jakarta: Alfabet, 1999.
- Bayah, Abdullah bin Syaikh Mahfuz bin, *al - Irhab at-Tasykhis wa al-Hulul*, Riyad: Maktabah al-Ibyikan, 2007.
- Bayyah, Syaikh Abdullah ibn Syaikh al-Mahfuz bin, *Sina'at al-Fatawa wa Fiqh al-Aqalliyah*, Beirut: Dar al-Minhaj, 2007.
- Beckmann, Franz von Benda-, *Properti dan Kesenambungan Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia & Perwakilan Koninklijk Instituut voor Tall-Land- en Volkenkundende, 2000.

- Beckmann, Keebet von Benda, *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*, Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia dan Perwakilan Koninklijk Instituut voor Tall-Land- en Volkenkundende, 2000.
- Bell, Stephen and Adrew Hindmoor, *Rethinking Governance The Centrality of State in Modern Society*, New York: Cambridge University Press, 2009.
- Benda, Harry J., *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation*, Den Haag & Bandung: van Hoeve, 1958.
- Bizawie, Zainul Milal, “Dialektika Tradisi Kultural: Pijakan Historis dan Antropologis Pribumisasi Islam”, dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, edisi 14, 2003.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Media, 1987.
- Budiman, Arief (ed.), *State and Civil Society in Indonesia*, Clayton: CSEAS, Monash University, Australia, 1994.
- Budiman, Arief, “Bentuk Negara dan Pemerataan Hasil-hasil Pembangunan”, dalam *Prisma*, No. 7 Tahun 1982.
- Budiman, Arief, “Introduction From a Conference to a Book”, dalam Arief Budiman, (ed.). *State and Civil Society in Indonesia*. Clayton: Monash University, 1990.
- Budiman, Arief, *Negara dan Pembangunan*, Tanpa kota: Yayasan Padi dan Kapas, 1991.
- Budiman, Arief, *Teori Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Budiman, Hikmat, *Lubang Hitam Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.

- Bungin, B., *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Cegah Disintegrasi, Sejahteraan Rakyat Papua dikuti dari <http://awarsono.wordpress.com/2008/08/14/cegah-disintegrasi-sejahteraan-rakyat-papua/> diakses 18 Oktober 2011.
- Cohen, Jean L., dan Andrew Arato. *Civil Society and Political Theory*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1992.
- Coulson, Noel J.. *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1960.
- Dewantara, Ki Hadjar, *Kebudayaan*, Yogyakarta: Madjelis Luhur Taman Siswa, 1967.
- Dhakidae, Daniel, “Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia”, dalam *Seri Prisma, Analisa Kekuatan Politik di Indonesia. Pilihan Artikel Prisma*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Dhakidae, Daniel, “Pemilihan Umum di Indonesia: Saksi Pasang Naik dan Surut Partai Politik”, dalam *Seri Prisma, Demokrasi dan Proses Politik: Pilihan Artikel Utama*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Diskusi bulanan MMI, Oktober 2004.
- Diskusi publik menanggapi polemik kekerasan Ahmadiyah di Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia (PPUII) melalui Organisasi Pondok Pesantren UII (OSPP UII), Sabtu 26 Februari 2011.

- Dja'far, Alamsyah M., "Pengantar Editor Islam Indonesia dan Gerakan Sosial Baru", dalam Ahmad Suaedy, *Perspektif Pesantren: Islam Indonesia Gerakan Sosial Baru Demokratisasi*, Jakarta: The Wahid Institute, 2009.
- Dwipayana, A.A.G.N. Ari, "Pendidikan Umat: dari Pluralism ke Multikulturalisme", dalam *Jurnal Teologi Gema*, Edisi 58, 2003.
- Dwiyanto, Djoko dan Ign. Gatut Saksono, *Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila Negara Pnacasila: Agama atau Sekuler; Sosialis atau Kapitalis*, Yogyakarta: Ampera Utama, 2012.
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- _____. *The State of Our Democracy: Manata Ulang Gagasan dan Praktik Demokrasi di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Gurubesar Ilmu Politik. Jakarta: UIN Jakarta Press dan PPIM UIN Jakarta, 2009.
- Eickelman, Dale F. & James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, Bandung: Mizan, 1998.
- Emmanuel, *Radical Islam, Medieval Theology and Modern Politic*, New Haven and London: Yale University Press, 1985.
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Pembebasan*, alih bahasa Hairus Salim dkk, Yogyakarta : LkiS, 1993.
- Fakih, Mansour, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

- Fanani, Muhyar, *Metode Studi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fatah, Eef Saefulloh, *Menuntaskan Perubahan 1: Catatan Politik 1998-1999*, Bandung: Mizan, 2000.
- Fealy, Greg. "Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia", *Contemporary Southeast Asia* 23, No. 2, Agustus 2001.
- Feillard, Andree, *NU vis-a-vis Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, terj. Lesmana, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Firjani, Muhammad al-Syarif al-, *As-Siyasi wa ad-Dini fi al-Majal al-Islami*, terj. Muhammad as-Sagir Jinjar, Perancis: Munsyurat Muqaddimat, 2008.
- Fleming, Benyamin, *Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis*, New York: Pater Lang Publishing. 2006.
- FPI Desak Pemerintah Hukum Mati Koruptor dikutip dari <http://kabarnet.wordpress.com/2011/05/12/fpi-desak-pemerintah-hukum-mati-koruptor/> diunduh 14 Oktober 2011.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Furchan, Arief dan Agus Maimun, *Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Furnivall, JS, *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, New York: Basic, 1973, hlm. 446.

- Gaffar, Afan, *Javanese Voters: A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Gazali, Syaikh Muhammad al-, *Al-Ghazali Menjawab 40 Soal Agama Abad 20*, Bandung: Mizan, 1994.
- Gazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Thusi al-, *Al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Gelner, Ernest, *Postmodernism, Reason, and Religion*, London: Routledge, 1992.
- Giddens, Anthony, *New Rules of Sociological Method. A Positive Critique of Interpretative Sociologies*, Cambridge: Polity Press, 1994.
- GP., M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos, 1999.
- Green, Phillip (ed.), *Key Concepts in Critical Theory*, New Jersey: Tanpa Nama Penerbit, 1993.
- Gugun El-Guyanie, "FPI dan Penodaan Citra Agama", (opini) *Suara Merdeka*, 4/6/2008 dikutip dari http://www.gusdur.net/Opini/Detail/?id=141/hl=id/FPI_Dan_Penodaan_Citra_Agama, diunduh 21 September 2011.
- Gus Dur Pejuang Pluralisme Sejati, dalam *Harian Kompas* 7 Januari 2010 dan dikutip juga dari <http://artikel-media.blogspot.co.id/2010/01/gus-dur-pejuang-pluralisme-sejati.html>, 14 Maret 2016
-
- Hadiz, Vedi R., "Ketidakadilan Sosial, Akar Radikalisme", dalam *Komunitas* Vol.III No.8-Agustus 2011, Jakarta: Maarif Institute For Culture and Humanity.

- Hamzah, Fahri, *Negara, Pasar dan Rakyat Pencarian Makna, Relevansi dan Tujuan*, Jakarta: Faham Indonesia, 2010.
- Hanafi, Hasan, "Alternative Conceptions of Civil Society: A Reflective Islamic Approach," dalam Sohail H. Hashmi (ed.), *Islamic Political Ethics*, Princeton: Princeton University Press, 2002.
- Harahap, Fahdi Batara, *Pluralisme dan Inkusifisme Islam: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid*, Yogyakarta: UGM Press, 2003.
- Hardiman, F. Budi, "Belajar dari Politik Multikulturalisme", dalam Will Kymlicka, *Kewarganegaraan Multikultural*, Jakarta: LP3ES, 2002.
- Harun, Lukman, *Muhammadiyah dan Asas Pancasila*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986.
- Haryatmoko, "Penerimaan Pluralitas Agama sebagai Syarat Kemungkinan Etika Politik" dalam Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial *UNISIA* No.58/XXVIII/IV/2005, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2005.
- _____. *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Hasan, Noorhaidi, *Laskar Jihad, Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia & KITLV-Jakarta, 2008.
- Hasan, Noorhaidi, "Ideologi, Identitas dan Ekonomi Politik Kekerasan" dalam *Prisma* Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi, Vol. 29, Oktober 2010. Jakarta: LP3ES, 2010.

- _____. *Islam Politik di Dunia Kontemporer Konsep, Genealogi, dan Teori*, Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- _____. “Jalan Lain Menuju Demokrasi”, Kata Pengantar dalam Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Hasil Rumusan Konferensi Jaringan Antariman di Indonesia: Agama-Agama untuk Keadilan dan Perdamaian di Negara Kesatuan Republik Indonesia” Yogyakarta, 13 – 15 Oktober 2011 Gedung UC Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Hasjmy, A, *Di mana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Hassan, Mohammad Kamal, *Muslim Intellectual Responses to “New Order” Modernization in Indonesia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1980.
- Hayat, Bahrul, *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*, Jakarta: PT. Saadah Cipta Mandiri, 2012.
- Hefner, Robert W. (ed.), *The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*, Honolulu: University of Hawaii Press, 2001.
- _____. “Public Islam and the Problem of Democratization”, *Sociology of Religion*, Special Issue, Nol. 62, No. 4, (2001).
- _____. *Civil Islam Muslims and Democratization in Indonesia*, New Jersey: Princeton University Press, 2000.

- _____. "Pengantar", dalam Andree Feillard, *NU vis-a-vis Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, terj. Lesmana, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Hiariej, Eric, *Hubungan Pembangunan Ekonomi Kapitalis dan Demokrasi: Studi Kasus Korea Selatan*, Laporan Penelitian, Yogyakarta: FISIP-UGM, 1998.
- Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gaus AF, "Tipologi Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Islam, Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Hidayat, Komaruddin, "Islam dan Hegemoni Sosial Sebuah Pengantar", dalam Simuh, dkk, *Islam dan Hegemoni Sosial*, Kata Pengantar Komaruddin Hidayat, dalam Khaeroni, dkk. (Editor), Jakarta: Mediacita, 2002.
- Hidayat, Mansur, "Ormas Keagamaan dalam Pemberdayaan Politik Masyarakat Madani (Telaah Teoritik – Historis)" dalam *Komunitas*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Volume 4, Nomor 1, Juni 2008.
- Hikam, Muhammad A.S., "Demokrasi melalui ' Civil Society', Sebuah Tatapan Reflektif Indonesia", *Prisma* No. 6, 1993.
- Hizbut Tahrir Indonesia, *Dakwah Islam Tanpa Kekerasan*, Indonesia: HTI, 2003.
- Hizbut Tahrir Indonesia, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, Depok: Pustaka Thariqul Izzah, 2003.
- Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Politik Islam Ideologis*, Depok: Pustaka Thariqul Izzah, 2000.
- _____. *Muqaddimat al-Dustur*, Beirut: Dar al-Ummah, 2009.

Hoare, Q. and G. Nowell (eds.), *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*, London: Lawrence & Wishart, 1976.

<http://www.al-islam.or.id>

<http://www.Islamlib.com> diunduh 20 November 2011.

<http://banjar.muhammadiyah.or.id/artikel-aktualisasi-khittah-muhammadiyah--dan-format-peran-politik-kebangsaan-detail-45.html> diunduh 16 November 2011.

<http://hizbut-tahrir.or.id/2008/10/01/dalil-mendirikan-negara-berdasarkan-syariah-islam/> diunduh 21 September 2011.

http://majelismujahidin.com/2011/03/majelis-mujahidin-protosultan-soal-ahmadiyah/?utm_source=BlogGlue_network&utm_medium=BlogGlue_Plugin diunduh 21 April 2011.

<http://majelismujahidin.com/about/strategi-perjuangan-majelis-mujahidin/> diunduh 12 September 2011.

<http://www.muhammadiyah.or.id/id/artikel-menata-ulang-posisi-muhammadiyah-sebagai-gerakan-keagamaan-dan-kemasyarakatan-di-tengah-dinamika-kehidupan-bangsa-detail-2.html> diunduh 16 November 2011.

<http://www.suara-islam.com/news/berita/nasional/2064-debat-majelis-mujahidin-versus-gai> diunduh 3 Nopember 2011.

<http://www.tempo.co/read/news/2014/05/29/063581004/MK-Batalkan-Undang-Undang-Perkoperasian> accessed 9 Agustus 2014.

- Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Huntington, Samuel P., *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*, New York: Simon and Schuster, 1996.
- Huntington, Samuel P., *The Wave, Democratization in Late Twentieth Century*, Norma dan London: University of Oklahoma, 1991.
- Husodo, Siswono Yudo, "Pengantar" dalam Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Pengantar Siswono Yudo Husodo, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Irsyam, Mahrus, "Islam di Indonesia: Pengembangan Organisasi dan Gerakan Pemikiran", dalam *Prisma* No. 4, Tahun XIX 1990, Jakarta: LP3ES.
- Ismail, Faisal, *Islamic Traditionalism in Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan RI, 2003.
- Jaffee, David, *Levels of Socio-Economic Development Theory*, Connecticut – London: Praeger, 1998.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim al-, *at-Turuq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Mekah: al-Maktabah al-Tijariyah, 1996.
- Jawi, Sidik al-, "Konsep Civil Society dalam Perspektif Islam: Sebuah Tinjauan Ideologis", Makalah ceramah dan dialog di Radio Carolina Surabaya, Ahad, 16 September 2001.
- Jurdi, Syarifuddin, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indomesia 1966 – 2006*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- _____. *Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Karim, Khalil Abdul, *Sejarah, Perkelahian, Pemaknaan*, Terj. Kamran As'ad dari judul asli *al-Juzur at-Tarikhiyah li asy-Syariat al-Islamiyah*, Yogyakarta: LKiS, 1990.
- Karim, M.Rusli, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Kerjasama LPPI, LP3M, FAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Muhammadiyah Menyongsong Abad XXI*, Yogyakarta: Pustaka Suara Muhammadiyah, 1998.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *as-Siyasah asy-Syar'iyah*, Kairo: Matba'ah at-Taquadum, 1977.
- _____. *Ilm Usul al-Fiqh*, Mesir: Maktaba ad-Da'wah, 1968.
- Khitthah Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Lajnah Ta'lif wan Nasyar, 1985.
- Kimball, Charles, *Kala Agama Jadi Bencana*, Pengantar Dr. Sindhunata terjemahan Nurhadi dari *When Religion Becomes Evil*, Bandung: Mizan, 2003.
- Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- _____. *Kilas Balik Pemilihan Presiden 2004 (Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Masa Depan Demokrasi Pasca Pilpres 2004)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- _____. *Profil Pemilu 2004 Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.

_____. “Negara Harus Ambaureksa Bukan Ambaudhendha”, pidato kebudayaan pada malam tasyakuran peringatan ke-53 kemerdekaan RI yang diselenggarakan Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK) UGM di Yogyakarta, Selasa (18/8/1998), diunduh dari <http://www.geocities.ws/CapitolHill/Senate/8722/negara.htm> , 13 Juni 2011.

_____. *Islam Sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi, & Etika*, Jakarta: Teraju, 2005.

_____. *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, AE Priyono (editor), Bandung: Mizan, 2008.

_____. “Budaya Politik Partisipasi dalam Islam”, dalam *Prisma* No.5, Tahun XVII, edisi Sejarah Politik Islam, Jakarta: LP3ES. 1988, hlm. 80-81.

_____. *Muslim Tanpa Masjid*, Bandung: Mizan, 2001.

Kurzman, Charles (Ed.), *Liberal Islam A Sourcebook*, New York – Oxford: Oxford University Press, 1998.

Kuswanto, Triyoga A., *Jalan Sufi Nurcholish Madjid*, Pengantar: Budhy Munawar-Rachman. Yogyakarta: Pilar Media, 2007.

“Laskar-Laskar Berbicara” dalam *Sabili* No.7 Tahun VII 22 September 1999.

Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran: Akar Ideologis dan Penyebarannya*, terj. A. Najiyullah, Jakarta: al-I'tishom, 2002.

Liddle, R. William, "Skripturalisme Media Dakwah: Sebuah Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru", dalam Mark R. Woodward (ed.), *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998.

_____. *Partisipasi dan Partai Politik: Indonesia Pada Masa Awal Orde Baru*, terjemahan Tim Pustaka Utama Grafiti, Jakarta: Grafiti Pers, 1992.

_____. *Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, terjemahan Nung Katjasungkana, Jakarta: LP3ES, 1992.

_____. *Politics and Culture in Indonesia*, Ann Arbor: Center for Political Studies Institute for Social Reasen the Indonesia, 1998.

Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1987.

Maarif, Ahmad Syafii. "Menata Ulang Posisi Muhammadiyah Sebagai Gerakan Keagamaan dan Kemasyarakatan di Tengah Dinamika Kehidupan Bangsa", *makalah* disampaikan di forum Seminar dan Lokakarya Pra-Muktamar Muhammadiyah Satu Abad, Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, 15 Desember 2009.

_____. *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.

_____. *Masa Depan Bangsa dalam Taruhan*, Yogyakarta: Pustaka Suara Muhammadiyah, 2000.

- _____. *Membumikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- _____. "Masa Depan Islam di Indonesia", Prolog dalam Abdurrahman Wahid (Editor), *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, The Wahid Institute, dan Maarif Institute, 2009.
- _____. "Potret Politik Muhammadiyah", Pengantar dalam Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Madaniy, A. Malik, *Politik Berpayung Fiqh Membedah Perpolitikan Nusantara dengan Pisau Syari'at melalui Penggalan Khasanah Islam Klasik maupun Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010.
- Madjid, Nurcholish, *Islam, Kerakyatan, dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1993.
- _____. "Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Penyegaran Kembali Pemahaman Keagamaan", dalam Charles Kurzman (ed.), *Liberal Islam: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- _____. "Amandemen UUD 45", dalam Nurcholish Madjid, *Cendekiawan & Religiusitas Masyarakat Kolom-Kolom di Tabloid Tekad*, Jakarta: Paramadina dan PT. Dian Rakyat, 2009.
- _____. "Check and Balance", dalam Nurcholish Madjid, *Cendekiawan Religiusitas Masyarakat Kolom-Kolom di Tabloid Tekad*, Jakarta: Paramadina dan PT. Dian Rakyat, 2009.

- _____. “Islam, Iman, dan Ihsan Sebagai Trilogi Ajaran Ilahi” dalam Budhy Munawar Rachman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- _____. “Kata Pengantar” dalam, Komarudin Hidayat, dkk. (ed), *Passing Over, Melintasi Batas Agama*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1998.
- _____. “Kedaulatan Politik & Ekonomi”, dalam Nurcholish Madjid, *Cendekiawan Religiusitas Masyarakat Kolom-Kolom di Tabloid Tekad*, Jakarta: Paramadina dan PT. Dian Rakyat, 2009.
- _____. “Kedaulatan Politik & Ekonomi”, dalam Nurcholish Madjid, *Cendekiawan Religiusitas Masyarakat Kolom-Kolom di Tabloid Tekad*, Jakarta: Paramadina dan PT. Dian Rakyat, 2009.
- _____. “Membangun Indonesia Masa Depan”, Kata Pengantar dalam Budhy Munawar-Rachman (Editor), *Ensiklopedi Nurcholish Madjid Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina dan Center for Spirituality and Leadership dan Penerbit Mizan, 2005.
- _____. “Pluralisme dan Toleransi”, dalam Nurcholish Madjid, *Cendekiawan & Religiusitas Masyarakat Kolom-Kolom di Tabloid Tekad*, Jakarta: Paramadina dan PT. Dian Rakyat, 2009.
- _____. “Reformasi Menyeluruh dan Masalah Kepemimpinan Nasional Sebuah Catatan”, (makalah) yang dibuat untuk kalangan internal setelah lengsernya Presiden Soeharto pada Mei 1998 menjelang Pemilu 1999.
- _____. “Renungan Awal Tahun tentang Reformasi: Bagaimana Peluang Emas Tidak Lewat Sia-Sia”,

makalah untuk kalangan internal disampaikan dalam kesempatan dialog yang diselenggarakan oleh Kordinatoriat Wartawan DPR/MPR RI dan Forum Komunikasi Massa, diselenggarakan di Ruang Pustakaloka, Gedung DPR 17 Januari 2001.

- _____. "Rumah Demokrasi ", dalam Nurcholish Madjid, *Cendekiawan Religiusitas Masyarakat Kolom-Kolom di Tabloid Tekad*, Jakarta: Paramadina dan PT. Dian Rakyat. 2009.
- _____. "Islam Inklusif", dalam Nurcholish Madjid, *Cendekiawan & Religiusitas Masyarakat Kolom-Kolom di Tabloid Tekad*, Jakarta: Paramadina dan PT. Dian Rakyat, 2009.
- _____. "Kekuasaan dan Akhlak", *Suara Merdeka*, Selasa 2 Desember 2003.
- _____. "Menata Kembali Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara Menuju Peradaban Baru Indonesia", makalah disampaikan pada Studium Generale di Universitas Paramadina Mulya Jakarta, 1998 dalam Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- _____. "Pemilihan Umum", dalam Nurcholish Madjid, *Cendekiawan Religiusitas Masyarakat Kolom-Kolom di Tabloid Tekad*, Jakarta: Paramadina dan PT. Dian Rakyat, 2009.
- _____. *Cita-Cita Politik Islam Pasca Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- _____. *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 1998.

- _____. *Ensiklopedi Nurcholish Madjid Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban III*, Budhy Munawar Rachman, (Penyunting), Jakarta: Penerbit Mizan bekerja sama dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 2006.
- _____. *Ensiklopedi Nurcholish Madjid Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban IV*. Budhy Munawar Rachman, (Penyunting), Jakarta: Penerbit Mizan bekerja sama dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 2006.
- _____. *Indonesia Kita*, Jakarta: Universitas Paramadina, 2004.
- _____. *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, Pengantar: M. Dawam Rahardjo, Bandung: Mizan, 1995.
- _____. *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- _____. "Politik Islam", dalam Nurcholish Madjid, *Cendekiawan & Religiusitas Masyarakat Kolom-Kolom di Tabloid Tekad*, Jakarta: Paramadina dan PT. Dian Rakyat, 2009.
- _____. "Masa Depan Bangsa Pasca Bencana Kuta", dalam *Jurnal Universitas Paramadina* Vol.2 No. 2, Januari 2003.
- Mahendra, Yusril Ihza, "Harun Nasution Tentang Islam dan Masalah Kenegaraan", dalam LSAF, *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam*, Jakarta : LSAF, 1989.
- Majelis Mujahidin Indonesia, *Usulan Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia Disesuaikan dengan Syari'ah Islam*", Markaz Pusat majelis Mujahid, Yogyakarta: tt.

- Malik, Dedy Djamaludin dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia, Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholish Madjid, Jalaludin Rakhmat*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Maliki, Zainudin, *Agama Rakyat Agama Penguasa: Konstruksi tentang Realitas Agama dan Demokrasi*, Yogyakarta: Galang Press, 2000.
- Manan, Munafrizal, *Pentas Politik Indonesia Pasca Orde Baru*, Yogyakarta: IRE Press, 2005.
- Mas'ood, Mochtar, "Teorisasi Demokrasi: " The State of the Art", makalah yang disampaikan pada seminar nasional " Perkembangan Ilmu Sosial dan Pengembangan Demokrasi di Indonesia", Fisipol UGM, 18 September 1991.
- _____. "Perihal Boikot Pajak", (opini) *Harian Kompas*, Jumat, 28 September 2012.
- Masyhuri, K.H.A. Aziz, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu-1926 s/d Kedua Puluh Sembilan 1994*, Surabaya: Kerjasama PP RMI dengan Dinamika Press, 1997.
- Maududi, Abul A'la al-, *Islamic Way of Life*, Lahore: Islamic Publication Ltd, 1967.
- Mawardi, Ali bin Muhammad al-, *Adab al-Dunya wa al-Din*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- _____. *Al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah*, Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1996.
- MD, Moh. Mahfud, Menteri Pertahanan Era Gus Dur, " Potret Multi Dimensi Gus Dur" Pengantar dalam Muhklas

Syarkun (Penyunting), *Ensiklopedi Abdurrahman Wahid Riwayat Gus Dur*, Jakarta: PPPKI, 2013.

_____. *Gur Dur Islam, Politik, dan Kebangsaan*, Yogyakarta: LKiS, 2010.

Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UI Press, 1992.

Moertono, Soemarsaid, *Negara dan Usaha Bina – Negara di Jawa Masa Lampau, Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI – XIX*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.

Mubarak, Muhammad al-, *Nizam al-Islam: al-Hukm wa ad-Daulah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Muhammad, N.A. Noor, “Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan MMI”, dalam Tim Penerjemah Elsam, *Hak Sipil dan Politik*. Jakarta: ELSAM, 2001. hlm.179-180.

Muhammadiyah sebagai Civil Islam?
http://www.smpmuhammadiyah9.com/143_muhammad_ayah-sebagai-civil-islam/ diunduh 1 Nopember 2011.

Mujani, Saiful, R. William Liddle dan Kuskridho Ambardi, *Kuasa Rakyat Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Mizan Publika, 2011.

_____. “Religious Democrats: Democratic Culture and Muslim Political Participation in Post-Suharto Indonesia”, Disertasi Ph.D., The Ohio State University, 2003.

- Mulkhan, Abdul Munir, *Politik Santri Cara Menang Merebut Hati Rakyat*, Yogyakarta: IMPULSE dan Kanisius, 2009.
- Munawar, Said Agil Husin Al-, “Fiqh Siyasah dalam Konteks Perubahan Menuju Masyarakat Madani”, dalam *Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan*. Vol.I. No.I Juni 1999, Yogyakarta : Magister Studi Islam UII.
- Muslikh, Imam Samroni, dan Budi Suprojo, “Teks Kajen dan Serat Cebolek Sebagai Model Pembelajaran Resolusi Konflik (Studi Metaetika)”.Yogyakarta: DPPM UII, 2007.
- Muttaqin, Husnul, “Menuju Sosiologi Profetik” , dalam *Sosiologi Reflektif*, Prodi Sosiologi Fak. Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2012.
- Na’im, Abdullahi Ahmed An-, *Islam dan Negara Sekular Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, terj.Sri Murniati, Bandung: Mizan, 2007.
- _____. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, Syracus: Syracus University Press, 1990. hlm. 79-90.
- Nabhani, Taqiyuddin an-, *Muqaddimat al-Dustur*, T.tp: Hizb al-Tahrir, 1963.
- _____. *Nizam al-Islam*,T.tp: Hizb al-Tahrir, 2001.
- _____. *Peraturan Hidup Islami*, Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2001.
- _____. *Islamic State*, London: al-Khilafah Publications, 1998.

- _____. *Misaq al-Ummah*, T.tp: Hizbut Tahrir, Tanpa Tahun.
- _____. *The System of Islam*, London: al-Khilafah Publications, 2002.
- Nadroh, Siti, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999.
- Nadwi, Ali Ahmad an-, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1991.
- Najjar, Abdul Majid Umar an-, *Fiqh at-Tadayyun Fahman wa Tanzilan*, Tunisia: Az-Zaitunah, 1995.
- Najjar, Husain Fauzi al-, *al-Duktur Haikal wa Tarikh Jil 1888-1956*, Kairo: al-Hai'ah al-Misriyah al-Ammah li al-Katib, 1988.
- Nashir, Haedar, "Akses Sosial Kesehatan dan Peran Ormas Civil Society", dalam *Suara Muhammadiyah* No. / 99, 1 - 15 Februari 2014.
- _____. "Aktualisasi Khittah Muhammadiyah dan Format Peran Politik Kebangsaan", makalah disampaikan dalam Seminar Pra-Muktamar Satu Abad Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta tanggal 14 s/d 15 Desember 2009 di Kampus UMS, Surakarta. 2009.
- _____. "Demokratisasi Hubungan Negara dan Rakyat", dalam *Jurnal Media Inovasi*, No.1 TH.IX/1999.
- _____. *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Kata Pengantar Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, Jakarta: Pusat Studi Agama Peradaban Muhammadiyah, 2007.

- _____. *Khittah Muhammadiyah tentang Politik*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.
- _____. “Politik Muhammadiyah antara Kontinuitas dan Perubahan:., epilog dalam Syafullah, *Pergeseran Politik Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Nasution, Harun dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Nata, Abuddin, (editor), *Problematika Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: terbitan kerjasama PT Gramedia Widiasarana Inonesia dengan UIN Jakarta Press, 2002.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Heru Nugroho, “Mencari Legitimasi Akademik Ilmu Sosial Profetik”, *Kedaulatan Rakyat* , 13 Desember 1997.
- NU Mengabdi Bangsa dikutip dari http://www.nu.or.id/page/id/dinamic_detil/3/33414/Analisa_Berita/NU_Mengabdi_Bangsa.html diunduh 27 Agustus 2011.
- Nugroho, Heru, “Mencari Legitimasi Akademik Ilmu Sosial Profetik”, *Kedaulatan Rakyat* , (13 Desember 1997).
- Nujaim, Ibn, *al-Asybah wa an-Nazair ala Mazhab Abi Hanifah an-Nu'man*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- O'Donnel, Guilermo, *Transisi Menuju Demokrasi*, Jakarta: LP3ES, 1992.
- Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia tanggal 24 Jumadil Ula 1420 H/24 Agustus 2000, hlm. 2 dalam <http://www.al-islami.or.id>

Parekh, Bhikhu, "National Culture and Multiculturalism", dalam Kenneth Thomson (ed.). *Media and Cultural Regulation*, London: Sage Publications, 1997.

_____. *Rethinking Multiculturalism Cultural Diversity and Political Theory*, Cambridge Masachussets: Harvard University Press, 2002.

Patria, Ahmad Aru, *Gerakan Hizbut Tahrir: Kajian tentang Ideologi dan Perjuangan Politik dalam Upaya Mendirikan Daulah Islamiyah*, Yogyakarta: Skripsi UPN, 2003.

Perkins, John, *Confessions of an Economic Hit Man*, Berrett-Koehler Publishers, 2004.

Permata, Ahmad Norma, "Muhammadiyah sebagai Pilar Civil Islam di Indonesia", dalam *Suara Muhammadiyah* No.01/Th. Ke-94 1-15 Januari 2009, hlm. 44-45.

Pernyataan HTI Tentang Bentrok Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang Kantor Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Nomor: 193/PU/E/02/11, Jakarta, 07 Februari 2011 M.

Pernyataan HTI Tentang Keprihatinan terhadap Kondisi Negara Kantor Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia Nomor: 191/PU/E/01/11 Jakarta, 20 Januari 2011 M.

Pernyataan sikap Majelis Mujahidin ini disampaikan dalam upaya mengurai keruwetan tata kehidupan beragama dan bernegara yang dipertanyakan oleh tokoh lintas agama, sekaligusantisipasi terhadap anasir yang memiliki kepentingan terselubung atas nama lintas agama Yogyakarta, 25 Safar 1432/ 30 Januari 2011.

Pesan-pesan Mukatamar NU ke-28 tentang Masalah-masalah Masyarakat, Bangsa, dan Negara, Jakarta: Pusat dokumentasi dan Informasi NU.

Piagam Yogyakarta.

Priyono, AE., "Marginalisasi, Oposisi, dan Integrasi Islam di Indonesia Menyimak Pemikiran Dr.Kuntowijoyo", dalam Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, AE Priyono (editor). Bandung: Mizan, 2008.

Przeworski, Adam, *States and Markets A Primer in Political Economy*, New York: Cambridge University Press, 2003.

Putra, Shri Ahimsa-, "Cara-cara Menyelesaikan Sengketa dalam Masyarakat Pedesaan di Indonesia", dalam *UNISIA Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial No.40/XXII/IV/1999*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Qodir, Zuly, *Pembaharuan Pemikiran Islam: Wacana Intelektual Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

_____. *Sosiologi Politik Islam Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajara, 2012.

Qurtubi, Al-, *al-Jami' li Ahkam Alquran*, Mesir: Dar al-Katib al-Arabi, Tanpa Tahun. IV: 249.

Rabi, Syihabuddin Ahmad Ibn Abi, *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*, Kairo: Tanpa Nama Penerbit, Tanpa Tahun.

Rachman, Budhy Munawar-, "Nurcholish Madjid dan Pemikiran Islam" dikutip dari

<http://groups.yahoo.com/group/Dharmajala/message/971> didownload 2 April 2013.

_____. “Kata Pengantar”, dalam Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999.

_____. *Islam Pluralis, Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Rahardjo, Dawam, *Ensiklopedi Al Qur'an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta : Paramadina, 1996.

Rahardjo, Mudjia, “Analisis Wacana dalam Studi Keislaman: Sebuah Pengantar Awal”, <http://mudjiarahardjo.com/curriculum-vitae/231.html?task=view> diunduh 4 Nopember 2011.

Rakyat Diajak Menunggak Pajak”, dalam Harian *Republika*, Sabtu, 29 Desember 2012.

Ramadan, Tariq, *Western Muslims and the Future of Islam*, New York: Oxford University Press, 2004.

Raziq, Ali Abdur, *Al-Islam wa Ushul al-Hukm. Bahs fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam*, Kairo: Darul Hilal, 1925.

Redaksi, “Menuntut Kehadiran Negara”, Tajuk Rencana *Suara Muhammadiyah* No.02/Th.Ke-97, 16-31 Januari 2012.

Rekaman hasil wawancara dengan Irfan S. Awwas pada Konferensi Press pada pembukaan Kongress II MMI. 13 Agustus 2003.

Rekaman Tanya Jawab Acara Kick Andy di Stasiun MetroTV

- Relasi Negara-Masyarakat pada Era Transisi di Indonesia (1998-2001) (Analisis Sosial Politik pada Pemerintahan B.J. Habibie dan Gus Dur) dikutip dari <http://agkruk22.blogspot.com/2010/01/relasi-negara-masyarakat-pada-era.html> diunduh 11 April 2012.
- Remage, Douglas E., "Demokratisasi, Toleransi Agama dan Pancasila: Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid", dalam Greg Fealy & Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal*, Yogyakarta, LKiS, 1997.
- Renaldi, Adrian, "Radikalisme Agama Ancaman bagi Pemilu 2004?" From <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0402/10/opi02.html>, accessed, 4 Agustus 2009.
- Ricklefs, Merle C.. "Islamizing Indonesia: Religion and Politics in Singapore's Giant Neighbour". Kuliah umum yang diselenggarakan oleh Asia Research Institute, National University of Singapore, di Asian Civilizations Museum, 23 September 2004.
- Ridwan, Nur Khalik, *NU dan Bangsa 1914-2010 Pergulatan Politik dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- _____. *Pluralisme Borjuis, Kritik atas Nalar Pluralisme Cak Nur*, Yogyakarta: Galang Press, 2002.
- Risalah Mujahidin*, edisi 22, Ramadhan 1429/September 2008.
- Rizieq, Habib. *Hancurkan Liberalisme Tegakkan Syariat Islam*, Pengantar KH Ahmad Cholil Ridwan, Jakarta: Suara Islam Press, 2011.
- Sabili*, edisi No. 6 Tahun VIII 6 September 2000/7 Jumadil Akhir 1421.

- Saeed, Abdullah, *Islamic Thought An Introduction*, London and New York: Routledge, 2006.
- Safi, Omid. 'Introduction' dalam Omid Safi (ed.), *Progressive Muslims on Justice, Gender, and Pluralism*, Oxford: Oneworld, 2003.
- Saifuddin, *Khilafah vis - a - vis Nation State Telaah atas Pemikiran Politik HTI*, Yogyakarta: Mahameru, 2012.
- Sambutan Ust. Abu Bakar Ba'asyir Ketua Ahlul Halli wal Aqdi, 'Seruan ke Arah ,Tathbiquis Syari'ah, dalam Irfan S. Awwas (ed.), *Risalah Kongres Mujahidin 1*.
- Samson, Allan, "Islam and Politics in Indonesia", Disertasi Ph.D., University of California, 1972.
- _____. "Religious Belief and Political Action in Indonesian Islamic Modernism", dalam *Political Participation in Modern Indonesia*, disunting oleh R. William Liddle dan Donald K. Emmerson. New Haven, CT: Yale University Southeast Asia Studies, 1973.
- Santoso, Purwo, "Ilmu Sosial Transformatif", dalam *Millah Jurnal Studi Agama edisi Agama dan Keadaban Publik*, Vol. XI, No. 2 Februari 2012, Yogyakarta: MSI FIAI UII, 2012.
- Sarapung, Elga J.. "Ideologi Penyeragaman [Radikal]: Hambatan Konkrit Demokrasi di Negara Republik Indonesia", Disampaikan dalam Seminar dan Diskusi Publik, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 20 Mei 2011, diunduh dari <http://www.interfidei.or.id/index.php?page=news&id=39> diunduh 14 Oktober 2011.

Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemimpinan yang baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003.

Sejarah Muhammadiyah dikutip dari <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-50-det-sejarah.html> diunduh 16 November 2011.

Self, Peter, *Government by the Market? The Politics of Public Choice*, London: The Macmillan Press, 1993.

Serial Syariah Islam: Mewujudkan “Clean Governance and Good Governmet” dikutip dari <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/08/15/serial-syariah-islam-mewujudkan-clean-governance-and-good-governmet/> diunduh 18 Oktober 2011.

Setiawan, M. Nur Kholis, *Pribumisasi Al-Qur'an Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, Yogyakarta: Kaukaba, 2012.

Shepard, William E., “Islam and Ideology: Towards a Typology”, *International Journal of Middle East Studies*, 19, No. 3, Agustus 1987.

Shihab, Alwi, *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan, 1998.

Siraj, Said Aqil, “Sekali Lagi Soal Pajak”, (opini) *Harian Republika*, Senin, 24 September 2012.

Sirozi, Muhammad, *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*, Yogyakarta: Ak Group, 2004.

Situs <http://tokohindonesia.com/ensiklopedi/n/nurcholis-madjid/index.shtml>. diunduh 21 Desember 2011.

Situs

<http://www.tokohindonesia.com/majalah/09/nurcholis.s.html>. diunduh 21 Desember 2011.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1991.

SK Mukhtar XXX NU Nomor: 003/MNU-30/11/1999.

Stepan, Alfred, *The State and Society, Peru in Comparative Perspective*, New Jersey: Princeton University, 1978.

Suaedy, Ahmad, *Perspektif Pesantren: Islam Indonesia Gerakan Sosial Baru Demokratisasi*, Jakarta: The Wahid Institute, 2009.

Suastama, Ida Bagus Radendra. "Asas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Migas dan Ketenagalistrikan", dalam *Mimbar Hukum* Vol. 24 , No.2 , Juni 2012.

Sumardi, Mulyanto, *Penelitian Agama: Masalah dan Pemikiran*, Jakarta: Sinar Harapan, 1982.

Sundrijo, Dwi Ardhanariswari. "Accomondative Multiculturalism: Alternatif Pendekatan terhadap Masalah Keragaman Budaya di Asia Tenggara", dalam *Jurnal Politik Internasional Global*, vol. 9 No. 2 Desember 2007-Mei 2008.

Suny, Ismail, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru, 1984.

Suparlan, Parsudi, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural", Simposium Internasional Bali ke-3, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002, sumber:

http://www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel_ps.htm accessed 4 Agustus 2009.

- Surbakti, Ramlan, "Perspektif Kelembagaan Baru dengan Masyarakat", dalam *Jurnal Ilmu Politik*, No. 14, 1993.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Suwarno, *Relasi Muhammadiyah, Islam, dan Negara Kontribusi Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Suyuti, Jalaluddin al-, *al-Asybah wa an-Nazair fi al-Furu'*, Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun.
- Syamsuddin, M. Din, "Politik 'Islam Berkemajuan' Muhammadiyah", Pengantar dalam Alfian, *Politik Kaum Modernis Perlawanan Muhammadiyah Terhadap Kolonialisme Belanda*, terj. Machnun Husein dari *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist under Dutch Colonialism*, Jakarta: Al-Wasath Publishing House, 2010.
- _____. *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: Logos, 2001.
- _____. "Upaya Pencarian Konsep tentang Negara dalam Islam", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No.5, Vol. VI, Jakarta: LSAF. 1993.
- Syari'ati, Ali, *On the Sociology of Islam*, terj. Hamid Algar. Berkeley: Mizan Press, 1979.
- Syarkun, Muhklas (Penyunting). *Ensiklopedi Abdurrahman Wahid Gus Dur Spiritual Power Gus Dur* Jakarta: PPPKI. 2013.

- Syatibi, Asy-, *al-Muwafaqat fi Usul sy Syariah*. Beirut: Darr al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Syihab, Habib Muhammad Rizieq bin Husein, *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menjawab Berbagai Tuduhan terhadap Gerakan Nasional Anti Ma'siat di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah, 2008.
- Tabloid *DETIK* No. 025 Thn XVII, 25-31 Agustus 1993.
- Taimiyyah, Ibn, *as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1969.
- Tebba, Sudirman, *Islam Orde Baru Perubahan Politik dan Keagamaan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Thaba, Abdul Azis, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Tim editor, *Menuju Masyarakat Madani Strategi dan Agenda Reformasi*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan & Kawasan Universitas Gadjah Mada Bekerjasama dengan Konrad – Adenauer- Stiftung, 1998.
- Tim Penulis, *Fiqih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina dan The Asia Foundation, 2004.
- _____. *Negara Bangsa Versus Negara Syariah*, Yogyakarta: Gama Media, 2006.
- _____. *Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Safiria Insania Press dan Pusat Studi Islam UII, 2007.
- Tim PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Intermasa. 1992.

- Toda, Dami N., *Manggarai Mencari Pencerahan Hiostiografi*, Ende: Penerbit Nusa Indah, 1999.
- Toer, Pramoedya Ananta, *Bumi Manusia*, Jakarta: Hasta Mitra, 1989.
- Triwibowo, Darmawan dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Pengantar Siswono Yudo Husodo, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Umar, Nasruddin, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, Jakarta : LSIK, 1994.
- Urbaningrum, Anas, *Islamo Demokrasi, Pemikiran Nurcholish Madjid*, Jakarta: Katalis dan Penerbit Republika, 2004.
- Video wawancara Gus Dur dengan Andy F. Noya dalam acara “Kick Andy” yang ditayangkan pada tahun 2009.
- Voll, John Obert, *Islam: Continuity and Change in the Modern World*, Boulder Colorado: Westview Press, 1982.
- Wahid Abdurrahman, “Religious Beliefs: The Transmission and Development of Doctrine”, *Jakarta Post*, 7 September 1991.
- Wahid, Abdurrahman, “Massa Islam dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa”, dalam *Prisma*, Nomor Ekstra, 1984, hlm. 3-4 dan 9.
- _____. “Beberapa Aspek Teoritis dari Pemikiran Politik dan Negara dalam Islam: Sebuah Tinjauan Penjajagan”, Pidato pada Dies Natalis Universitas Tribakti, Kediri, 25 Oktober 1986.

- _____. “*Democracy, Religion, and Human Right in Shoutheast Asia*”, makalah pada East-West Center, Honolulu, 16 September 1994.
- _____. “Generasi Muda Islam dan Masa Depan Bangsa Indonesia”, makalah pada Temu Wicara Nasional FMGI, Jakarta, 27-30 Desember 1986.
- _____. “Individu, Negara dan Ideologi”, *Kompas*, 4 Februari 1994.
- _____. “Islam, Pluralisme, dan Demokratisasi”, dalam Arief Affandi, *Islam, Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- _____. “Massa Islam dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa, *Prisma*, Edisi Extra 1984.
- _____. “Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Dewasa Ini,” dalam *Prisma*, No.4, 1984.
- _____. “Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia”, *Prisma*, No.4/April 1984.
- _____. “Nasionalisme, Tasawwuf, dan Demokrasi”, dalam *Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser*, Pengantar KH. A. Mustofa Bisri, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- _____. “Pribumi Islam”, dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh (eds.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, Jakarta: P3M, 1989.
- _____. “Tegakkan Kedaulatan Rakyat“
http://www.balinter.net/news_124_Tegakkan_Kedaulatan_Rakyat.html# diunduh 13 Niovenber 2011.

- _____. ”Demokratisasi dalam Pengertian Kita”, dalam *Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser*, Pengantar KH. A. Mustofa Bisri, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- _____. *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, Kacung Marijan dan Ma'mun Murod Al-Brebesy (editor), Jakarta : PT Grasindo, 1999.
- _____. *Merumuskan Hubungan Ideologi Nasional dan Agama*, dalam *Aula*, Mei 1985.
- _____. “Islam: Perjuangan Etis ataukah Ideologis,” dalam *Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser*, Pengantar KH. A. Mustofa Bisri, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- _____. ”Islam dan Kesejahteraan Rakyat”, dikutip dari arsip redaksi Santri Gus Dur <http://santrigusdur.com/2014/05/islam-dan-kesejahteraan-rakyat/> diakses 12 Maret 2016.
- _____. “Islam: Antara Birokrasi dan Pasar Bebas”, dan” Elitisme, Populisme, dan Profesionalisme Kerakyatan” dalam *Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser*, Pengantar KH. A. Mustofa Bisri, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- _____. ”Islam: Perjuangan Etis ataukah Ideologis”, dalam *Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser*, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- _____. ”Demokratisasi dalam Pengertian Kita”, dalam *Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser*, Pengantar KH. A. Mustofa Bisri, Yogyakarta: LKiS, 2002.

_____. "Solidaritas Kita Sebagai Bangsa", dalam *Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser*, Pengantar KH. A. Mustofa Bisri, Yogyakarta: LKiS, 2002.

_____. *Membaca Sejarah Nusantara 25 Kolom Sejarah Gus Dur*, Pengantar: KH. A. Mustofa Bisri, Yogyakarta: LKiS, 2010.

Wahid, Marzuki dan Abd Moqsith Ghazali. "Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Nahdlatul Ulama", Makalah Annual Conference on Islamic Studies ke-10 Kementerian Agama R.I. dan IAIN Antasari di Banjarmasin, 1-4 November 2010.

Wahono, Francis. "Menegakkan Kebebasan Agama/Kepercayaan dan Hak-Hak EKOSOSBUD Menggeser Paradigma dari Tanggungjawab Negara ke Tanggungdesak Warga", makalah yang disampaikan pada tanggal 14 Oktober 2011 pada lokakarya sebagai bagian dari Konferensi Jaringan Antar Iman di Indonesia yang berlangsung dari tanggal 13 – 15 Oktober 2011 di UC – Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan tema "Agama-agama untuk Keadilan dan Perdamaian di Negara RI.

Wahyudi, Alwi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Wasfiyah MMI, Yogyakarta: Markaz Pusat Majelis Mujahidin, tt. (2002?).

Watt, W. Montgomery, *Muhammad: Prophet and Statesman*, London: Oxford University. 1964.

Wawancara Jaringan Islam Liberal" dengan Abdurrahman Wahid "Jangan Bikin Aturan Berdasarkan Islam Saja" 10/04/2006 dikutip dari

<http://bonsari.blogspot.co.id/2012/04/wawancara-jil-dengan-gus-dur.html> 20 Maret 2016.

Wibowo, I, *Negara Centeng*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.

_____. *Negara dan Masyarakat, Berkaca dari Pengalaman Republik Rakyat Cina*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Studi Cina, 2000.

Wijaya, Aksin, *Menusantarakan Islam Menelusuri Jejak Pergumulan Islam yang Tak Kunjung Usai di Nusantara*, Pengantar Prof. Dr. Kacung Marijan. Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2011.

Williams, Gwynn A., "Gramsci's Concept of Egomonia", *Journal of History of Ideas* XXI, 4 .Oktober-Desember 1980.

Woodward, Mark R., *Islam Jawa*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Yasin, Abd al-Jawad, *al-Sultah fi al-Islam al-Aql al-Fiqh al-Salafi baina al-Nas wa-al-Tarikh*, Beirut: al-Markaz as-Saqafi al-Arabi, 1998.

Yusanto, Ismail. *Kompas*, 8 Maret 2005.

Yustika, Ahmad Erani, *Ekonomi Politik Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Zaidan, Abdul Karim, *Rakyat dan Negara dalam Islam*, terj. M. Thalib dari *al-Fardu wa ad-Daulah fi al-Islam*, Yogyakarta: PD. Hidayat, 1985.

Zainal A. Baqir (CRCS-UGM), Jumat, 14 Oktober 2011 di Hotel University Club UGM Yogyakarta.

Zakaria, R. Yando, *Abieh Tandeh, Masyarakat Desa di Bawah Orde Baru*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2000.

Zakaria, R. Yando. "Pemulihan Kehidupan Desa dan UU No. 22 Tahun 1999", dalam *UNISIA Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* No. 46/XXV/III/2002. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), 2002.

_____. *Merebut Negara Beberapa Catatan Reflektif tentang Upaya-upaya Pengakuan, Pengembalian dan Pemulihan Otonomi Desa*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama Bekerja sama dengan Karsa, 2004.

Zallum, Abdul Qadim, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, T.tp.: Hizb al-Tahrir, 2002.

_____. *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, terj.Ahmad S.. Jakarta: HTI Press, 2009.

Zarqa, Ahmad ibn Muhammad az-, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.

Zuhri, Saifuddin, *Berangkat dari Pesantren*, Jakarta: Gunung Agung, 1987.

Daftar Narasumber yang Diwawancarai

Suparman Marzuki pakar politik hukum HAM, Selasa, 1 Nopember 2011.

Ahmad Syafii Maarif, Kamis, 13 Oktober 2011 di Hotel University Club, UGM Yogyakarta.

Nur Khalik Ridwan aktivis muda NU dan penulis muda NU, Senin, 7 November 2011 di kantor Pusat Studi Islam (PSI) UII Jl. Demangan Baru No. 24 Yogyakarta.

Irfan S. Awwas pada acara bedah buku *Fiqh Politik Muslim* yang diadakan Mahasiswa UII di GKU UII Yogyakarta, 24 Mei 2011.

Mohammad Rozi Pimpinan Hizbut Tahrir Indonesia Balikpapan, wawancara di Balikpapan 13 Desember 2011, dan 26 Februari 2012.

Mohammad Rozi Pimpinan Hizbut Tahrir Indonesia Balikpapan, wawancara di Yogyakarta 4 Februari 2012.

Habib Muhammad Rizieq Ketua Front Pembela Islam, Ahad, 23 Oktober 2011 di Markaz Front Pembela Islam di Jalan Wates km 7.5 Yogyakarta.

Habib Muhammad Rizieq Ketua Front Pembela Islam, Ahad, 22 Oktober 2011 di Mlangi Sleman 7.5 Yogyakarta.

Deni K. Yusuf (Lakpesdam NU Jawa Barat) di Jogja Plaza Hotel, Senin, 12 Maret 2012.

Dr. K.H. A. Malik Madaniy, M.A. Katibul Am Syuriyah PBNU, di rumah kediamannya, Rabu, 21 Maret 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sudut pandang Islam melihat perjalanan kehidupan negara bangsa (Indonesia) sejak 1998 sampai 2011 sekarang ini? Apakah NKRI ini sudah mampu memenuhi tuntutan dan tujuan berdirinya suatu negara untuk rakyat Indonesia sesuai dengan UUD 1945?
2. Jika dibandingkan dengan masa Orde Lama dan Orde Baru, apakah kehidupan rakyat Indonesia dalam berbagai bidang (terutama dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang ekonomi, sosial dan politik), di era reformasi lebih baik atau bagaimana?
3. Apakah cita-cita utama reformasi seperti membangun *civil society* atau *masyarakat madani* sudah ada tanda-tanda akan tercapai?
4. Apa ciri atau indikator yang dimiliki masyarakat madani atau *civil society*, terutama berhadapan dengan negara dalam bidang ekonomi, politik dan sosial?
5. Apa yang melatar belakangi reformasi di Indonesia memilih *civil society* atau masyarakat madani sebagai alternatif?
6. Bagaimana pandangan Islam terhadap suatu pandangan bahwa negara Indonesia sekarang ini lebih berpihak kepada pemilik modal daripada rakyat?
7. Bagaimana posisi rakyat Indonesia sekarang ini berhadapan dengan kekuasaan negara? Apakah kuat atau lemah? Atau bagaimana? Apakah sesuai dengan UUD 1945?
8. Melihat kondisi nyata (obyektif) posisi lemahnya rakyat berhadapan dengan kekuasaan negara tersebut, dari sudut

pandang Islam, apa yang bisa dilakukan Islam di Indonesia sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat?

9. Dalam situasi tersebut di atas, apakah urgen dan perlu diatur kembali relasi rakyat dan negara? Jika ya, apa untungnya bagi negara dan bagi rakyat?
10. Apakah dalam Islam ada pedoman/petunjuk yang jelas dan cukup implementatif tentang relasi rakyat dan negara? (mungkin ada rujukan historis atau nasnya? Atau bagaimana?)
11. Dari sudut pandang Islam, ketika muncul pemahaman agama yang berbeda atau bertentangan atau menyalahi pandangan/pemahaman mayoritas umat di Indonesia? Siapa yang mempunyai kekuasaan/otoritas untuk menangani masalah ini, apakah masyarakat agama itu sendiri atau perlu campur tangan negara dengan aparatnya? Mengapa?
12. Jika negara turut campur seperti tersebut, bagaimana pemahaman umat Islam tentang pasal 29 ayat 2 UUD 1945?
13. Lebih jauh lagi, di Indonesia ada peraturan yang sering dijadikan rujukan dalam mengatur kehidupan beragama di Indonesia adalah PNPS No. 1/ 1965 dan izin pendirian tempat ibadah? Apakah aturan-aturan ini masih relevan diterapkan sementara situasinya sudah jauh berubah? Atau bagaimana?
14. Ada sementara penilaian/pandangan bahwa krusialnya penanganan kehidupan beragama di Indonesia apakah negara yang harus intervensi atau merupakan persoalan internal umat beragama adalah disebabkan karena tidak jelasnya posisi hubungan antara agama dan negara di

Indonesia? Apakah hubungan agama dan negara perlu dirumuskan kembali secara tegas di Indonesia?

15. Bagaimana pandangan Islam Indonesia terhadap pernyataan bahwa akibat dari ketidakjelasan hubungan agama dan negara tersebut, berdampak pula terhadap ketidakjelasan siapa yang paling berhak/punya otoritas/kekuasaan dalam menyelesaikan persoalan sesat dan benarnya pemahaman agama,(negara atau patrakyat).
16. Kembali kepada kehidupan agama di Indonesia, terutama posisi kaum minoritas, apakah hak mereka dalam menjalankan dan mendirikan rumah ibadah perlu dilindungi oleh negara? Atau selain itu perlu memperoleh izin kaum mayoritas? Atau bagaimana?
17. Bagaimana pandangan tentang adanya konflik horizontal yang bernuansa etnik seperti sampit? Peran apa yang seharusnya dilakukan oleh negara/pemerintah?
18. Bagaimana pandangan tentang adanya persoalan gerakan separatis yang sewaktu-sewaktu muncul dan dapat mengancam NKRI? Dalam konteks ini, peran apa yang seharusnya dilakukan pemerintah./negara?
19. Untuk menuju masa depan Indonesia yang dicta-citakan. apakah perlu dimunculkan pemahaman dan kesadaran di kalangan umat bahwa untuk memperkuat posisi tawar posisi rakyat baik berhadapan dengan kekuasaan negara maupun intervensi pemilik modal (dalam negeri maupun asing), perlukah penataan relasi rakyat dan negara dilakukan?

6. S2 Pengkajian Islam IAIN Syarif Hidayatullah (lulus 1999)
7. S3 Studi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

C. Riwayat Pekerjaan

1. Dari 1995-1996 menjadi Kapus Dakwah di LPPAI (sekarang DPPAI) UII.
2. Dari 1999-2001 menjabat Ketua Bidang Akademik Magister Studi Islam (S2-MSI) Universitas Islam Indonesia
3. Dari 2002 sampai 2016, sebagai pemimpin redaksi jurnal *Millah: Jurnal Studi Agama Program Magister Studi Islam FIAI UII*.
4. Pada 2007 sampai sekarang sebagai Direktur Pusat Studi Siyasa dan Pemberdayaan Masyarakat (PSPM).
5. Anggota Tim Menanamkan nilai-nilai Civic Education dalam Pendidikan agama, kerjasama PSI UII dan The Asia Foundation (2002-2004).
6. Pimpinan proyek Program Kesetaraan Gender dalam Keluarga lintas agama Yogyakarta sejak 2007-2011. Kerjasama PSI UII-Cordaid Belanda.
7. Anggota tim Program Islam and Human Rights 2010-2012, kerjasama PSI UII dan NCHR Norwegia.
8. Anggota tim Program Save Children from Cyberbullying (2011- 2012) Kerjasama PSI UII dan Kindermissionwerk German.
9. Sejak tahun 2014 menjabat Direktur Pusat Studi Islam (PSI) UII.

D. Karya Ilmiah

1. Buku

- a. *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi* (bersama Amir Mu'allim) diterbitkan 1997 oleh Titian Ilahi Press.
- b. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (bersama Amir Mu'allim) diterbitkan 1999 oleh UII Press.

- c. *Peran Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Hukum Islam Najamuddin at-Tufi* diterbitkan tahun 2000 oleh UII Press.
- d. *Metodologi Hukum Islam Kontemporer* (karya terjemahan dari karya Taha Jabir Alwani *Source Methodology in Islamic Jurisprudence*) diterbitkan tahun 2001 oleh UII Press.
- e. *Agama dan Nalar Sekuler* (terjemahan bersama Aden Wijdan, SZ dari karya Robert Audi *Religion and Secular Reason*) diterbitkan tahun 2002 oleh UII Press bekerjasama dengan Pusat Studi Islam (PSI) UII.
- f. *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer* (bersama Amir Mu'allim) diterbitkan tahun 2005 oleh UII Press.
- g. *Pemikiran dan Peradaban Islam* (anggota tim penulis) diterbitkan oleh PSI UII dan Safiria Insania Press tahun 2007.
- h. *Bersikap Adil Jender Manifesto Keberagamaan Keluarga Jogja Setara Jender Lintas Iman dalam Keluarga* (anggota tim penulis) diterbitkan tahun 2009 oleh PSI UII & Cordaid Belanda.
- i. *Modul Kursus Gender Jogja* (anggota tim penulis) terbitan PSI UII tahun 2010.
- j. *Fiqh Politik Muslim Doktrin, Sejarah dan Pemikiran* diterbitkan oleh Amara Books tahun 2011.
- k. *Mendialogkan HAM Syariah: Pembelajaran HAM di Kampus Islam* (anggota tim penulis) diterbitkan oleh Kaukaba 2011.
- l. *Tipologi Wacana Keislaman Yogyakarta: Studi terhadap Buletin-Buletin Jum'at di Jogja* (ketua tim penulis) diterbitkan oleh Kaukaba 2011.
- m. *Studi Konvergensi dan Divergensi Pengetahuan dan Tatanilai: Warga Desa Girikerto Kecamatan Turi Sleman terhadap Gunung Merapi Pasca-Letusan*

- 2010 (ketua tim penulis) diterbitkan oleh Kaukaba 2011.
- n. *Wong Cilik Peretas Karakter Bangsa* (anggota tim penulis) diterbitkan oleh Sebelas Maret University Press, 2012.
 - o. *Kemiskinan Perspektif Agama-Agama* (anggota tim penulis) diterbitkan oleh Amara Books, 2012.
 - p. *Pribumsasi Hukum Islam* (anggota tim penulis) diterbitkan oleh Program Doktor (S3) PPS FIAI UII, 2013.
 - q. *Mencintai Perbedaan Renungan Lintas Iman Pluralisme dan Kerukunan* (anggota tim penulis) diterbitkan oleh Yayasan Bonet Punggupir, 2013.
 - r. *Robohnya Martabat Kemanusiaan* (anggota tim penulis) diterbitkan oleh Yayasan Bonet Punggupir, 2013.
 - s. *Nilai Tubuh Renungan Lintas Iman* (anggota tim penulis) diterbitkan oleh Yayasan Bonet Punggupir, 2013.
 - t. *Keluarga Masalah* (ketua tim penulis) diterbitkan oleh PSI UII dan Kaukaba, 2013.
 - u. *Demokrasi Lokal* (anggota tim penulis) diterbitkan oleh Amara Books tahun 2014.
 - v. *Fiqh Politik Muslim Progresif* diterbitkan oleh Kaukaba Dipantara, 2015.
 - w. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* diterbitkan oleh Kaukaba Dipantara, 2015.
 - x. *Konfigurasi Pemikiran Politik Islam Antara Tradisi dan Liberasi* diterbitkan atas Kerjasama Rona Pancaran Ilmu dan PSI UII, 2016.

2. Artikel Jurnal

- a. "Menggali Makna Mitos dalam Sastra dan Budaya Nusantara" dimuat dalam Jurnal *Millah* edisi Agustus 2010.
- b. "Kebebasan Beragama Perspektif Hak Asasi Manusia" dimuat dalam Jurnal *Al-Mawarid* edisi Januari 2011.

- c. "The Convergence and The Divergence of The Knowledge and the Value System of Girikerto Villagers of Turi Subdistrict of Sleman," dimuat dalam Jurnal *Millah* edisi Februari 2011.
- d. "Keragaman Berkeadaban dalam Bingkai Keindonesiaan" (artikelopini) dimuat dalam Harian *Kedaulatan Rakyat* 17 Juni 2011.
- e. "Meretas Agama Berkeadaban dalam Bingkai Keindonesiaan" dimuat dalam Jurnal *Millah* edisi Februari 2012.
- f. "Pembumian Misi Profetik di Tengah Arus Globalisasi Perspektif Islam Humanis" dimuat dalam Jurnal *Akademika* edisi Desember 2012
- g. "Pengelolaan Konflik Umat Agama di Indonesia" dimuat dalam Jurnal *Millah* edisi Februari 2013.
- h. "Inseminasi Nilai-Nilai Islam dalam Pembelajaran Ekonomi di MAYOGA" (anggota tim penulis) dimuat dalam Jurnal *Tapis* 2015.
- i. "Ideologisasi Agama Kasus MTA" dimuat dalam Jurnal *Akademika* 2015.
- j. "Usul al-Fikih dalam Hukum Islam Progresif" dimuat dalam Jurnal Kajian ke-Islaman *Madania*, 2015.
- k. "The Life of Javanese Moslems in Sathorn Bangkok Thailand" dalam *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 9, Issue 5 (April 2016)

3. Penelitian

- a. Pandangan PTAI Yogyakarta tentang HAM dan Syariah, 2010.
- b. Studi Konvergensi dan Divergensi Pengetahuan dan Tata Nilai Warga Desa Girikerto Turi Sleman Terhadap Gunung Merapi Pasca-Letusan 2010, 2011.
- c. Konstruksi Sosial Tata Ruang Studi di Pondok Pesantren al-Muayyad Surakarta, 2012.
- d. Face Book Sehat dalam Pandangan Siswa SMU di DIY, 2012.

- e. Kurikulum dan Kompetensi Lulusan Syari'ah PTAI Yogyakarta, 2013.
- f. Nalar Islam Dosen UII, 2013.
- g. Agama dan Negara di Era Reformasi Pandangan Ormas Mainstream dan Non Mainstream di Indonesia, 2013.
- h. Etos Kerja dan Budaya Masyarakat Nunukan Kalimantan Utara, 2014.
- i. Kehidupan Muslim Kampung Jawa di Bangkok Thailand, 2014.
- j. Relasi Kampus UII Demangan Baru dan Masyarakat, 2014,
- k. Ideologisasi Agama Studi Kasus Gerakan MTA di Yogyakarta, 2015

Yogyakarta, Juni 2016

Drs. Yusdani, M.Ag